



KABUPATEN
PASAMAN BARAT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP) 2023

KABUPATEN
PASAMAN BARAT

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



organisasikabpasbar@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
INSPEKTORAT

Jln. Soekarno Hatta No. 29 Telp.(0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat – Pasaman Barat 26366

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pasaman Barat untuk periode tahun 2023 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan yang terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Simpang Empat, 28 Maret 2024
INSPEKTUR DAERAH


EMNITA NADIRUA, SE.MM, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19750831 200604 2 005



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga Laporan Kinerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Penyusunan laporan ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Kami bertekad untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Pasaman Barat "Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera".

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Penyelenggaraan pemerintahan tahun 2023 didasari 3 Misi, 4 Tujuan dengan 5 Indikator, dan 12 Sasaran Strategis dengan 22 Indikator Kinerja Utama. Melalui program kegiatan yang terpadu, fokus, dan berkelanjutan, capaian kinerja yang signifikan telah diraih pada beberapa indikator.

Meskipun demikian, kami menyadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target. Analisis dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif akan digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja ke depan lebih akuntabel, meningkatkan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, melaksanakan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan menegakkan hukum.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, dan bimbingan dalam penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Pasaman

Barat Tahun 2023, khususnya Pemerintah melalui Kementerian PAN dan RB serta Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi semua pihak.

Simpang Empat, 28 Maret 2024

Bupati Pasaman Barat,

H. HAMSUARDI



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2023 memiliki 5 indikator kinerja untuk 4 tujuan dan 22 indikator kinerja untuk 12 sasaran strategis yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 27 (dua puluh tujuh) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 11 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 2 target; dan
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 14 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing 4 tujuan dan 12 sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori
Misi 1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif					
Tujuan 1.1	Penerapan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	B (62)	CC (54,63)	88,11	Tinggi
1.1.1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP	B (68)	B (62,70)	92,21	Sangat Tinggi
		Level Maturitas SPIP	2,48	3,132	126,29	Sangat Tinggi
		Tingkat Kapabilitas APIP	3	2,9	96,67	Sangat Tinggi

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori
1.1.2	Terwujudnya Birokrasi yang efisien dan efektif	Indeks Profesionalitas ASN	75	62,32	83,09	Tinggi
		Indeks Maturitas SPBE	2,25	2,82	125,33	Sangat Tinggi
1.1.3	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	85	81,66	96,07	Sangat Tinggi
Misi 2	Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing					
Tujuan 2.1	Mewujudkan Masyarakat Yang Agamais dan Berbudaya, Aman Tentram, dan Tangguh	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	11	17,55	40,45	Sangat Rendah
2.1.1	Masyarakat Yang Agamais dan berbudaya	% Capaian PASBAR Mengaji	65	40,91	62,94	Rendah
		Adat, seni dan budaya yang dilestarikan	7	11	157,14	Sangat Tinggi
2.1.2	Masyarakat yang rukun dan berkeadilan	Indeks Pembangunan Gender	91,03	90,17	99,06	Sangat Tinggi
		Predikat Kabupaten Peduli HAM	SP (Sangat Peduli)	P (Peduli)	100	Sangat Tinggi
		Indeks Pemberdayaan Gender	64,44	61,05	94,74	Sangat Tinggi
		Predikat Kabupaten Layak Anak	Nindya (720)	Madya (605)	84,03	Tinggi

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori
2.1.3	Masyarakat Yang Tangguh Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	1,60	0,30	18,75	Sangat Rendah
Tujuan 2.2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indek Pembangunan Manusia	70,07	72,03	102,80	Sangat Tinggi
2.2.1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah (th)	8,48	8,81	103,89	Sangat Tinggi
		Rata-rata harapan lama sekolah (th)	14,50	13,70	94,48	Sangat Tinggi
2.2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1) Usia Harapan Hidup (th)	67,97	72,44	106,58	Sangat Tinggi
		2) Prevalensi Stunting (%)	17,00	14,30	115,88	Sangat Tinggi
2.2.3	Terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas	3) Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,22%	1,50	77,05	Tinggi
Misi 3 Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif						
Tujuan 3.1	Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	Indeks Gini	0,255	0,238	106,67	Sangat Tinggi
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,26	4,33	101,64	Sangat Tinggi
3.1.1	Pengentasan kemiskinan	% Penduduk Miskin	6,96	6,92	100,57	Sangat Tinggi
3.1.2	Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,19	6,01	56,56	Rendah
3.1.3	Penguatan industri berbasis komoditas unggulan lokal	PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta)	41,53	43,43	104,58	Sangat Tinggi

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori
	Rata-Rata Capaian Kinerja				93,91	Sangat Tinggi

Berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja. Berikut adalah langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut:

Misi 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif

- **Tujuan 1.1: Penerapan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif**
 - **Kendala:**
 - Masih terdapat beberapa ASN yang belum memiliki kompetensi yang memadai.
 - Sarana dan prasarana penunjang belum optimal.
 - **Langkah yang telah dilakukan:**
 - Pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan.
 - Peningkatan sarana dan prasarana penunjang.
 - **Antisipasi kendala masa depan:**
 - Peningkatan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan ASN.
 - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kinerja.

Misi 2: Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing

- **Tujuan 2.1: Mewujudkan Masyarakat Yang Agamais dan Berbudaya, Aman Tentram, dan Tangguh**
 - **Kendala:**
 - Masih terdapat beberapa kasus kriminalitas.

- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai agama dan budaya.
 - Minimnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- **Langkah yang telah dilakukan:**
 - Peningkatan patroli dan pengamanan oleh aparat penegak hukum.
 - Penyuluhan dan pembinaan masyarakat tentang nilai-nilai agama dan budaya.
 - Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- **Antisipasi kendala masa depan:**
 - Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - Penguatan peran serta masyarakat dalam menjaga nilai-nilai agama dan budaya.
 - Penyusunan rencana penanggulangan bencana yang lebih komprehensif.
- **Tujuan 2.2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing**
 - **Kendala:**
 - Masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah.
 - Kurangnya tenaga kesehatan di daerah terpencil.
 - Tingginya angka pernikahan dini.
 - **Langkah yang telah dilakukan:**
 - Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan.
 - Penempatan tenaga kesehatan di daerah terpencil.
 - Penyuluhan dan edukasi tentang bahaya pernikahan dini.
 - **Antisipasi kendala masa depan:**
 - Peningkatan anggaran untuk pendidikan.
 - Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil.
 - Penguatan peran serta masyarakat dalam mencegah pernikahan dini.

Misi 3: Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif

- **Tujuan 3.1: Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan**
 - **Kendala:**
 - Masih terdapat kesenjangan ekonomi antar wilayah.
 - Kurangnya lapangan kerja.
 - Daya saing produk lokal masih rendah.
 - **Langkah yang telah dilakukan:**
 - Peningkatan infrastruktur dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
 - Penciptaan lapangan kerja melalui program-program pemberdayaan masyarakat.
 - Peningkatan kualitas produk lokal melalui pelatihan dan pendampingan.
 - **Antisipasi kendala masa depan:**
 - Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam mendorong investasi.
 - Penguatan UMKM dan koperasi.
 - Promosi produk lokal ke pasar yang lebih luas.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menunjukkan komitmen dan upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja. Dengan langkah-langkah yang telah dilakukan dan antisipasi terhadap kendala masa depan, diharapkan kinerja pemerintah daerah akan terus meningkat dan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pasaman Barat.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIUW

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi	2
1.3 Struktur Organisasi	2
1.4 Gambaran Umum Demografi	6
1.4.1. Jumlah Penduduk	6
1.4.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	6
1.4.3. Penduduk Miskin	7
1.5 Kondisi Ekonomi Daerah	8
1.6 Keragaman SDM Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	9
1.7 Isu Strategis	10
1.8 Sistematika Laporan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Rencana Strategis	17
2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	17
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	20
2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 METODELOGI PENGUKURAN KINERJA	29

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA	30
3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	33
3.4 REALISASI ANGGARAN	159
BAB IV PENUTUP	165
4.1 Kesimpulan	165
4.2 Langkah Untuk Meningkatkan Kinerja di Masa Mendatang	166
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Perangkat Daerah Tahun 2023	2
Tabel 2. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	19
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	20
Tabel 2. 3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	22
Tabel 3. 1 Interval Penilaian	29
Tabel 3. 2 Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023	30
Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja.....	35
Tabel 3. 4 Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.....	36
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Tahun 2022-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.....	36
Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kota se Provinsi Sumatera Barat	38
Tabel 3. 7 Capaian indikator kinerja sasaran strategis Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel.....	41
Tabel 3. 8 Capaian Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah.....	43
Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Tahun 2022-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	44
Tabel 3. 10 Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP	48
Tabel 3. 11 Rincian Nilai Evaluasi SAKIP tahun 2023	48
Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Tahun 2022-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Nilai SAKIP	49
Tabel 3. 13 Capaian Indikator Kinerja level maturitas SPIP	53
Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Tahun 2022-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP	54

Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi Level maturitas SPIP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Barat.....	55
Tabel 3. 16 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP.....	59
Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Tahun 2022-2023 dan Target 2026 Indikator Tingkat Kapabilitas APIP	60
Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi Tingkat Kapabilitas APIP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten /Kota se-Provinsi Sumatera Barat.....	61
Tabel 3. 19 Capaian Indikator Kinerja Sasaran terwujudnya Birokrasi Yang Efisien dan Efektif	64
Tabel 3. 20 Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN	66
Tabel 3. 21 Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN	67
Tabel 3. 22 Capaian Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP.....	71
Tabel 3. 23 Perbandingan Realisasi Tahun 2022-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Indeks Maturitas SPBE	72
Tabel 3. 24 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat.....	74
Tabel 3. 25 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	78
Tabel 3. 26 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada 12 Organisasi Perangkat Daerah.....	79
Tabel 3. 27 Perbandingan Realisasi Tahun 2022-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat	79
Tabel 3. 28 Capaian Indikator Kinerja Angka Kriminalitas (Per 10.000 penduduk) ...	83
Tabel 3. 29 Jumlah Peristiwa Kantibmas dan Pelanggaran di Kabupaten Pasaman Barat 2023	84
Tabel 3. 30 Data Jumlah Tindak Pidana dan Jumlah Penduduk 2020-2023	85
Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan target 2026 indikator kinerja angka kriminalitas (per 10.000 penduduk).....	86
Tabel 3. 32 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya	91

Tabel 3. 33 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2.1	92
Tabel 3. 34 Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator kinerja Persentase Capaian PASBAR Mengaji.....	93
Tabel 3. 35 Capaian Indikator Kinerja Adat, Seni dan Budaya yang dilestarikan ...	97
Tabel 3. 36 Adat, Seni dan Budaya yang dilestarikan.....	97
Tabel 3. 37 Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Adat, Seni dan Budaya yang dilestarikan	99
Tabel 3. 38 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Masyarakat yang rukun dan berkeadilan	100
Tabel 3. 39 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender	101
Tabel 3. 40 Perbandingan Realisasi Tahun 2022-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender.....	102
Tabel 3. 41 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dan Standar Nasional Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender.....	102
Tabel 3. 42 Capaian Indikator Kinerja Predikat Kabupaten Peduli HAM	105
Tabel 3. 43 Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Predikat Kabupaten Peduli HAM	105
Tabel 3. 44 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dan Standar Nasional Indikator Kinerja Predikat Kabupaten Peduli HAM	106
Tabel 3. 45 Indikator Indeks Pemberdayaan Gender.....	107
Tabel 3. 46 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender.....	107
Tabel 3. 47 Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender.....	107
Tabel 3. 48 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dan Standar Nasional Indikator Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender.....	108
Tabel 3. 49 Indikator Kabupaten Layak Anak	109
Tabel 3. 50 Capaian Indikator Kinerja Predikat Kabupaten Layak Anak	111
Tabel 3. 51 Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Predikat Kabupaten Layak Anak	112
Tabel 3. 52 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dan Standar Nasional Indikator Kinerja Predikat Kabupaten Layak Anak	113

Tabel 3. 53 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Masyarakat yang rukun dan berkeadilan	114
Tabel 3. 54 Capaian Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Daerah.....	115
Tabel 3. 55 Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Daerah.....	117
Tabel 3. 56 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dan Standar Provinsi	117
Tabel 3. 57 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia	120
Tabel 3. 58 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Indonesia	121
Tabel 3. 59 Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia	122
Tabel 3. 60 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	123
Tabel 3. 61 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	124
Tabel 3. 62 Capaian Indikator Kinerja Rata-rata lama sekolah (th)	125
Tabel 3. 63 Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Rata-rata Lama Sekolah (th)	126
Tabel 3. 64 Capaian Indikator Kinerja Rata-rata harapan lama sekolah (th)	129
Tabel 3. 65 Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Rata-rata harapan lama sekolah (th)	130
Tabel 3. 66 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	132
Tabel 3. 67 Capaian Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup (th)	132
Tabel 3. 68 Perbandingan realisasi tahun 2021-2023 dan target 2026 indikator kinerja Usia Harapan Hidup (th)	133
Tabel 3. 69 Perbandingan Realisasi Usia Harapan Hidup (th) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dan Indonesia	134
Tabel 3. 70 Capaian Indikator Kinerja Prevalensi Stunting (%).....	135
Tabel 3. 71 Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Prevalensi Stunting (%).....	135

Tabel 3. 72 Perbandingan realisasi Prevalensi Stunting (%) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dan Indonesia	136
Tabel 3. 73 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas	138
Tabel 3. 74 Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk (%).....	138
Tabel 3. 75 Perbandingan realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dan Indonesia	139
Tabel 3. 76 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Daerah Dan Pemerataan Pendapatan	141
Tabel 3. 77 Realisasi Indikator Kinerja Indeks Gini.....	142
Tabel 3. 78 Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Indeks Gini	142
Tabel 3. 79 Perbandingan realisasi Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dan Nasional indikator kinerja Indeks Gini	143
Tabel 3. 80 Realisasi Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	145
Tabel 3. 81 Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 Dan Target 2026 Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).....	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten	6
Gambar 1. 2	Grafik IPM Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2023	7
Gambar 1. 3	Tren Persentase Penduduk Miskin	8
Gambar 1. 4	Laju Pertumbuhan PDRB (persen) di Kabupaten Pasaman Barat, 2019–2023	8
Gambar 1. 5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pasaman Barat, 2023	9
Gambar 3. 1	Perkembangan nilai evaluasi SAKIP tahun 2016-2023	50
Gambar 3. 2	Level maturitas SPIP	53
Gambar 3. 3	Level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d. Level 5	58
Gambar 3. 4	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019-2023	125
Gambar 3. 5	Perkembangan Rata-rata Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019-2023	129
Gambar 3. 6	Usia Harapan Hidup (th) Kabupaten Pasaman Barat 2021-2023	133
Gambar 3. 7	Prevalensi Stunting (%) Kabupaten Pasaman Barat 2021-2023	136
Gambar 3. 8	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Kabupaten Pasaman Barat 2021-2023	139
Gambar 3. 9	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Pasaman Barat 2021-2023	146
Gambar 3. 10	% Penduduk Miskin Kabupaten Pasaman Barat 2021-2023	149
Gambar 3. 11	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Pasaman Barat	153
Gambar 3. 12	PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta) Kabupaten Pasaman Barat	157

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegalannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks birokrasi, akuntabilitas pemerintah menjadi perwujudan tanggung jawab instansi pemerintah atas pelaksanaan misinya. Hal ini sejalan dengan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, serta diperkuat oleh Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan tersebut, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan/ kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014, serta mempedomani RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Permasalahan utama saat ini adalah bagaimana mewujudkan visi misi pemerintah, yaitu Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi. Laporan ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023. Pencapaian tersebut disajikan dalam bentuk informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran, disertai penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingannya dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Analisis atas capaian sasaran ini akan digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada daerah, melaksanakan tugas dan wewenang daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta melaksanakan pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyelenggarakan beberapa fungsi, seperti:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kewilayahan, meliputi penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan lain sebagainya.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pelayanan publik, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain sebagainya.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan daerah.
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang aparatur.
6. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang umum.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dibantu oleh perangkat daerah, seperti Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kecamatan, dan Nagari.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Perangkat Daerah Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah	Jumlah unit
1.	Sekretariat Daerah	1
2.	Sekretariat DPRD	1
3.	Inspektorat	1

4.	Dinas	22
5.	Badan	6
6.	Kecamatan	11
TOTAL		42

Rincian unit Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, yang terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 4. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Bidang Kebakaran;
 7. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 8. Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;

9. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
12. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah dan bidang perindustrian;
13. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
14. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
15. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, dan bidang Pertanahan;
16. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
17. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
19. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
20. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
21. Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan bidang energi dan sumber daya mineral; dan

22. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 4. Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Kecamatan
1. Kecamatan Talamau Tipe A
 2. Kecamatan Kinali Tipe A
 3. Kecamatan Pasaman Tipe A
 4. Kecamatan Gunung Tuleh Tipe A
 5. Kecamatan Lembah Melintang Tipe A
 6. Kecamatan Sungai Beremas Tipe A
 7. Kecamatan Ranah Batahan Tipe A
 8. Kecamatan Luhak Nan Duo Tipe A
 9. Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Tipe A
 10. Kecamatan Sungai Aur Tipe A
 11. Kecamatan Koto Balingka Tipe A

1.4 Gambaran Umum Demografi

1.4.1. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Pasaman Barat menurut hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2023 berjumlah sebanyak 450.050 jiwa dengan komposisi 227.838 jiwa laki-laki dan 222.212 jiwa perempuan. Dengan rasio jenis kelamin 102 jiwa laki-laki setiap 100 jiwa perempuan. Penduduk tersebut tersebar pada 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat.

Jika kita melihat distribusi penduduk per kecamatan, jumlah penduduk terbesar berdomisili di Kecamatan Pasaman yakni 81.240 jiwa. Diikuti oleh Kecamatan Kinali dengan jumlah penduduk 73.301 jiwa dan Kecamatan Lembah Melintang 51.299 jiwa. Sedangkan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dengan jumlah penduduk 15.375 jiwa merupakan kecamatan terkecil jumlah penduduknya di Kabupaten Pasaman Barat.

Gambar 1. 1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten

Kecamatan <i>District</i>	2023		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sungai Beremas	14.969	14.111	29.080
2. Ranah Batahan	14.360	14.203	28.563
3. Koto Balingka	15.918	15.856	31.774
4. Sungai Aur	18.900	18.530	37.430
5. Lembah Melintang	25.861	25.438	51.299
6. Gunung Tuleh	12.824	12.413	25.237
7. Talamau	15.803	15.035	30.838
8. Pasaman	40.939	40.301	81.240
9. Luhak Nan Duo	23.213	22.700	45.913
10. Sasak Ranah Pasisie	7.795	7.580	15.375
11. Kinali	37.256	36.045	73.301
Pasaman Barat	227.838	222.212	450.050

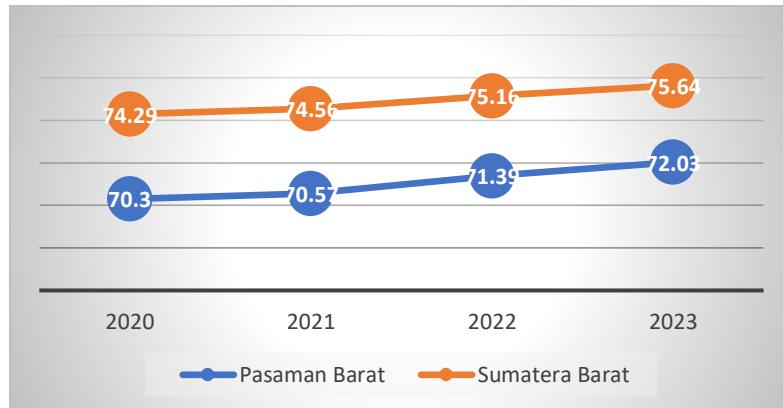
Sumber : Badan Pusat Statistik 2024

1.4.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia/masyarakat.

Komponen pembentuk IPM dalam kurun waktu tahun 2020-2023 terus mengalami kenaikan. Ini menunjukkan adanya kinerja pembangunan manusia yang baik di semua sektor pembentuk IPM tersebut.

Gambar 1. 2
Grafik IPM Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik 2024

Pada tahun 2023 IPM Kabupaten Pasaman Barat kembali meningkat di angka 72.03. Namun demikian, IPM Kabupaten Pasaman Barat masih berada dibawah rata-rata IPM Provinsi Sumatera Barat. Jika diamati dari selisih IPM Kabupaten Pasaman Barat dengan IPM Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa perkembangan IPM Kabupaten Pasaman Barat setiap tahun meningkat dengan percepatan yang lebih baik daripada rata-rata IPM Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat.

1.4.3. Penduduk Miskin

Didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan beberapa bidang yang menjadi prioritas pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan penyediaan perumahan/pemukiman yang layak. Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Pada tahun 2023 angka kemiskinan Kabupaten Pasaman Barat sebesar 6,92%, mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 6,93%.

Gambar 1. 3
Tren Persentase Penduduk Miskin



Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

1.5 Kondisi Ekonomi Daerah

PDRB Pasaman Barat atas dasar harga berlaku tahun 2023 angka sangat sementara sebesar 43.428.060 rupiah dan angka sementara tahun 2022 adalah 40.305.710 rupiah. Sedangkan berdasarkan atas dasar harga konstan 2010 yaitu tahun 2023 angka sangat sementara 12.684.894 rupiah dan tahun 2022 angka sementara sebesar 2.158.616 rupiah.

Dari seluruh sektor yang memberikan sumbangan dalam pembentukan PDRB Pasaman Barat atas dasar harga berlaku, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan andil terbesar yaitu 6.310.383 rupiah pada tahun 2019 atau 40,97 persen dan tahun 2018 adalah 6.252.936 rupiah atau 42,81 persen.

Berdasarkan angka sangat sementara, pada tahun 2023 perekonomian Pasaman Barat naik menjadi 4,33 persen dari tahun 2022 yaitu 4,13 persen.

Gambar 1. 4
Laju Pertumbuhan PDRB (persen) di Kabupaten Pasaman Barat, 2019–2023



Sumber : Badan Pusat Statistik 2024

1.6 Keragaman SDM Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 2.833 pegawai fungsional tertentu, 1.163 pegawai fungsional umum dan 425 pegawai struktural di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan total 4.425 pegawai. Menurut jenis kelamin, pada jabatan fungsional keterbandingan antar pegawai negeri laki-laki dengan perempuan adalah 1:2, sementara di level struktural, lebih banyak pegawai laki-laki dibandingkan perempuan.

Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Pasaman Barat didominasi oleh jenjang Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D sebanyak 3.288 orang, Diploma III/Akta III/Sarjana Muda sebanyak 724 orang, Diploma I, II/Akta I, II sebanyak 125 Orang, Sekolah Menengah Atas sebanyak 279, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 6, dan sampai dengan SD sebanyak 3 orang.

Sementara bila dipilah lagi menurut golongan kepangkatan, datanya menunjukkan sama dengan data sebelumnya lebih banyak di dominasi oleh kaum perempuan walaupun ada pada beberapa level kepangkatan yang laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. 5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pasaman Barat, 2023

Pangkat/Golongan/Ruang Hierarchy	2023		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. I/A (Juru Muda)	-	-	-
2. I/B (Juru Muda Tingkat I)	-	-	-
3. I/C (Juru)	-	-	-
4. I/D (Juru Tingkat I)	2	1	3
Golongan I / Group 1	2	1	3
5. II/A (Pengatur Muda)	14	9	23
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	21	11	32
7. II/C (pengatur)	54	84	138
8. II/D (Pengatur Tingkat I)	64	106	170
Golongan II / Group II	153	210	363
9. III/A (Penata Muda)	197	535	732
10. III/B (Penata Muda Tingkat I)	150	437	587
11. III/C (Penata)	161	470	631
12. III/D (Penata Tingkat I)	292	762	1.054
Golongan III / Group III	800	2.204	3.004
13. IV/A (Pembina)	228	358	586
14. IV/B (Pembina Tingkat I)	132	287	419
15. IV/C (Pembina Utama Muda)	23	26	49
16. IV/D (Pembina Utama Madya)	1	-	1
17. IV/E (Pembina Utama)	-	-	0
Golongan IV / Group IV	384	671	1.055
Jumlah/Total	1.339	3.086	4.425

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

1.7 Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai. Identifikasi isu-isu strategis Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal utama pembangunan. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan daerah, apalagi Kabupaten Pasaman Barat masih memiliki pekerjaan rumah yang berat di bidang ini. Peningkatan kualitas SDM mesti dilakukan sejalan antara bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

a. Isu strategis di bidang pendidikan secara rinci adalah Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, yang selanjutnya dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- 2) Pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana belajar;
- 3) Meniadakan segala macam pungutan bagi orang tua siswa;
- 4) Re-distribusi tenaga pendidik dan kependidikan;
- 5) Peningkatan kualitas belajar dengan menerapkan teknologi informasi,
- 6) serta mendorong minat baca masyarakat.
- 7) Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan di bidang pendidikan anak usia dini (PAUD); dan
- 8) Peningkatan layanan pendidikan kesetaraan perlu mendapat perhatian lebih, karena dua bidang pendidikan yang mengampu SPM ini masih mendapat perhatian minim.

b. Isu strategis di bidang kesehatan adalah peningkatan derajat Kesehatan masyarakat. Secara rinci, isu strategis bidang kesehatan adalah :

- 1) Peningkatan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan dan pengobatan gratis;
 - 2) Memenuhi standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
 - 3) Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak;
 - 4) Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau hingga ke tingkat kejorongan;
 - 5) Re-distribusi tenaga medis dan non-medis;
 - 6) Percepatan operasionalisasi RSUD Pasaman Barat dan RSUD Pratama Ujung Gading;
 - 7) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan di RSUD;
 - 8) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, penanganan stunting;
 - 9) Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - 10) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk; dan
 - 11) Promosi gemar berolahraga dan prestasi keolahragaan.
2. Percepatan Penanganan Stunting

Penanganan stunting merupakan isu strategis nasional bahkan global, karena stunting sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Penanganan stunting melibatkan peran multi-sektor karena sektor kesehatan (gizi spesifik) hanya menyumbang 30% terhadap kejadian stunting sedangkan 70% lagi dipengaruhi oleh gizi spesifik, yakni pola asuh, lingkungan, kondisi ekonomi, dan ketahanan pangan.

Percepatan penanganan stunting dilakukan melalui delapan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting di daerah, dan Kabupaten Pasaman Barat telah menerapkannya sejak tahun 2019. Penanganan stunting melibatkan peran sejumlah OPD yang bertanggung jawab dalam penanganan gizi spesifik dan gizi sensitif. Isu strategis penanganan stunting di Kabupaten Pasaman Barat selanjutnya dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Intervensi gizi spesifik yang mencakup gizi, komunikasi dan informasi tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), penanganan penyakit menular pada 1000 HPK (ibu hamil dan bayi di bawah dua tahun), bayi di bawah 5 tahun, dan remaja putri;

- b. Pemenuhan air minum dan sanitasi layak, yang dilakukan melalui pemenuhan SPM bidang air minum dan sanitasi;
 - c. Pemenuhan jaminan sosial, seperti JKN, bantuan pangan non tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan yang diprioritaskan pada keluarga 1000 HPK miskin;
 - d. Peningkatan cakupan edukasi, parenting atau pengasuhan bagi keluarga 1000 HPK melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - e. Peningkatan partisipasi keluarga 1000 HPK pada program Bina Keluarga Balita (BKB);
 - f. Peningkatan ketahanan pangan, yakni Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - g. Pemenuhan administrasi kependudukan, terutama Akte Kelahiran pada anak usia 0-18 tahun, yang menjadi prasyarat bagi pengurusan administrasi di bidang pendidikan dan kesehatan;
 - h. Percepatan integrasi 10 (sepuluh) layanan dasar di Posyandu;
 - i. Implementasi strategi komunikasi perubahan perilaku dalam penanganan stunting mulai dari tingkat nagari hingga tingkat kabupaten;
 - j. Peningkatan sinkronisasi, kolaborasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting mulai dari Tingkat nagari hingga Kabupaten; dan
 - k. Peningkatan kualitas data dan sistem manajemen data.
3. Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana alam dan non alam (pandemi Covid-19) beserta pengendalian dampak sosial ekonominya. Bencana alam dapat menghambat pembangunan sekaligus menghambat akses penduduk terhadap pelayanan publik. Selanjutnya, bencana non-alam Covid-19 terbukti telah memberikan dampak yang buruk terhadap kinerja pembangunan daerah, bukan hanya karena berkurangnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, namun juga memburuknya capaian indikator di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi.
4. Peningkatan keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat, melalui peningkatan pengamalan ajaran agama, penerapan nilai-nilai budaya dalam masyarakat, pemenuhan SPM bidang kebencanaan dan ketenteraman dan ketertiban

umum, pencegahan dan penanganan konflik, penegakan peraturan daerah, pemberdayaan peningkatan peran serta kepemudaan dan Lembaga masyarakat, serta memerangi segala macam tindak diskriminatif terhadap wanita, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Upaya ini juga perlu didukung dengan peningkatan kerjasama dan harmonisasi antar kelompok masyarakat, antara suku, agama dan golongan dan dengan dunia usaha.

5. Percepatan penanggulangan kemiskinan menjadi isu yang sangat relevan, terutama karena dampak pandemi Covid-19 telah mempengaruhi aspek perekonomian masyarakat. Isu strategis penanggulangan kemiskinan selanjutnya dirinci sebagai berikut :
 - a. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum bidang Sosial;
 - b. Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan miskin;
 - c. Pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;
 - d. Peningkatan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan orang tidak mampu;
 - e. Pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial;
 - f. Penyediaan sarana dan prasarana umum, sarana sosial, dan pendidikan yang inklusif (ramah bagi lansia, penyandang disabilitas, maupun anak).
 - g. Penyediaan sistem data yang handal dan akurat; dan
 - h. Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan yang aktif dan menjalankan fungsinya dengan baik, mulai dari tingkat terendah (nagari) hingga tingkat kabupaten.
6. Percepatan penurunan tingkat pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan perlindungan terhadap tenaga kerja secara berkeadilan. Penyediaan kesempatan kerja yang sama antara laki-laki dan perempuan mesti mendapat perhatian.
7. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.

Perekonomian Kabupaten Pasaman Barat terutama ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri. Oleh sebab itu, untuk mendorong tumbuhnya

perekonomian daerah, maka tiga sektor ini mesti mendapat perhatian khusus. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasaman Barat dapat didorong melalui :

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dan komoditi peternakan;
- b. Peningkatan produksi dan pengolahan komoditi perikanan;
- c. Hilirisasi komoditi unggulan untuk peningkatan nilai tambah;
- d. Peningkatan keberdayaan kelembagaan petani, koperasi, usaha mikro, sektor jasa perdagangan, perdagangan;
- e. Pengembangan pariwisata ekonomi kreatif; dan
- f. Membangun iklim investasi yang dapat mendorong tumbuhnya perekonomian daerah secara lebih cepat.

8. Pembangunan infrastruktur secara berkeadilan.

Konektivitas wilayah berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Daerah-daerah tertinggal mendapatkan akses yang kurang terhadap sarana dan prasarana perekonomian, sehingga arus barang dan jasa menjadi terhambat. Upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah perlu didukung dengan berbagai upaya, seperti :

- a. Peningkatan pembangunan infrastruktur prasarana wilayah, transportasi dan telekomunikasi dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan pelayanan publik;
- b. Pembangunan sarana air bersih, kawasan permukiman dan Kawasan pertumbuhan;
- c. Pengentasan daerah tertinggal dan daerah terisolir;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
- e. Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi; dan
- f. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.

9. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

Isu strategis peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani selanjutnya dirinci sebagai berikut :

- a) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang bersih dan profesional;

- b) Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi (*egovernment*);

Pada Tahun 2020, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang pelayanan publik di Kabupaten Pasaman Barat mencapai rata-rata 82,59. Sayangnya, penilaian IKM baru dilakukan pada empat OPD pemberi layanan, yakni: Pelayanan Terpadu Satu Pintu 85,15, RSUD 75,99, Capil 82,23, BKD 87,00. Idealnya, penilaian IKM dilakukan pada semua OPD, termasuk Kecamatan, Puskesmas, dan Pemerintahan Nagari, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah.

- c) Penyederhanaan birokrasi, perampingan struktur organisasi;
- d) Penguatan sistem pengawasan internal;
- e) Penguatan sistem inovasi daerah untuk pelayanan publik;
- f) Penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis data dan informasi yang handal dan akurat; dan
- g) Penyediaan sistem data daerah yang handal dan akurat.

10. Percepatan pemenuhan SPM.

Analisa pada Bab II maupun analisis permasalahan di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat belum berhasil memenuhi SPM di seluruh bidang, terutama di Tahun 2020. Pemenuhan SPM semestinya menjadi prioritas pada seluruh organisasi perangkat daerah pemegang SPM.

11. Peningkatan daya saing daerah.

Daya saing daerah di Kabupaten Pasaman Barat, baik di bidang ekonomi, iklim investasi, dan kualitas SDM, perlu menjadi perhatian. Untuk mewujudkan Pasaman Barat yang bermartabat, maka daerah harus memiliki daya saing, sehingga bisa bersaing dengan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat maupun di Indonesia. Peningkatan daya saing daerah dapat dilakukan melalui percepatan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta peningkatan keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

12. Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs); Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable

Development Goals (TPB/SDGs) merupakan hasil dari kesepakatan internasional. Pelaksanaan TPB di Kabupaten Pasaman Barat dapat dilakukan dengan mendorong program yang berorientasi pada TPB di nagari dan memprioritaskan program/kegiatan yang sejalan dengan TPB pada OPD terkait. Selain itu, evaluasi pencapaian TPB/SDGs mestinya didukung dengan data-data yang akurat.

1.8 Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan visi daerah yaitu :

“Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”

Dari pernyataan visi tersebut, ada beberapa kata kunci yang menjadi penekanan, yakni: Masyarakat yang Bermartabat, Masyarakat yang Agamais, dan Masyarakat yang Maju dan Sejahtera.

1. Pasaman Barat Yang Bermartabat

Secara harfiah, martabat berarti harkat kemanusiaan atau harga diri. Artinya, bermartabat berarti mempunyai harga diri. Martabat merupakan hak setiap orang untuk dihormati, dihargai, dan diperlukan secara etis, sehingga tidak melukai harga diri orang tersebut. Konsep martabat sangat penting di bidang etika, hukum moralitas, dan politik, karena martabat merupakan hak yang melekat pada diri setiap orang. Istilah ‘bermartabat’ juga dapat mendeskripsikan cara seseorang bertindak atau berprilaku.

Visi untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat memiliki makna yang sangat mendalam. Masyarakat yang bermartabat berarti masyarakat yang dihormati, diperlakukan secara etis dan setara dengan masyarakat lainnya di Propinsi Sumatera Barat maupun di Indonesia secara umum. Dalam konteks pemerintahan, masyarakat yang bermartabat diukur dengan kemampuan pemerintah untuk memposisikan Kabupaten Pasaman Barat dengan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat maupun di Indonesia. Hal ini ditandai dengan kemampuan pemerintah untuk mengelola pemerintahan secara efektif, transparan, efisien, kinerja yang baik, pengendalian internal secara profesional. Selain itu, upaya untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat ditandai dengan kemampuan pemerintah untuk

memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah diakses, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

2. Pasaman Barat Yang Agamais

Agamais mengandung makna yang mendalam, terkait pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Pernyataan visi ini merupakan wujud impian masyarakat untuk menikmati tatanan kehidupan yang berlandaskan ajaran agama. Kabupaten Pasaman Barat memiliki masyarakat yang heterogen, terdiri dari tiga suku besar, yakni Minangkabau, Mandahiling, dan Jawa. Demikian juga dengan keyakinan. Sebagian besar masyarakat beragam Islam, dan sebagian lagi menganut agama Kristiani.

Masyarakat yang agamais diwujudkan dengan sebuah tatanan kehidupan di mana setiap masyarakat dapat menjalankan ajaran agamanya dengan bebas, tanpa intervensi dari pihak lain. Dengan demikian, terwujud sebuah masyarakat yang heterogen dan memiliki toleransi yang tinggi. Upaya mewujudkan masyarakat yang agamais juga didukung dengan penerapan norma-norma dan nilai-nilai adat istiadat serta kearifan lokal yang pada akhirnya mendukung terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

Memang, tidak mudah untuk menentukan ukuran tercapainya masyarakat yang agamais. Namun, ada beberapa indikator yang dapat mencerminkan tercapainya tujuan tersebut. Misalnya adalah masyarakat di mana rumah ibadah diramaikan oleh para pengikutnya, terdapatnya lembaga-lembaga keagamaan dan tokoh-tokoh agama yang aktif mensyiaran ajaran agama, dan terdapatnya event-event keagamaan dengan partisipasi dan antusiasme yang tinggi dari masyarakat.

Sementara itu, masyarakat yang aman dan tenteram bisa terwujud dari rendahnya tingkat kejahatan di masyarakat, rendahnya praktik-praktek yang merugikan seperti penyakit masyarakat, kebiasaan gotong royong, tingginya filantropi masyarakat, dan terciptanya masyarakat dengan ketahanan sosial budaya yang tinggi.

3. Pasaman Barat Yang Maju dan Sejahtera

Pernyataan visi untuk menciptakan masyarakat yang maju dan sejahtera mengandung implikasi yang sangat luas. Masyarakat maju dan sejahtera merupakan

impian semua orang. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasaman Barat periode 2005-2025. Tahun 2021-2026 merupakan periode terakhir untuk pencapaian visi jangka panjang Kabupaten Pasaman Barat tersebut. Oleh sebab itu, Bupati dan Wakil Bupati terpilih mengusung visi yang sama untuk pembangunan Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Masyarakat Maju dan Sejahtera tercermin dari banyak indikator, seperti tingkat kemiskinan yang rendah, penurunan ketimpangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah, peningkatan pendapatan masyarakat, pembangunan yang merata dan inklusif (berkeadilan dan dinikmati oleh semua orang), kemudahan akses untuk mendapatkan pelayanan publik, pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan sumber daya alam, dan sebagainya. Namun demikian, investasi dan komitmen yang diperlukan untuk mewujudkan impian ini juga paling besar.

Untuk mewujudkan Visi pembangunan daerah maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif.
2. Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing.
3. Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif.

Berdasarkan visi, misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera			
No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel Terwujudnya Birokrasi yang efisien dan efektif

	yang profesional dan inovatif		Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
2	Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing	Mewujudkan Masyarakat Yang Agamais dan Berbudaya, Aman Tentram, dan Tangguh	Masyarakat Yang Agamais dan berbudaya Masyarakat yang rukun dan berkeadilan Masyarakat Yang Tangguh Menghadapi Bencana
		Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas
3.	Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif	Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	Pengentasan kemiskinan Perluasan Kesempatan Kerja Penguatan industri berbasis komoditas unggulan lokal

Sumber: RPJMD Kab. Pasaman Barat 2021–2026

2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sudah menyusun dokumen perjanjian kinerja tahun 2023. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 2
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Misi 1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif		
Tujuan 1.1	Penerapan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	B (62)

1.1.1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan daerah	WTP
		Nilai SAKIP	B (68)
		Level Maturitas SPIP	2,48
		Tingkat Kapabilitas APIP	3
1.1.2	Terwujudnya Birokrasi yang efisien dan efektif	Indeks Profesionalitas ASN	75
		Indeks Maturitas SPBE	2,25
1.1.3	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	85
Misi 2	Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing		
Tujuan 2.1	Mewujudkan Masyarakat Yang Agamais dan Berbudaya, Aman Tentram, dan Tangguh	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	11
2.1.1	Masyarakat Yang Agamais dan berbudaya	% Capaian PASBAR Mengaji	65
		Adat, seni dan budaya yang dilestarikan	7
2.1.2	Masyarakat yang rukun dan berkeadilan	Indeks Pembangunan Gender	91,03
		Predikat Kabupaten Peduli HAM	SP
		Indeks Pemberdayaan Gender	64,44
		Predikat Kabupaten Layak Anak	Nindya (720)
2.1.3	Masyarakat Yang Tangguh Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	1,60

Tujuan 2.2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indek Pembangunan Manusia	70,07
2.2.1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah (th)	8,48
		Rata-rata harapan lama sekolah (th)	14,50
2.2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (th)	67,97
		Prevalensi Stunting (%)	17,00
2.2.3	Terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,22%
Misi 3	Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif		
Tujuan 3.1	Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	Indeks Gini	0,225
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,26
3.1.1	Pengentasan kemiskinan	% Penduduk Miskin	6,96
3.1.2	Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,19
3.1.3	Penguatan industri berbasis komoditas unggulan lokal	PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta)	41,53

2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebis sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2. 3

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Program	Anggaran
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp. 659.941.546.971
2.	Program pengelolaan pendidikan	Rp. 119.786.906.808

3.	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Rp.	36.651.450
4.	Program pengendalian perizinan pendidikan	Rp.	30.610.000
5.	Program pengembangan kesenian tradisional	Rp.	570.615.000
6.	Program pembinaan sejarah	Rp.	14.182.000
7.	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Rp.	11.269.500
8.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rp.	106.352.633.699
9.	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rp.	6.701.276.901
10.	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Rp.	486.540.000
11.	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Rp.	156.479.700
12.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Rp.	301.821.500
13.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Rp.	4.528.070.231
14.	Program penyelenggaraan jalan	Rp.	58.139.714.662
15.	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp.	3.617.166.000
16.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Rp.	2.596.949.000
17.	Program penataan bangunan gedung	Rp.	6.922.622.250
18.	Program pengembangan jasa konstruksi	Rp.	330.686.500
19.	Program penyelenggaraan penataan ruang	Rp.	1.870.506.064
20.	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Rp.	40.314.000
21.	Program pengembangan perumahan	Rp.	27.091.254.400
22.	Program kawasan permukiman	Rp.	1.153.347.500
23.	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Rp.	1.756.608.000
24.	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp.	488.826.124

25.	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Rp.	25.050.000
26.	Program pengelolaan izin lokasi	Rp.	22.866.000
27.	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Rp.	96.173.500
28.	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Rp.	35.973.000
29.	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Rp.	407.060.000
30.	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Rp.	251.615.200
31.	Program penanggulangan bencana	Rp.	2.229.593.500
32.	Program pemberdayaan sosial	Rp.	588.733.450
33.	Program rehabilitasi sosial	Rp.	538.992.300
34.	Program perlindungan dan jaminan sosial	Rp.	1.306.567.300
35.	Program penanganan bencana	Rp.	127.336.950
36.	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Rp.	137.130.944
37.	Program penempatan tenaga kerja	Rp.	252.160.540
38.	Program hubungan industrial	Rp.	52.378.000
39.	Program pengembangan kawasan transmigrasi	Rp.	11.555.000
40.	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Rp.	656.389.750
41.	Program perlindungan perempuan	Rp.	42.750.000
42.	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Rp.	44.735.200
43.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	97.405.000
44.	Program perlindungan khusus anak	Rp.	169.075.640
45.	Program pengendalian penduduk	Rp.	288.027.000
46.	Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	2.567.205.750
47.	Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.	2.004.600.000

48.	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Rp.	35.089.250
49.	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Rp.	632.358.550
50.	Program penanganan kerawanan pangan	Rp.	108.593.200
51.	Program pengawasan keamanan pangan	Rp.	51.650.000
52.	Program perencanaan lingkungan hidup	Rp.	451.139.400
53.	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Rp.	99.439.200
54.	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Rp.	324.280.000
55.	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.	125.250.000
56.	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Rp.	24.520.000
57.	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Rp.	24.601.900
58.	Program pengelolaan persampahan	Rp.	1.589.555.934
59.	Program pendaftaran penduduk	Rp.	1.586.830.700
60.	Program pencatatan sipil	Rp.	251.254.400
61.	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Rp.	339.898.000
62.	Program penataan desa	Rp.	74.000.000
63.	Program administrasi pemerintahan desa	Rp.	574.613.200
64.	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Rp.	1.385.758.157
65.	Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.	2.304.263.000
66.	Program pengelolaan pelayaran	Rp.	110.413.000
67.	Program pengelolaan penerbangan	Rp.	186.097.240
68.	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Rp.	1.014.701.950

69.	Program pengelolaan aplikasi informatika	Rp.	1.601.957.600
70.	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Rp.	16.699.450
71.	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Rp.	63.062.000
72.	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Rp.	406.770.000
73.	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Rp.	82.150.000
74.	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.	417.879.900
75.	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Rp.	5.000.000
76.	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Rp.	225.000.450
77.	Program pengembangan ekspor	Rp.	30.000.000
78.	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Rp.	50.000.000
79.	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Rp.	400.008.780
80.	Program perencanaan dan pembangunan industri	Rp.	289.750.000
81.	Program pengendalian izin usaha industri	Rp.	49.750.000
82.	Program pengembangan iklim penanaman modal	Rp.	75.860.000
83.	Program pelayanan penanaman modal	Rp.	190.958.600
84.	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Rp.	512.881.500
85.	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Rp.	15.998.900
86.	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Rp.	756.647.250
87.	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Rp.	9.130.271.602
88.	Program pembinaan perpustakaan	Rp.	251.367.250
89.	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Rp.	9.855.000
90.	Program pengelolaan arsip	Rp.	289.292.700
91.	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Rp.	48.176.000

92.	Program pengelolaan perikanan tangkap	Rp.	1.124.494.100
93.	Program pengelolaan perikanan budidaya	Rp.	1.178.119.709
94.	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Rp.	100.500.000
95.	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Rp.	256.151.000
96.	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rp.	820.203.350
97.	Program pemasaran pariwisata	Rp.	390.305.650
98.	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Rp.	44.960.000
99.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Rp.	1.998.756.280
100.	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Rp.	9.907.631.502
101.	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Rp.	465.400.108
102.	Program penyuluhan pertanian	Rp.	2.077.464.630
103.	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Rp.	19.676.500
104.	Program perizinan usaha pertanian	Rp.	12.355.500
105.	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Rp.	4.531.924.810
106.	Program perekonomian dan pembangunan	Rp.	1.095.528.050
107.	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rp.	12.677.044.600
108.	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Rp.	710.229.150
109.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Rp.	958.328.100
110.	Program penelitian dan pengembangan daerah	Rp.	295.959.900
111.	Program pengelolaan keuangan daerah	Rp.	120.049.321.228
112.	Program pengelolaan barang milik daerah	Rp.	544.173.600
113.	Program pengelolaan pendapatan daerah	Rp.	2.192.753.512

114. Program kepegawaian daerah	Rp.	1.836.553.475
115. Program pengembangan sumber daya manusia	Rp.	1.477.397.580
116. Program penyelenggaraan pengawasan	Rp.	954.468.550
117. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Rp.	270.551.500
118. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp.	122.060.000
119. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp.	446.287.150
120. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp.	730.596.300
121. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp.	38.625.000
122. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp.	50.425.000
123. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Rp.	146.772.000
124. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Rp.	1.664.048.774
125. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Rp.	95.417.000
126. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Rp.	485.337.000
127. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Rp.	625.598.000
Total	Rp.	1.217.687.887.173

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODELOGI PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2023 adalah perwujudan kewajiban Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lainnya, dalam rangka pencapaian misi pemerintah daerah yang terukur dan sesuai dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kab. Pasaman Barat Tahun 2022 dapat disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023.

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama dilakukan dalam rangka melihat keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah daerah selama tahun 2023 terhadap pencapaian RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026. Evaluasi capaian indikator kinerja utama dilakukan terhadap 16 indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Evaluasi Indikator kinerja utama dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai dengan kriteria penilaian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan interval penilaian sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Interval Penilaian

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber data : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, data diolah

Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pasaman serta menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 didasarkan pada indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023. Dalam dokumen tersebut disajikan 4 tujuan dengan 12 sasaran untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Pencapaian kinerja dilihat dari capaian target 4 tujuan dan 12 sasaran. Hasil pengukuran 4 tujuan dan 12 sasaran diuraikan pada tabel 3.2.

Tabel 3. 2

Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori
Misi 1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif					
Tujuan 1.1	Penerapan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	B (62)	CC (54,63)	88,11	Tinggi
1.1.1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP	B (68)	B (62,70)	92,21	Sangat Tinggi
		Level Maturitas SPIP	2,48	3,132	126,29	Sangat Tinggi
		Tingkat Kapabilitas APIP	3	2,9	96,67	Sangat Tinggi
1.1.2	Terwujudnya Birokrasi yang efisien dan efektif	Indeks Profesionalitas ASN	75	62,32	83,09	Tinggi

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori
		Indeks Maturitas SPBE	2,25	2,82	125,33	Sangat Tinggi
1.1.3	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	85	81,66	96,07	Sangat Tinggi
Misi 2	Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing					
Tujuan 2.1	Mewujudkan Masyarakat Yang Agamais dan Berbudaya, Aman Tentram, dan Tangguh	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	11	17,55	40,45	Sangat Rendah
2.1.1	Masyarakat Yang Agamais dan berbudaya	% Capaian PASBAR Mengaji	65	40,91	62,94	Rendah
		Adat, seni dan budaya yang dilestarikan	7	11	157,14	Sangat Tinggi
2.1.2	Masyarakat yang rukun dan berkeadilan	Indeks Pembangunan Gender	91,03	90,17	99,06	Sangat Tinggi
		Predikat Kabupaten Peduli HAM	SP (Sangat Peduli)	P (Peduli)	100	Sangat Tinggi
		Indeks Pemberdayaan Gender	64,44	61,05	94,74	Sangat Tinggi
		Predikat Kabupaten Layak Anak	Nindya (720)	Madya (605)	84,03	Tinggi
2.1.3	Masyarakat Yang Tangguh Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	1.60	0,30	18,75	Sangat Rendah

No	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori
Tujuan 2.2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indek Pembangunan Manusia	70,07	72,03	102,80	Sangat Tinggi
2.2.1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah (th)	8,48	8,81	103,89	Sangat Tinggi
		Rata-rata harapan lama sekolah (th)	14,50	13,70	94,48	Sangat Tinggi
2.2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1) Usia Harapan Hidup (th)	67,97	72,44	106,58	Sangat Tinggi
		2) Prevalensi Stunting (%)	17,00	14,30	115,88	Sangat Tinggi
2.2.3	Terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas	3) Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,22%	1,50	77,05	Tinggi
Misi 3	Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif					
Tujuan 3.1	Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	Indeks Gini	0,255	0,238	106,67	Sangat Tinggi
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,26	4,33	101,64	Sangat Tinggi
3.1.1	Pengentasan kemiskinan	% Penduduk Miskin	6,96	6,92	100,57	Sangat Tinggi
3.1.2	Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,19	6,01	56,56	Rendah
3.1.3	Penguatan industri berbasis komoditas unggulan lokal	PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta)	41,53	43,43	104,58	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja					93,91	Sangat Tinggi

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan kinerja yang sangat baik pada tahun 2023. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata pencapaian 93,91% untuk 4 tujuan dan 12 sasaran strategis, yang termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Capaian tertinggi diraih pada sasaran strategis Masyarakat yang agamis dan berbudaya dengan capaian 157,14%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Namun, terdapat satu sasaran strategis yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu Masyarakat Yang Tangguh Menghadapi Bencana yang hanya mencapai 18,75%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan realisasi, dan perlu dikaji lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya.

Untuk meningkatkan kinerja di masa depan, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu melakukan beberapa langkah, antara lain :

1. Melakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pencapaian pada beberapa sasaran strategis.
2. Meninjau kembali strategi dan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis.
3. Meningkatkan anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.
4. Memperkuat koordinasi antar instansi terkait.
5. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di masa depan akan semakin optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

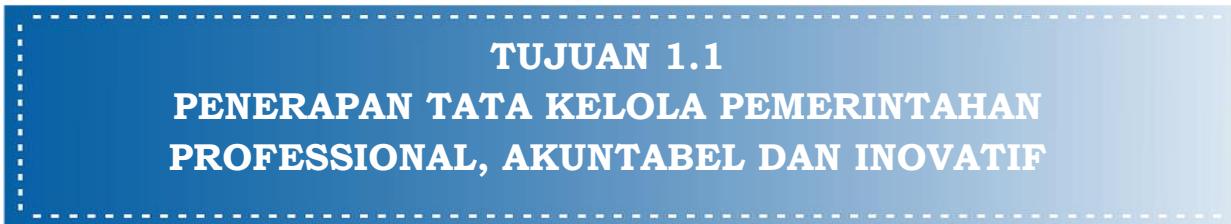
3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian ini akan disajikan analisis pencapaian indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perubahan perjanjian kinerja tahun 2023 dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026.



MISI 1

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN INOVATIF



TUJUAN 1.1

PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN PROFESSIONAL, AKUNTABEL DAN INOVATIF

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 menempatkan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif menjadi salah satu misi untuk mewujudkan visi “Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif adalah dengan mempercepat penerapan reformasi birokrasi agar dapat merubah perilaku birokrasi yang lebih profesional, bertanggung jawab, efisien dan efektif, serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Reformasi birokrasi saat ini diharapkan mampu merubah pola pikir dan perilaku birokrasi yang sudah ada. Meskipun perkembangannya kurang signifikan, namun perubahan dari tahun ke tahun selalu ada. Perubahan tersebut ditandai dengan kenaikan indeks reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Penerapan reformasi birokrasi selama kurang lebih 5 tahun yang dimulai dari tahun 2019 belum memberi hasil yang optimal, meskipun Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus mengalami peningkatan.

Untuk mewujudkan peningkatan tata pemerintah yang baik, bersih dan profesional maka Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan meningkatnya penerapan reformasi birokrasi menjadi tujuan yang harus dicapai. Ketercapaian tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Penetapan indeks reformasi birokrasi didasarkan pada hasil evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penilaian penerapan reformasi birokrasi tahun 2023 mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran Terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional.

Nilai indeks reformasi birokrasi tertinggi adalah 100 dengan prediket istimewa. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan target indeks reformasi birokrasi yang selalu meningkat setiap tahunnya agar bisa mencapai nilai/prediket tertinggi (istimewa) tersebut. Dengan mempertimbangkan nilai indeks reformasi birokrasi tahun 2020 sebesar 49,19, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan indeks reformasi birokrasi tercapai 72 (kategori baik/BB) di tahun terakhir RPJMD tahun 2021-2026. Untuk tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan 62. Penetapan target Indeks Reformasi Birokrasi mengacu pada target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Jika dibandingkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi di tahun 2022 (56,20), target tahun 2023 ditetapkan meningkat sebesar 5,8. Pencapaian tujuan meningkatnya penerapan reformasi birokrasi tergambar pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3
Capaian Indikator Kinerja

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	CC (62)	CC (54,63)	88,11%

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi target 62, terealisir 54,63 dengan tingkat capaian sebesar 88,11% termasuk kategori tinggi. Realisasi indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 diukur berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/583/RB.06/2024 Tanggal 1 Februari 2024 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Indeks Reformasi Birokrasi 54,63 termasuk kategori CC. Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat disajikan pada tabel 3.4.

Tabel 3. 4
Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

No.	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	48,36
B	RB Tematik	20	6,27
C	Indeks RB	120	54,63
			CC

Sumber data : KemenPANRB

Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 menurun dibandingkan dengan indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022, pencapaian tujuan misi 1 belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan di tahun 2023.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 dengan tahun 2022 dan 2012 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.5.

Tabel 3. 5
Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja
Indeks Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi			% Capaian Kinerja			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	54,63	56,20	49,19	88,11	96,89	92,81	72

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 menurun sebesar 1,99 dibandingkan dengan realisasi Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 dengan capaian kinerja 88,11% menurun sebesar 8,78% dari tahun sebelumnya. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2021, Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 meningkat sebesar 5,44.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan perolehan Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2026 adalah 72 kategori BB (Baik) atau meningkat 17,37 dari Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023. Jika dilihat dari realisasi di tahun 2023, target tahun 2026 dinilai dapat dicapai.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 88,11% termasuk kategori tinggi. Pencapaian ini didukung oleh upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat antara lain :

1. Menyesuaikan *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2023-2026 dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional.
2. Memastikan untuk melaksanakan seluruh kegiatan utama dan memenuhi persyaratan penilaian dari K/L pengampu indikator.
3. Memastikan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi betul-betul mengungkit capaian indikator kegiatan utama.
4. Mengoptimalkan peran dalam RB Tematik.
5. Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam penerapan reformasi birokrasi di Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :

1. Belum terdapat penetapan kegiatan utama dan rencana aksi pembangunan RB General.

2. Secara umum capaian pelaksanaan kebijakan sudah cukup, meski masih ada 3 indikator masih kurang, 4 indikator belum dilakukan pengukuran yaitu Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, Indeks Kualitas Kebijakan, Tingkat implementasi arsitektur SPBE dan Survei Kepuasan Masyarakat.
3. Pada capaian sasaran strategis yang masih perlu penguatan adalah implementasi digitalisasi pemerintahan, integritas yang masih rentan dan kepuasan masyarakat yang tidak diperoleh datanya
4. Stategi pelaksanaan RB tematik belum baik karena renaksi yang disusun belum kolaboratif dengan unit dan instansi lain.

Pada tahun 2023, Kabupaten Pasaman Barat meraih nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 54,63 dengan kategori CC. Hal ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan target nasional yaitu >60 dengan kategori B, Pasbar masih belum mencapai target. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun terjadi perbaikan, reformasi birokrasi di Pasbar perlu terus ditingkatkan agar setara dengan rata-rata nasional.

Tabel 3. 6

Perbandingan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Barat

No	Instansi Pemda	RB General	RB Tematik	Index RB	Predikat 2023	Predikat 2022
1	Kota Payakumbuh	66,20	11,07	77,27	BB	B
2	Provinsi Sumatera Barat	67,84	8,41	76,25	BB	B
3	Kota Bukit Tinggi	66,27	9,09	75,36	BB	B
4	Kab. Solok	61,88	10,93	72,81	BB	B
5	Kota Padang	63,81	8,44	72,25	BB	BB
6	Kab. Pesisir Selatan	62,92	8,64	71,56	BB	CC
7	Kab. Agam	59,48	10,50	69,98	B	CC
8	Kab. Tanah Datar	59,79	6,93	66,72	B	B
9	Kota Padang Panjang	61,72	4,82	66,54	B	CC
10	Kab. Padang Pariaman	54,58	10,46	65,04	B	B
11	Kota Sawahlunto	57,5	6,85	64,35	B	CC

12	Kota Solok	60,11	3,86	63,97	B	B
13	Kota Pariaman	53,96	9,43	63,39	B	B
14	Kab. Solok Selatan	55,16	7,26	62,42	B	C
15	Kab. Lima Puluh Kota	47,53	10,97	58,50	CC	CC
16	Kab. Dharmasraya	55,35	1,93	57,28	CC	CC
17	Kab. Pasaman	53,15	3,13	56,28	CC	CC
18	Kab. Pasaman Barat	48,36	6,27	54,63	CC	CC
19	Kab. Kepulauan Mentawai	47,84	6,54	54,38	CC	CC
20	Kab. Sijunjung	51,73	2,19	53,92	CC	CC

Sumber data : KemenPANRB

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasaman Barat masih di bawah provinsi, yaitu 76,25 dengan kategori BB. Meskipun demikian, capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat berada di jalur yang tepat untuk mengejar ketertinggalan dan bersaing dengan daerah lain di provinsi Sumatera Barat.

Dalam skala kabupaten/kota se-Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat menempati peringkat ke-17 dari 19 daerah. Peringkat ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa daerah lain yang memiliki kinerja reformasi birokrasi yang lebih baik. Meskipun demikian, dibandingkan dengan peringkat terendah, yaitu Kabupaten Sijunjung dengan nilai 53,92 kategori CC, Pasaman Barat menunjukkan keunggulan dan potensi untuk terus berkembang.

Meskipun belum mencapai target nasional dan rata-rata provinsi, Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan tren positif dalam hal reformasi birokrasi. Hal ini dibuktikan dengan komitmen yang kuat, kolaborasi yang baik, dan langkah-langkah perbaikan yang tepat, Pasaman Barat berpotensi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 adalah 54,63 kategori CC menunjukkan pencapaian 75,87% dari target tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat membutuhkan kenaikan 17,37 agar target 72 di tahun 2026 dapat tercapai. Mempertimbangkan

perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai Indeks Reformasi Birokrasi 72 di tahun 2026.

Untuk peningkatan implementasi reformasi birokrasi di masa yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengupayakan untuk :

1. Menetapkan Indikator Kegiatan Utama Mandatory sesuai dengan target nasional;
2. Memastikan indikator output atas Rencana Aksi relevan dan cukup menggabarkan sasaran yang ingin diwujudkan;
3. Menyusun Arsitektur SPBE dalam SIA;
4. Menetapkan Unit Kerja sebagai *pilot project* ZI dan mengusulkan hasil Pembangunan unit kerja Zona Integritas kepada TPN Kemenpan RB; dan
5. Melaporkan Hasil pelaksanaan SKM yang telah dilakukan di tahun 2023.

Untuk meningkatkan penerapan reformasi birokrasi telah ditetapkan 3 sasaran strategis Reformasi Birokrasi. Hal ini sesuai dengan sasaran yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian 3 sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1.1.1 TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel sebagai landasan utama dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi. Hal ini ditandai dengan penetapan sasaran strategis terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel sebagai prioritas utama.

Birokrasi yang bersih didefinisikan sebagai birokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, kewajaran, transparansi, dan profesionalisme dalam setiap aspek pekerjaan, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, birokrasi yang akuntabel adalah birokrasi yang berorientasi pada hasil (*outcomes oriented*) dan memperhatikan pemanfaatan sumber daya secara efisien dan profesional. Akuntabilitas kinerja menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Perubahan mindset dan culture-set menjadi fokus utama dalam transformasi birokrasi. Dari yang sebelumnya berorientasi pada output (kerja) menjadi berorientasi pada outcome (kinerja). Hal ini menjadi titik berat dalam penerapan konsep akuntabilitas kinerja.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggunakan empat indikator utama :

1. Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan
2. Nilai evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
3. Level maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
4. Tingkat kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)

Keempat indikator tersebut menjadi alat ukur yang objektif untuk melihat sejauh mana penerapan birokrasi yang bersih dan akuntabel telah diimplementasikan di Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan komitmen yang kuat dan upaya berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat optimis dapat mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan good governance di daerah. Pencapaian sasaran strategis Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel disajikan pada tabel 3.7.

Tabel 3. 7

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100
Nilai SAKIP	B (68)	B (62,70)	92,21
Level Maturitas SPIP	2,48	3,132	126,29
Tingkat Kapabilitas APIP	3	2,9	96,67
Rata-rata Capaian			103,79

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Berdasarkan tabel 3.7, capaian kinerja untuk Sasaran Strategis Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, menunjukkan hasil yang Sangat Tinggi. Hal ini dapat dilihat dari :

1. **Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah** : Indikator ini mengukur opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah. Target dan realisasi

pada tahun 2023 sama-sama **WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)**, menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar dan bebas dari material *misstatement*.

2. **Nilai SAKIP** : Indikator ini mengukur nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Target nilai SAKIP pada tahun 2023 adalah **B (68)**, sedangkan realisasinya adalah **B (62,70)**. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja instansi pemerintah masih perlu ditingkatkan untuk mencapai nilai SAKIP yang optimal.
3. **Level Maturitas SPIP** : Indikator ini mengukur tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Target Level Maturitas SPIP pada tahun 2023 adalah **2,35**, sedangkan realisasinya adalah **3,132**. Capaian ini menunjukkan bahwa Level Maturitas SPIP telah meningkat dan berada pada level **Terdefinisi**.
4. **Tingkat Kapabilitas APIP** : Indikator ini mengukur Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Target tingkat kapabilitas APIP pada tahun 2023 adalah **3**, sedangkan realisasinya adalah **2,8**. Capaian ini menunjukkan bahwa Tingkat Kapabilitas APIP masih perlu ditingkatkan untuk mencapai level yang optimal.
5. **Rata-rata Capaian** : Rata-rata capaian keempat indikator kinerja di atas adalah **103,79%**.

Secara keseluruhan, capaian kinerja untuk Sasaran Strategis 1.1.1 pada tahun 2023 cukup baik, dengan rata-rata capaian di atas 100%. Namun, masih ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti nilai SAKIP dan tingkat kapabilitas APIP. Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah sebagai berikut :

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan keuangan ini harus disusun dengan menggunakan sistem tata kelola yang baik dan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Laporan keuangan dikatakan wajar jika bebas dari salah saji material. Penilaian kewajaran laporan keuangan diberikan oleh auditor independen dalam bentuk laporan audit.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor independen pemerintah memberikan penilaian atas kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. BPK memberikan 4 jenis opini, yaitu :

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)
4. Tidak Wajar (TW)

Opini WTP merupakan penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan yang menjamin bahwa informasi keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Capaian opini WTP bagi Pemerintah Daerah merupakan bukti perwujudan keberhasilan atas tata kelola keuangan yang baik dan salah satu kriteria yang menunjukkan kinerja keuangan sebagai penentu kelayakan daerah dalam menerima dana insentif daerah.

Sejak tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah memperoleh Opini WTP. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan untuk mempertahankan opini WTP.

Realisasi Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah tahun 2023 belum dapat ditetapkan karena masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam laporan ini adalah data tahun 2022 dengan realisasi WTP dan capaian indikator 100%. Pencapaian indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah tergambar pada tabel 3.8.

Tabel 3. 8

Capaian Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 adalah WTP. Capaian opini WTP ini sudah diperoleh sejak tahun 2016 dan dipertahankan hingga tahun 2023. Capaian indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan tahun 2022-2023 menunjukkan nilai yang sama yaitu 100%, yang berarti realisasi tercapai sesuai target. Target tahun 2026 adalah mempertahankan opini WTP. Dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2016-2023 dan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam pengelolaan keuangan

sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, target tahun 2026 optimis dapat dicapai dengan strategi yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2023.

Perbandingan realisasi indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan tahun 2022 dengan tahun 2021 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.9.

Tabel 3. 9

**Perbandingan Realisasi Tahun 2022-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja
Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah**

No	Indikator Kinerja	Realisasi			% Capaian Kinerja			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	WTP

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah dari tahun 2021 sampai 2023, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berhasil meraih opini WTP dari BPK. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel.

Pada tahun 2021-2023, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berhasil meraih opini WTP dengan capaian kinerja 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dalam RPJMD telah tercapai dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan kinerja yang baik dan konsisten dalam pengelolaan keuangan dengan mempertahankan opini WTP atas LKD selama tiga tahun berturut-turut. Upaya-upaya yang telah dilakukan perlu terus ditingkatkan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang lebih baik dan akuntabel di masa mendatang.

Perolehan Opini WTP tidak lepas dari upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah dan semua OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk mempertahankan Opini BPK terhadap LKD tahun 2023. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian opini WTP di antaranya :

1. Komitmen kuat dari Bupati dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
3. Penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara OPD terkait dalam penyusunan LKD.
5. Pendampingan dari BPK dalam proses penyusunan LKD.

Adapun faktor penghambat untuk mempertahankan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah adalah :

1. **Keterbatasan sumber daya manusia :**
 - a. Kurangnya jumlah auditor internal yang kompeten.
 - b. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pengelola keuangan OPD.
 - c. Mutasi dan rotasi pegawai yang sering terjadi.
2. **Kelemahan sistem dan prosedur :**
 - a. Sistem informasi keuangan daerah yang belum terintegrasi secara keseluruhan.
 - b. SOP pengelolaan keuangan yang belum optimal.
 - c. Sistem pengendalian intern pemerintah daerah yang masih perlu diperkuat.
3. **Koordinasi dan komunikasi yang belum optimal :**
 - a. Kurangnya koordinasi antar OPD terkait dalam penyusunan LKD.
 - b. Keterlambatan penyampaian data dan informasi keuangan dari OPD.
 - c. Kurangnya komunikasi dengan BPK dalam proses penyusunan LKD.

Pada tahun 2023, Kabupaten Pasaman Barat berhasil meraih opini WTP dari BPK. Realisasi opini WTP secara nasional pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 (49,62%). Dari 19 Kab/Kota di Sumatera Barat, 18 Kab/Kota berhasil meraih opini WTP pada tahun 2023. Kabupaten Pasaman Barat memiliki tingkat realisasi opini WTP yang sama dengan rata-rata nasional dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pasaman Barat termasuk dalam kategori kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan opini BPK.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan dengan meraih opini WTP dari BPK pada tahun 2023. Prestasi ini menunjukkan komitmen dan upaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, bahkan lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat.

RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026 menargetkan opini WTP atas LKD setiap tahun. Pada tahun 2023, Kabupaten Pasaman Barat berhasil meraih opini WTP dari BPK. Capaian kinerja tahun 2023 menunjukkan bahwa target RPJMD telah tercapai dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan komitmen dan kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan dengan mencapai target RPJMD 2021-2026 terkait opini BPK atas LKD. Prestasi ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan di Kabupaten Pasaman Barat.

Upaya untuk mempertahankan opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa depan. Beberapa upaya yang akan dilakukan di antaranya :

1. Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyampaian data dan informasi keuangan.
2. Memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah daerah.
3. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
4. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu.

Dalam pelaksanaan upaya untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah, maka diakomodir anggaran tahun 2023 pada BKAD sebesar Rp 139.298.999.557,- (seratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) pada pelaksanaan program dan kegiatan dengan realisasi Rp 133.217.079.232,- (seratus tiga puluh tiga miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) atau 95,63%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp.6.081.920.325,- (enam miliar delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus dua pulu lima rupiah) atau 4,37%. Program yang dilaksanakan tersebut sudah menunjang capaian indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah, capaian indikator kinerja ini sebesar 100% lebih tinggi dari realisasi anggarannya sebesar 82,59%, yang berarti kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

2. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Nilai SAKIP merupakan salah satu indikator kinerja utama untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Meningkatkan nilai SAKIP akan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas birokrasi pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Nilai SAKIP menjadi tolok ukur penting bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas. Dengan memahami indikator dan bobot penilaian, instansi pemerintah dapat lebih fokus dalam melakukan perbaikan dan mencapai hasil yang optimal.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas birokrasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini dibuktikan dengan penetapan target nilai SAKIP yang selalu meningkat setiap tahunnya.

Nilai evaluasi SAKIP tertinggi adalah kategori AA dengan rentang nilai >90 – 100. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat secara realistik menetapkan target nilai yang bertahap dan terukur. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan nilai evaluasi SAKIP tahun 2022 sebesar 62,24 dan peningkatan nilai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2021). Target nilai SAKIP Kabupaten Pasaman Barat 2023 Kategori B (nilai 68) dan diakhir RPJMD 2026 Kategori BB (nilai 78). Target tersebut diharapkan dapat dicapai secara bertahap dan berkelanjutan. Pencapaian indikator kinerja Nilai SAKIP tergambar pada tabel 3.10.

Tabel 3. 10
Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP	B (68)	B (62,70)	92,21

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah mengumumkan nilai evaluasi SAKIP tahun 2023 melalui surat Nomor : B/196/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023. Berikut rincian nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Pasaman Barat :

Tabel 3. 11
Rincian Nilai Evaluasi SAKIP tahun 2023

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	23,25	23,32
b. Pengukuran Kinerja	30	13,69	13,73
c. Pelaporan Kinerja	15	9,90	9,96
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,40	15,69
Nilai Hasil Evaluasi	100	62,24	62,70
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sumber data : KemenPANRB

Meskipun target nilai B (68) tidak tercapai, tingkat capaian 92,20% menunjukkan kinerja yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya

keras Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas birokrasi.

Evaluasi SAKIP tahun 2023 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menunjukkan komitmen dan upaya keras dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas birokrasi. Meskipun target nilai SAKIP tidak tercapai, namun tingkat capaian yang tinggi menunjukkan kinerja yang sangat baik. Diharapkan dengan kerja sama dan komitmen semua pihak, nilai SAKIP Kabupaten Pasaman Barat dapat terus meningkat di tahun-tahun berikutnya.

Perbandingan realisasi indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP tahun 2021-2023 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.12.

Tabel 3. 12

**Perbandingan Realisasi Tahun 2022-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja
Nilai SAKIP**

No	Indikator Kinerja	Realisasi			% Capaian Kinerja			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	Nilai SAKIP	B (62,70)	B (62,24)	B (60,82)	92,21	95,75	98,09	BB (78)

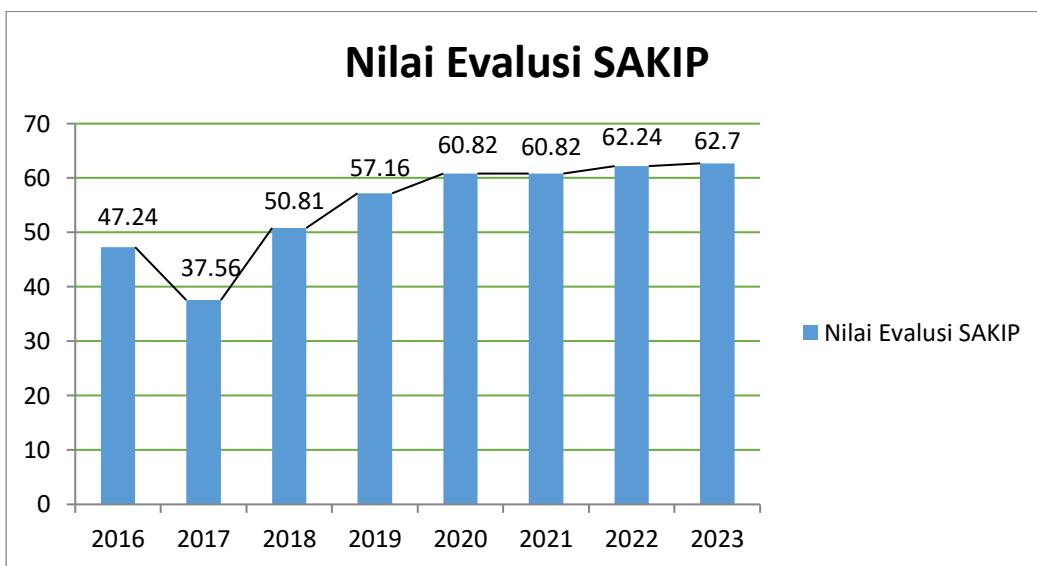
Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai SAKIP Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021-2023. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja dan akuntabilitas birokrasi. Namun, capaian kinerja tahun 2023 mengalami penurunan dari 2021 dan 2022. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk dilakukan identifikasi dan perbaikan pada area yang memiliki kinerja rendah.

Target nilai SAKIP tahun 2026 cukup tinggi, yaitu BB (78). Untuk mencapai target tersebut, diperlukan upaya yang signifikan dari semua pihak terkait. Kesenjangan antara realisasi nilai SAKIP 2023 dengan target 2026 cukup besar, yaitu 15,30. Upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP perlu dilakukan secara berkelanjutan dan fokus pada area-area yang memiliki kesenjangan terbesar. Dengan komitmen dan kerja sama semua pihak, diharapkan target nilai SAKIP BB (78) dapat dicapai pada tahun 2026.

Perkembangan nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016-2023 disajikan pada gambar 3.1

Gambar 3. 1
Perkembangan nilai evaluasi SAKIP tahun 2016-2023



Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selalu berupaya untuk meningkatkan implementasi SAKIP secara berkelanjutan. Upaya tersebut antara lain :

1. Melakukan reviu atas keselarasan antara kegiatan, program serta sasaran strategis untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja.
2. Melakukan penyempurnaan atas penjabaran kinerja yang telah ada dengan memastikan kesesuaianya dengan PermenPANRB Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja.

Hambatan yang masih dihadapi untuk meningkatkan implementasi SAKIP di tahun 2023 adalah :

1. *Cascading* kinerja yang disusun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
2. Komitmen dan pemahaman pimpinan dalam hal menerapkan SAKIP masih belum merata.
3. Keterlibatan Bappelitbangda dan Inspektorat dalam meningkatkan implementasi SAKIP masih belum maksimal.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan nilai SAKIP antara lain :

1. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen *cascading* kinerja baik di level Pemda maupun PD untuk memastikan kualitas penjenjangan kinerja dari level tertinggi

- hingga terendah dapat berorientasi hasil sesuai dengan levelnya dengan memperhatikan *logical framework* dan *critical success factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Proses reviu dan perbaikan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan setiap PD dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh setiap PD telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*) dan memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan memnuhi unsur cukup dalam mengawal kinerja;
 3. Memanfaatkan hasil perbaikan *cascading* kinerja untuk memilah program dan kegiatan apa saja yang tidak relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai dan berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja organisasi;
 4. Mengoptimalkan aplikasi e-sakip sebagai alat untuk monitoring pencapaian kinerja Bupati dan setiap PD sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja lainnya;
 5. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN;
 6. Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja pada Pemda dan perangkat daerah mengacu pada PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
 7. Menginformasikan Laporan Kinerja baik dari level Pemda maupun PD dalam website kabupaten sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada publik;

8. Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal menggambarkan kekurangan dan mampu memberikan solusi guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD;
9. Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi; dan
10. Menyusun kebijakan *reward and punishment* dengan memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga dapat menjadi penyemangat setiap PD untuk mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut secara berkelanjutan dan konsisten, dengan komitmen dan dukungan dari semua pihak, diharapkan nilai SAKIP Kabupaten Pasaman Barat dapat meningkat secara signifikan dan mencapai target RPJMD 2021-2026.

3. Level Maturitas SPIP

Maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP yang dimuat dalam PP No. 60 Tahun 2008 merujuk pada konsep pengendalian internal yang dikemukakan oleh *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO) terdiri dari lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Tahapan yang harus dilalui dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern di Instansi Pemerintah, ada lima tahapan yaitu pemahaman (*knowing*), pemetaan (*mapping*), infrastruktur (*norming*), internalisasi (*forming*), serta pengembangan berkelanjutan (*performing*).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat secara berkala melakukan Evaluasi Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada K/L/D.

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP telah mengacu pada peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 dan memutuskan nilai akhir atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Level maturitas penyelenggaraan SPIP yang merupakan hasil penilaian dari BPKP merupakan tingkat kematangan atau kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Terdapat enam tingkatan level maturitas, yakni :

Gambar 3. 2
Level maturitas SPIP

Level	Tingkatan
0	Belum ada
1	Rintisan
2	Berkembang
3	Terdefinisi
4	Terkelola dan terstruktur
5	Optimum

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan Level Maturitas SPIP tercapai level $>2,6$ (Tingkatan Terdefinisikan) di tahun terakhir RPJMD tahun 2021-2026. Untuk tahun 2023, level maturitas SPIP ditargetkan 2,48. Penetapan level maturitas SPIP mengacu pada target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Jika dibandingkan dengan level maturitas SPIP di tahun 2022 (3,132), target tahun 2023 sudah tercapai namun masih perlu mempertahankannya. Pencapaian Indikator Kinerja level maturitas SPIP tergambar pada tabel 3.13.

Tabel 3. 13
Capaian Indikator Kinerja level maturitas SPIP

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Level Maturitas SPIP	2,48	3,132	126,29%

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Indikator kinerja Level Maturitas SPIP target 2,48, terealisir 3,132 dengan tingkat capaian sebesar 126,29% termasuk kategori keberhasilan sangat tinggi. Realisasi indikator kinerja Level Maturitas SPIP tahun 2023 diukur berdasarkan surat

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor : PE.09.03/S-822/D3/04/2023 Tanggal 28 Desember 2023 Hal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023.

Level maturitas SPIP tahun 2023 sama dengan level maturitas SPIP tahun 2022, pencapaian ini melebihi target yang ditetapkan di tahun 2023. Level maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berada pada level 3 “**Terdefinisi**” dan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebesar 3,132.

Tabel 3. 14

**Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja
Level Maturitas SPIP**

No	Indikator Kinerja	Realisasi			% Capaian Kinerja			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	Level Maturitas SPIP	3,132	3,132	2,83	126,29%	133,28%	134,12%	>2,6

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi Level Maturitas SPIP tahun 2023 adalah 3,132 sama dengan realisasi tahun 2022 dan naik 0,302 dari realisasi tahun 2021 . Sedangkan capaian indikator Level Maturitas SPIP tahun 2023 turun 6,99% dari tahun 2022 dan turun 7,83% dari tahun 2021. Upaya untuk meningkatkan Level Maturitas SPIP perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan komitmen dan kerja sama semua pihak diharapkan realisasi yang sudah melebihi target akhir RPJMD tahun 2026 dapat dipertahankan.

Tahun 2023 penilaian atas penyelenggaraan SPIP terintegrasi mengalami peningkatan dimana berdasarkan hasil penilaian mandiri atas 31 OPD sampel, seluruhnya sudah berada pada level 3. Sedangkan berdasarkan hasil penjaminan kualitas dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) dengan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebesar 3,132 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,106 serta skor IEPK sebesar 2,832.

Upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan Level maturitas SPIP menuju level 3 adalah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan peran PPID OPD dalam pendokumentasian data ke dalam

website resmi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Diskominfo, sehingga data-data maupun produk hukum yang bersifat umum tersimpan dan dapat diakses secara terbuka.

2. Menyusun SOP secara lengkap dan terperinci sesuai dengan peraturan terbaru, khususnya dalam prosedur pendokumentasian.
3. Pegawai OPD yang menganggap kelengkapan dokumentasi sebagai formalitas saja harus mulai mengubah *mindset* tersebut. Karena, dengan adanya dokumentasi segala sesuatunya lebih terinventarisir. Pendokumentasian dilakukan dengan 2 tipe yaitu *hardcopy* dan *softcopy*.
4. Pemerintah pusat memberikan suatu penghargaan bagi pemerintah daerah yang berhasil meraih Level Maturitas SPIP yang telah ditargetkan untuk meningkatkan komitmen OPD terhadap penerapan SPI di lingkungan kerjanya masing-masing.
5. Pemerintah pusat membuat kebijakan yang menghubungkan antara level maturitas SPIP dan opini laporan keuangan. Misalnya, pemerintah daerah wajib memiliki level maturitas minimal level 3 sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan opini WTP.

Berdasarkan perbandingan capaian indikator, Provinsi Sumatera Barat memiliki keterkaitan dengan capaian indikator Kabupaten Pasaman Barat. Keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah juga dipengaruhi oleh adanya keselaran pengawasan pembangunan di daerah yaitu Provinsi dan Nasional.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan Kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3. 15

Perbandingan Realisasi Level Maturitas SPIP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	CAPAIAN LEVEL
1.	Provinsi Sumatera Barat	3,166
2.	Kabupaten Agam	3,098
3.	Kabupaten Dharmasraya	2,994
4.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2,915
5.	Kabupaten Lima Puluh Kota	3,236
6.	Kabupaten Padang Pariaman	2,869

7.	Kabupaten Pasaman	2,899
8.	Kabupaten Pasaman Barat	3,132
9.	Kabupaten Pesisir Selatan	2,962
10.	Kabupaten Sijunjung	3,453
11.	Kabupaten Solok	3,123
12.	Kabupaten Solok Selatan	2,939
13.	Kabupaten Tanah Datar	2,482
14.	Kota Padang	3,090
15.	Kota Bukittinggi	3,163
16.	Kota Padang Panjang	3,032
17.	Kota Pariaman	2,540
18.	Kota Payakumbuh	2,982
19.	Kota Sawah Lunto	2,982
20.	Kota Solok	3,099

Sumber data : Badan Pusat Statistik 2024

Dari data penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah di atas, maka dapat dilihat bahwa dari 20 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 9 (Sembilan) Kabupaten/ Kota sudah berada pada level 3 termasuk Kabupaten Pasaman Barat. Untuk 11 (sebelas) Kabupaten/ Kota masih berada pada level 2.

Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan Level Maturitas SPIP menuju level 3 adalah sebagai berikut :

1. Belum efektifnya peran Satgas SPIP pada masing-masing OPD.
2. Masih kurangnya Pemahaman *Counterpart* yang biasanya adalah Kasubag Program dan Perencanaan terhadap bahan-bahan yang harus disiapkan untuk penilaian maturitas SPIP menuju level 3.
3. Pendokumentasian yang tidak tertib sehingga saat dilakukan penilaian maturitas SPIP OPD tidak didukung dengan dokumen yang sesuai.
4. Komitmen pimpinan dan perangkat daerah masih rendah tentang pemahaman bahwa SPI merupakan hal penting sebagaimana amanat mengenai SPIP sudah tercantum dalam PP Nomor 60 Tahun 2008.

Beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian oleh OPD pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam meyelenggarakan SPIP terintegrasi antara lain :

1. Masih terdapat indikator kinerja program yang belum sepenuhnya dibuat secara tepat dan terukur oleh OPD, serta indikator kinerja kegiatan yang belum dapat

- diukur, belum spesifik, belum jelas dan belum relavan atau belum membuat indicator kinerja yang mempunyai unsur yang SMART (*Specific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound*) serta target yang ditetapkan belum memperhatikan perencanaan lebih tinggi.
2. Belum ada kebijakan tentang pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah.
 3. Belum memiliki kebijakan antikorupsi yang meliputi struktur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan korupsi serta standar perilaku antikorupsi.
 4. Belum melakukan analisis dan *assessment* terhadap rencana tindak pengendalian yang berfungsi untuk memitigasi risiko korupsi.
 5. Belum memiliki sistem antikorupsi mencakup cegah, deteksi, respon antara lain dalam bentuk penetapan *whistle blower system*, sistem manajemen anti suap, pengendalian gratifikasi, dan sistem respon kejadian korupsi yang terdeteksi.

4. Tingkat Kapabilitas APIP

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP.

Ruang lingkup Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP meliputi :

1. Mekanisme Penilaian :
 - a. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dilakukan oleh APIP.
 - b. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP dilakukan oleh BPKP.
 - c. Monitoring Tindak Lanjut dilakukan oleh BPKP dan APIP.
2. Komponen Penilaian terdiri dari :

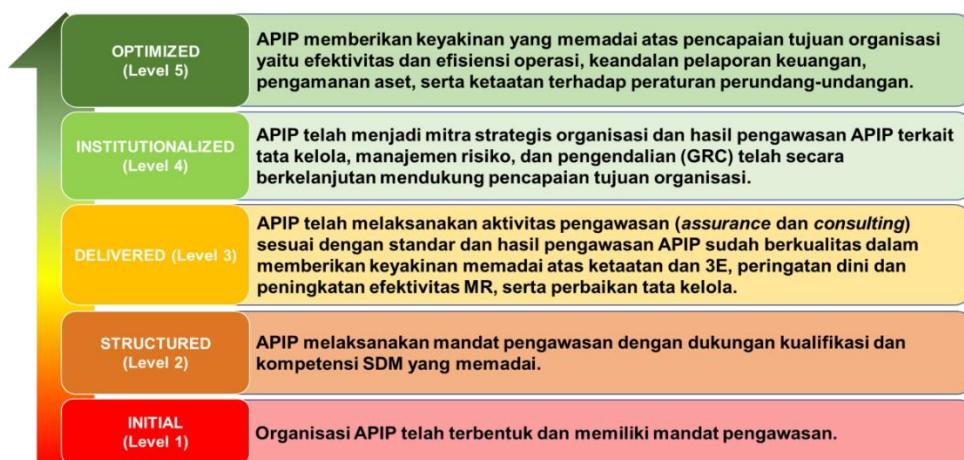
- a. Dukungan Pengawasan (*Enabler*).
 - b. Aktivitas Pengawasan (*Delivery*).
 - c. Kualitas Pengawasan (*Result*).
3. Aspek Penilaian terdiri dari :
 - a. Kebijakan.
 - b. Implementasi.
 - c. Hasil.
 4. Periode Penilaian :
 - a. Penilaian Mandiri dilakukan secara periodik setiap tahun oleh seluruh APIP.
 - b. Evaluasi atas hasil PM kapabilitas APIP dan penetapan level kapabilitas APIP oleh BPKP.

BPKP melakukan penilaian kapabilitas dan efektivitas peran APIP harus tetap diarahkan untuk menjawab mandat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, bahwa perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan tugas dan fungsi instansi pemerintah; (b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam tugas dan fungsi instansi pemerintah; (c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d. Level 5 dengan penjelasan karakteristik sebagai berikut :

Gambar 3. 3

Level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d. Level 5



Hasil *Quality Assurance* Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat atas perbaikan peningkatan level kapabilitas Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat menyimpulkan bahwa Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 berada pada level “**2 Plus**” dengan uraian sebagai berikut :

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat secara berkala melakukan Evaluasi Penilaian Mandiri atas Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Kegiatan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan cara menganalisis bukti-bukti pendukung/evidence, observasi serta wawancara dengan personil di lingkungan internal Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dan para stakeholder baik internal maupun eksternal untuk meyakini implementasi infrastruktur dan pemenuhan 28 topik pada enam elemen peningkatan kapabilitas APIP.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan Tingkat Kapabilitas APIP tercapai 3 (*Delivered*) di tahun terakhir RPJMD tahun 2021-2026. Untuk tahun 2023, Tingkat Kapabilitas APIP ditargetkan 3. Penetapan Tingkat Kapabilitas APIP mengacu pada target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Jika dibandingkan dengan Tingkat Kapabilitas APIP di tahun 2022 (2,8), target tahun 2023 ditetapkan meningkat sebesar 0,2. Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP tergambar pada tabel 3.16.

Tabel 3. 16
Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kapabilitas APIP	3	2,9	96,67%

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP target 3, terealisir 2,9 dengan tingkat capaian sebesar 96,67% termasuk kategori sangat tinggi. Realisasi indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP tahun 2023 diukur berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor: PE.09.03/S-822/D3/04/2023 Tanggal 28 Desember 2023 Hal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023.

Tabel 3. 17
**Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Tingkat
Kapabilitas APIP**

No	Indikator Kinerja	Realisasi			% Capaian Kinerja			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	Tingkat Kapabilitas APIP	2,9	2,8	2,5	96,67%	93,33%	83,33%	3

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi Tingkat Kapabilitas APIP menunjukkan tren positif dari tahun 2021-2023. Realisasi tahun 2023 meningkat sebesar 0,1 dari tahun 2022 dan meningkat sebesar 0,4 dari tahun 2021. Begitu juga capaian indikator Tingkat Kapabilitas APIP juga menunjukkan tren positif dari tahun 2021-2023.

Upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan level kapabilitas APIP menuju level 3 adalah sebagai berikut :

1. Menambah formasi jabatan fungsional APIP sehingga tercukupi kebutuhan SDM sesuai Anjab dan ABK.
2. Melakukan penilaian mandiri (*Self Assessment*) yang berkualitas oleh APIP untuk menghindari deviasi yang tinggi atas evaluasi penilaian mandiri oleh BPKP.
3. Pendokumentasian dilakukan dengan 2 tipe yaitu *hardcopy* dan *softcopy* terhadap data-data pendukung penilaian Kapabilitas APIP per elemen.
4. Meningkatkan peran APIP yang efektif dengan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematian, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan tugas dan fungsi instansi pemerintah; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam tugas dan fungsi instansi pemerintah; memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Perbandingan realisasi kinerja atas kapabilitas APIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dibandingkan dengan Kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 3. 18

**Perbandingan Realisasi Tingkat Kapabilitas APIP Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2023 dengan Provisi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota
se-Provinsi Sumatera Barat**

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	CAPAIAN LEVEL
1.	Provinsi Sumatera Barat	3
2.	Kabupaten Agam	3
3.	Kabupaten Dharamasraya	3
4.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2
5.	Kabupaten Lima Puluh Kota	3
6.	Kabupaten Padang Pariaman	2
7.	Kabupaten Pasaman	2
8.	Kabupaten Pasaman Barat	2
9.	Kabupaten Pesisir Selatan	3
10.	Kabupaten Sijunjung	2
11.	Kabupaten Solok	3
12.	Kabupaten Solok Selatan	2
13.	Kabupaten Tanah Datar	2
14.	Kota Padang	3
15.	Kota Bukittinggi	3
16.	Kota Padang Panjang	3
17.	Kota Pariaman	3
18.	Kota Payakumbuh	2
19.	Kota Sawahlunto	2
20.	Kota Solok	3

Sumber data : Bada Pusat Statistik 2024

Dari data hasil Penilaian Kapabilitas APIP pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat di atas, dapat dilihat dari 20 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 11 Kabupaten/Kota berada pada level 3 dan 9 Kabupaten/Kota berada pada level 2, yang mana Kabupaten Pasaman Barat masih berada pada level 2. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Inspektorat dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan Kapabilitas APIP sesuai target yaitu level 3.

Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan Level Kapabilitas APIP menuju level 3 adalah sebagai :

1. Belum terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia APIP sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat;
2. Masih kurangnya pemahaman tentang dokumen pendukung penilaian *Quality Assurance* terhadap 24 *Key Process Area* dari 6 elemen untuk penilaian kapabilitas APIP menuju level 3;
3. Pendokumentasian administrasi yang tidak tertib sehingga saat dilakukan penilaian kapabilitas APIP tidak didukung dengan dokumen yang sesuai tiap elemen; dan
4. Komitmen pimpinan dan perangkat daerah dianggap masih rendah tentang pemahaman bahwa peran APIP yang efektif merupakan hal penting sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 60 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, mengamanatkan perwujudan peran APIP yang efektif yaitu :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Efektifitas peran APIP tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai. Dalam RPJMN 2015-2019 diharapkan APIP memiliki kapabilitas di level 3. Berdasarkan *self assessment* atas kapabilitasnya, APIP akan memperoleh gambaran tentang *areas of improvement* yang akan dijadikan sebagai dasar oleh APIP dalam menyusun rencana tindak peningkatan kapabilitas APIP menuju APIP yang efektif. Pedoman teknis ini merupakan upaya BPKP sebagai Pembina SPIP dan jabatan Auditor untuk memfasilitasi APIP dalam rangka meningkatkan kapabilitasnya secara mandiri (*self improvement*) agar terwujud APIP yang efektif. Pedoman ini mencakup konsep dan metodologi kapabilitas APIP serta langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh APIP untuk mencapai kapabilitas level 3 (*Integrated*).

SASARAN STRATEGIS 1.1.2

TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG EFISIEN DAN EFEKTIF

Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang optimal. Hal ini dikarenakan birokrasi yang baik akan mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien, sehingga dapat menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas dan berdaya guna bagi masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur, baik dalam hal kompetensi, profesionalisme, maupun sikap pengabdian. Selain itu, sistem, proses, dan prosedur kerja birokrasi juga perlu dibenahi agar menjadi lebih transparan, efektif, efisien, dan terukur. Penerapan *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat menjadi solusi untuk mendukung terciptanya birokrasi yang modern, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Peningkatan profesionalitas ASN dapat dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan, seperti seminar, workshop, dan diklat. Selain itu, perlu diciptakan sistem *reward and punishment* yang adil dan transparan untuk mendorong kinerja ASN yang optimal.

Penerapan SPBE juga perlu terus diperluas dan dikembangkan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta membangun budaya digital di lingkungan birokrasi.

Dengan komitmen dan kerja keras dari semua pihak, diharapkan sasaran terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien dapat tercapai. Hal ini akan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Untuk mengukur sasaran terwujudnya birokrasi yang efisien dan efektif, digunakan dua indikator utama, yaitu Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Maturitas SPBE.

Indeks Profesionalitas ASN mengukur kualitas SDM Aparatur berdasarkan lima dimensi: kinerja, kompetensi, integritas, motivasi, dan orientasi pelayanan. Data untuk menghitung indeks ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil Evaluasi Kinerja

Pegawai (EKP), Uji Kompetensi ASN, Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dan Survei Kepuasan Masyarakat.

Indeks Maturitas SPBE mengukur tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan lima dimensi: tata kelola, manajemen, infrastruktur, layanan, dan keamanan. Data untuk menghitung indeks ini diperoleh dari Asesmen Maturitas SPBE, Laporan Kinerja SPBE, dan Data Statistik Layanan SPBE.

Analisis terhadap kedua indikator ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi birokrasi. Nilai Indeks Profesionalitas ASN yang tinggi menunjukkan bahwa ASN memiliki kinerja, kompetensi, integritas, motivasi, dan orientasi pelayanan yang baik. Sementara itu, nilai Indeks Maturitas SPBE yang tinggi menunjukkan bahwa SPBE telah diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat bagi birokrasi dan masyarakat.

Kedua indikator ini saling terkait dan saling mendukung. Indeks Profesionalitas ASN menunjukkan kualitas SDM Aparatur yang merupakan faktor penting dalam penerapan SPBE. Indeks Maturitas SPBE menunjukkan tingkat kematangan penerapan SPBE yang akan berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi birokrasi. Gambaran capaian kedua indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.19.

Tabel 3. 19

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Efisien Dan Efektif

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas ASN	75	62,32	83,09
Indeks Maturitas SPBE	2,25	2,82	125,33
Rata-rata Capaian			104,21

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2023. Hal ini dibuktikan peningkatan yang signifikan dengan uraian indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indeks Profesionalitas ASN: Realisasi 62,32 masih di bawah target 75, namun capaian 83,09% menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme ASN terus meningkat.

2. Indeks Maturitas SPBE: Realisasi 2,82 melampaui target 2,25, dengan capaian 125,33%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di instansi terkait semakin matang.

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien adalah 104,21%, yang termasuk dalam kategori keberhasilan memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan birokrasi yang efektif dan efisien telah berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang memuaskan. Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang bersih dan efisien adalah sebagai berikut :

1. Indeks Profesionalitas ASN

Profesionalitas adalah kualitas, sikap, derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki suatu profesi untuk dapat melakukan tugas-tugas pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah. Untuk melihat apakah ASN yang dimiliki sudah dapat dikategorikan profesional, maka dilakukan pengukuran indeks profesionalitas dengan mempedomani Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Penetapan Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan indikator kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019.

Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 ditargetkan 75. Penetapan target mengacu pada target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan mempertimbangkan indeks profesionalitas ASN tahun 2021 dan sampel perhitungan ASN yang lebih banyak dari tahun sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan Indeks Profesionalitas ASN tercapai 80 di tahun terakhir RPJMD tahun 2021-2026. Untuk tahun 2023, Indeks Profesionalitas ASN ditargetkan 75. Penetapan Indeks Profesionalitas ASN mengacu pada target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Jika dibandingkan dengan Indeks Profesionalitas ASN di

tahun 2022 (67,07), target tahun 2023 ditetapkan meningkat sebesar 7,93. Pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN tergambar pada tabel 3.20.

Tabel 3. 20
Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas ASN	75	62,32	83,09%

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Analisis Indeks Profesionalitas ASN dari perhitungan empat dimensi, yaitu Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin hanya mencapai 62,32% dengan kategori Rendah. Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 tercapai 83,09%. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalitas ASN di Kabupaten Pasaman Barat masih perlu dioptimalkan.

Upaya peningkatan Indeks Profesionalitas ASN dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, pengembangan kompetensi ASN perlu dioptimalkan. Hal ini dapat dilakukan melalui OPD, baik melalui pelatihan klasikal maupun non-klasikal, sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Kedua, diperlukan perhatian serius dari Pemerintah Daerah melalui OPD untuk pengembangan Kompetensi ASN guna menunjang capaian organisasi dan meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN. Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN akan berdampak pada peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Penting untuk dilakukan analisis yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya Indeks Profesionalitas ASN. Dari hasil analisis tersebut, dapat dirumuskan kebijakan dan program pengembangan ASN yang terarah dan berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas program pengembangan ASN.

Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN merupakan kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Pasaman Barat. Dengan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, diharapkan Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Pasaman Barat dapat terus meningkat di masa depan.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN tahun 2021-2023 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.21.

Tabel 3. 21
Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja
Indeks Profesionalitas ASN

No	Indikator Kinerja	Realisasi			% Capaian Kinerja			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	Indeks Profesionalitas ASN	62,32	67,07	67,13	83,09	95,81	95,90	80

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan tren negatif dari tahun 2021-2023. realisasi Indeks Profesionalitas ASN turun 4,75 dari tahun 2022 dan turun 4,81 dari tahun 2021. Begitu juga dengan capaian kinerja, juga menunjukkan tren negatif dari tahun 2021-2023.

Namun, untuk mencapai target Indeks Profesionalitas ASN tahun 2026, diperlukan upaya peningkatan yang lebih maksimal. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan pengembangan kompetensi ASN melalui pelatihan dan pendidikan, memperkuat sistem merit dalam pengelolaan ASN, meningkatkan disiplin dan kinerja ASN, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN. Upaya-upaya tersebut meliputi :

a) Pengembangan Kompetensi :

- Melaksanakan pelatihan dan pendidikan bagi ASN untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional.
- Memberikan kesempatan kepada ASN untuk mengikuti program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh instansi lain.
- Mendorong ASN untuk mengikuti seminar, workshop, dan konferensi terkait bidang tugasnya.

b) Penguatan Sistem Merit :

- Menerapkan sistem merit dalam pengelolaan ASN, mulai dari proses rekrutmen, pengembangan, hingga promosi jabatan.
- Memberikan penghargaan kepada ASN yang berprestasi.
- Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada ASN yang belum mencapai standar kinerja.

- c) Peningkatan Disiplin dan Kinerja :
 - a. Menerapkan aturan disiplin yang tegas bagi ASN.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja ASN secara berkala.
 - c. Memberikan reward and punishment kepada ASN berdasarkan kinerjanya.
- d) Monitoring dan Evaluasi :
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pengembangan ASN.
 - b. Mengukur dan menganalisis dampak program pengembangan ASN terhadap IP ASN.
 - c. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi untuk bahan perbaikan program pengembangan ASN.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat masih dihadapkan dengan beberapa hambatan dalam meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN. Hambatan-hambatan tersebut antara lain :

1. Anggaran :
 - a. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan ASN, seperti diklat, pelatihan, dan seminar.
 - b. Kurangnya anggaran untuk membangun infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung pengembangan ASN.
2. Tenaga Pengajar dan Pelatih :
 - a. Kekurangan tenaga pengajar dan pelatih yang kompeten di bidang pengembangan ASN.
 - b. Kualitas tenaga pengajar dan pelatih yang belum merata.
3. Kesadaran ASN :
 - a. Kurangnya kesadaran dari beberapa ASN untuk meningkatkan profesionalitasnya.
 - b. Masih ada ASN yang belum memiliki motivasi untuk mengikuti diklat, pelatihan, dan seminar.
4. Infrastruktur dan Sarana Prasarana :
 - a. Kurangnya infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung pengembangan ASN, seperti ruang kelas, peralatan pelatihan, dan akses internet.
5. Sistem Merit :
 - a. Sistem merit yang belum diterapkan secara optimal dalam pengelolaan ASN.

- b. Penilaian kinerja ASN yang belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi.
- 6. Budaya Kerja :
 - a. Budaya kerja yang belum sepenuhnya mendukung profesionalitas ASN.
 - b. Masih ada ASN yang belum memiliki disiplin kerja yang tinggi.
- 7. Koordinasi dan Integrasi :
 - a. Kurangnya koordinasi dan integrasi antar OPD terkait dalam pengembangan ASN.
 - b. Kurangnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan instansi lain dalam pengembangan ASN.
- 8. Kelemahan Internal BKPSDM :
 - a. Belum optimalnya pendistribusian dan penataan sumber daya manusia aparatur.
 - b. Belum terbangunnya integrasi sistem informasi database kepegawaian secara menyeluruh.
 - c. Belum terbangunnya merit system yang ideal.

Berdasarkan analisis dan kesimpulan Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023, berikut adalah beberapa upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat ke depannya untuk meningkatkannya Indeks Profesionalitas ASN tersebut :

- 1. Meningkatkan Anggaran untuk Pengembangan ASN :
 - a. Alokasikan anggaran yang lebih besar untuk pengembangan ASN dalam APBD.
 - b. Mencari sumber pendanaan alternatif dari luar APBD, seperti kerjasama dengan pihak swasta atau lembaga donor.
- 2. Membangun Infrastruktur dan Sarana Prasarana :
 - a. Membangun ruang kelas dan pelatihan yang memadai.
 - b. Melengkapi peralatan pelatihan dan akses internet.
 - c. Membangun sistem informasi database kepegawaian yang terintegrasi.
- 3. Meningkatkan Kualitas Tenaga Pengajar dan Pelatih :
 - a. Mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi tenaga pengajar dan pelatih.
 - b. Mengundang pakar dan profesional sebagai narasumber dalam pelatihan.
 - c. Memberikan penghargaan kepada tenaga pengajar dan pelatih yang berprestasi.

4. Meningkatkan Kesadaran ASN :
 - a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya profesionalitas ASN.
 - b. Memberikan penghargaan kepada ASN yang berprestasi.
 - c. Menciptakan budaya kerja yang mendukung profesionalitas ASN.
5. Menerapkan Sistem Merit secara Optimal :
 - a. Melakukan penilaian kinerja ASN secara objektif dan transparan.
 - b. Memberikan reward dan punishment berdasarkan kinerja ASN.
 - c. Mempromosikan ASN yang berprestasi.
6. Membangun Budaya Kerja yang Mendukung :
 - a. Menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan integritas kepada ASN.
 - b. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan inovatif.
 - c. Memberikan penghargaan kepada ASN yang memiliki budaya kerja yang baik.
7. Meningkatkan Koordinasi dan Integrasi :
 - a. Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait dalam pengembangan ASN.
 - b. Membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk pengelolaan ASN.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program pengembangan ASN.

Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu melakukan upaya-upaya yang terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas ASN. Dengan demikian, target Indeks Profesionalitas ASN dalam RPJMD 2021-2026 dapat dicapai dan terwujudlah pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Pasaman Barat.

2. Indeks Maturitas SPBE

Era digital membawa revolusi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan. Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) membuka peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*.

SPBE didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada berbagai pihak, baik internal (instansi pemerintah dan ASN) maupun eksternal (pelaku bisnis, masyarakat, dan

pihak lainnya). Penerapan SPBE diharapkan mampu mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.

Lebih dari sekadar alat, SPBE merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi. Penerapan SPBE mendukung area perubahan tata laksana dengan menghadirkan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur. Hal ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mengukur keberhasilan implementasi SPBE, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengeluarkan Indeks SPBE. Indeks ini menjadi tolok ukur bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan maturitas SPBE mereka.

Indeks Maturitas SPBE tidak hanya sekadar angka, tetapi mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Penilaianya didasarkan pada beberapa indikator yang dikelompokkan ke dalam tiga domain utama: Kebijakan dan Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, dan Infrastruktur SPBE.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan Indeks Maturitas SPBE tercapai level $>2,6$ di tahun terakhir RPJMD tahun 2021-2026. Untuk tahun 2023, Indeks Maturitas SPBE ditargetkan 2,25. Penetapan Indeks Maturitas SPBE mengacu pada target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Jika dibandingkan dengan Indeks Maturitas SPBE di tahun 2022 (2,36), target tahun 2023 ditetapkan sudah tercapai. Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Maturitas SPBE tergambar pada tabel 3.22.

Tabel 3. 22
Capaian Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Maturitas SPBE	2,25	2,82	125,33

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Tahun 2023 menjadi tahun gemilang bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Target Indeks Maturitas SPBE yang ditetapkan pada level 2,25 berhasil dilampaui dengan capaian fantastis 125,33%, atau setara dengan nilai 2,82. Capaian ini menempatkan Pasaman Barat pada kategori "Baik" dan mencerminkan keberhasilan luar biasa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Realisasi Indeks Maturitas SPBE tahun 2023 diukur berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024. Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen kuat dari seluruh pihak, mulai dari Bupati dan Wakil Bupati, perangkat daerah, hingga aparatur sipil negara.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Maturitas SPBE tahun 2021-2023 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.23.

Tabel 3. 23

Perbandingan Realisasi Tahun 2022-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Indeks Maturitas SPBE

No	Indikator Kinerja	Realisasi			% Capaian Kinerja			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	Indeks Maturitas SPBE	2,82	2,36	2,18	125,33	111,84	110,10	2,6

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Tahun 2023 menjadi tahun gemilang bagi Kabupaten Pasaman Barat dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indeks Maturitas SPBE yang dicapai pada tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2022, dan telah mencapai target di tahun 2026.

Indeks Maturitas SPBE mencapai 2,82, jauh di atas target 2,25. Capaian ini menunjukkan peningkatan 0,46 dibandingkan tahun 2022 dan peningkatan 0,64 dari tahun 2021. Hal ini mencerminkan komitmen dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan maturitas SPBE. Tingkat capaian 125,33% menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Tren capaian tahun 2021-2023 menunjukkan tren positif dengan peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan komitmen berkelanjutan dan upaya terarah dalam meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Indeks Maturitas SPBE ditargetkan mencapai 2,6 di tahun 2026. Dengan capaian 2,82 di tahun 2023, bahwa target 2026 telah tercapai dan melebihi target. Hal

ini akan membawa Kabupaten Pasaman Barat menuju era tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mewujudkan pelayanan publik yang prima bagi seluruh masyarakat.

Beberapa faktor kunci yang mendorong keberhasilan ini antara lain :

1. Komitmen dan Kepemimpinan: Dukungan penuh dan kepemimpinan visioner dari Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat menjadi landasan fundamental dalam mewujudkan SPBE yang optimal.
2. Upaya Implementasi Terarah: Implementasi SPBE di Pasaman Barat dilakukan secara terarah dan terukur dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.
3. Peningkatan Infrastruktur dan Kapasitas: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus meningkatkan kualitas infrastruktur TIK dan memperkuat kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan dan pengembangan.

Langkah selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tidak akan berhenti di sini. Komitmen untuk terus meningkatkan maturitas SPBE akan terus digaungkan. Upaya-upaya strategis seperti memperkuat komitmen dan kepemimpinan, meningkatkan kualitas infrastruktur TIK, dan mengembangkan kapasitas SDM aparatur akan terus dilakukan. Perluasan cakupan layanan SPBE dan inovasi dalam pengembangan SPBE juga menjadi fokus utama.

Dengan kerja keras dan kolaborasi semua pihak, optimisme tinggi terpancar bahwa Indeks Maturitas SPBE Kabupaten Pasaman Barat akan terus menanjak dan mencapai level yang optimal. Hal ini akan membawa Pasaman Barat menuju era tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mewujudkan pelayanan publik yang prima bagi seluruh masyarakat.

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Pasaman Barat masih menghadapi beberapa hambatan utama, di antaranya :

1. Keterbatasan Anggaran: Hal ini menghambat upaya untuk meningkatkan infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi, dan pelatihan SDM aparatur.
2. Kurangnya Kapasitas SDM Aparatur: Pengetahuan dan keterampilan aparatur di bidang SPBE masih perlu ditingkatkan, sehingga menghambat kelancaran implementasi SPBE.
3. Kesadaran dan Budaya Aparatur: Perlu meningkatkan kesadaran dan budaya aparatur terhadap pentingnya SPBE untuk mendorong partisipasi dan adaptasi yang optimal.

4. Koordinasi dan Integrasi Antar OPD: Koordinasi dan integrasi antar OPD dalam implementasi SPBE masih perlu diperkuat untuk mencapai kesatuan dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.
5. Ketersediaan Infrastruktur TIK: Infrastruktur TIK di beberapa daerah terpencil masih belum memadai, sehingga menghambat akses terhadap layanan SPBE bagi masyarakat di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat tahun 2023, Kabupaten Pasaman Barat berada di peringkat 12 dengan Indeks Maturitas SPBE 2,82 dan predikat Baik. Realisasi ini menunjukkan bahwa Pasaman Barat telah menunjukkan komitmen dan kerja keras dalam meningkatkan maturitas SPBE.

Tabel 3. 24

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3,75	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	4,17	Sangat Baik
3	Pemerintah Kota Padang	3,54	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Solok	3,49	Baik
5	Pemerintah Kota Solok	3,37	Baik
6	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	3,29	Baik
7	Pemerintah Kab. Tanah Datar	3,22	Baik
8	Pemerintah Kota Payakumbuh	3,17	Baik
9	Pemerintah Kota Sawahlunto	3,09	Baik
10	Pemerintah Kab. Solok Selatan	2,98	Baik
11	Pemerintah Kota Padang Panjang	2,92	Baik
12	Pemerintah Kab. Dharmasraya	2,83	Baik
13	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	2,82	Baik
14	Pemerintah Kota Pariaman	2,65	Baik
15	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	2,62	Baik
16	Pemerintah Kab. Agam	2,55	Cukup
17	Pemerintah Kota Bukittinggi	2,49	Cukup
18	Pemerintah Kab. Pasaman	2,38	Cukup
19	Pemerintah Kab. Sijunjung	2,18	Cukup
20	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	1,53	Kurang

Sumber : KemenPANRB

Dibandingkan dengan Provinsi Sumbar yang memiliki Indeks Maturitas SPBE 3,75 dan predikat Sangat Baik, Pasaman Barat masih memiliki beberapa kekurangan. Namun, dibandingkan dengan beberapa Kab/Kota lain, seperti Agam, Pasaman, Sijunjung, Kepulauan Mentawai, dan Bukittinggi, Pasaman Barat memiliki nilai Indeks Maturitas SPBE yang lebih tinggi.

Meskipun demikian, Pasaman Barat masih perlu meningkatkan Indeks Maturitas SPBE agar dapat mencapai level yang sama dengan 12 Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat.

Secara keseluruhan, Kabupaten Pasaman Barat telah menunjukkan kemajuan dalam implementasi SPBE. Dengan upaya yang berkelanjutan dan kolaborasi semua pihak, optimisme tinggi terpancar bahwa target Indeks Maturitas SPBE akan tercapai dan membawa Pasaman Barat menuju era tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mewujudkan pelayanan publik yang prima bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan analisis hambatan dan perbandingan realisasi Indeks Maturitas SPBE, berikut adalah beberapa upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat ke depannya untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran tersebut :

1. Peningkatan Komitmen dan Kepemimpinan :

- a. Memperkuat komitmen dan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dalam mendorong implementasi SPBE.
- b. Menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan SPBE di daerah.
- c. Menjadikan SPBE sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah.

2. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur :

- a. Melaksanakan pelatihan dan pengembangan aparatur secara berkelanjutan tentang SPBE.
- b. Meningkatkan literasi digital aparatur.
- c. Membangun budaya kerja yang adaptif dan inovatif dalam pemanfaatan teknologi informasi.

3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur TIK :

- a. Meningkatkan anggaran untuk pengembangan infrastruktur TIK.
- b. Membangun jaringan internet yang stabil dan berkecepatan tinggi di seluruh wilayah Pasaman Barat.

- c. Menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai untuk mendukung implementasi SPBE.

4. Perluasan Cakupan Layanan SPBE :

- a. Mengembangkan aplikasi dan layanan online yang bermanfaat bagi masyarakat.
- b. Membentuk Mal Pelayanan Publik untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik.
- c. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang layanan SPBE kepada masyarakat.

5. Peningkatan Inovasi dan Pengembangan SPBE :

- a. Mendorong inovasi dan pengembangan SPBE melalui berbagai program dan kegiatan.
- b. Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan SPBE.
- c. Menerapkan best practices dalam implementasi SPBE.

6. Penguatan Koordinasi dan Integrasi Antar OPD :

- a. Memperkuat koordinasi dan integrasi antar OPD dalam implementasi SPBE.
- b. Membangun sistem dan mekanisme yang efektif untuk pertukaran data dan informasi antar OPD.
- c. Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antar OPD dalam pengembangan layanan SPBE.

7. Pemanfaatan Data dan Informasi :

- a. Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif.
- b. Membangun sistem data dan informasi yang terintegrasi dan mudah diakses.
- c. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam analisis data dan pengambilan keputusan berbasis data.

8. Pengukuran dan Evaluasi :

- a. Melakukan pengukuran dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi SPBE.
- b. Memanfaatkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan implementasi SPBE.
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam implementasi SPBE.

SASARAN STRATEGIS 1.1.3

TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini diwujudkan dengan penetapan sasaran "Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas". Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur negara kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan Reformasi Birokrasi yang digagas oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas adalah salah satu kunci untuk mencapai pembangunan nasional. IKM merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Upaya untuk meningkatkan IKM harus terus dilakukan agar birokrasi dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Sasaran "Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas" diukur dengan **indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik**. Penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat melalui Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3).

Target untuk tahun 2023 adalah rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik minimal 84,50, termasuk dalam kategori mutu pelayanan baik (B). Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pasaman Barat yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat bertanggung jawab untuk mencapai target ini.

Penetapan target ini didasarkan pada target RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, rata-rata survei kepuasan masyarakat di tahun 2023 (85), dan perbandingan dengan kondisi tahun 2022. Peningkatan target dari 2022 ke 2023 menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat. Hal ini akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengajak seluruh masyarakat untuk secara aktif memberikan masukan dan saran terhadap kualitas pelayanan publik. Masukan dan saran tersebut dapat disampaikan melalui berbagai saluran, seperti kotak saran di setiap unit pelayanan publik, website Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, dan media sosial Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Diharapkan dengan partisipasi aktif dari masyarakat, kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pasaman Barat akan terus meningkat.

Pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas disajikan pada tabel 3.25.

Tabel 3. 25

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	85	81,66	96,07

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sebesar 85. Realisasi IKM pada tahun 2023 mencapai 81,66, dengan tingkat capaian 96,07% dan kategori sangat baik.

Realisasi IKM ini diukur berdasarkan rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Unit Kerja Pelayanan Publik (UKP) di Kabupaten Pasaman Barat. Survei ini dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Pada tahun 2023, terdapat 12 OPD yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa 1 OPD memperoleh kategori sangat baik, 10 OPD memperoleh kategori baik dan 1 OPD memperoleh kategori kurang baik .

Meskipun target IKM tidak tercapai, capaian realisasi IKM menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Pasaman Barat sudah termasuk kategori sangat baik.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tabel 3. 26

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada 12 Organisasi Perangkat Daerah

No	OPD/ Unit Pelayanan Publik	IKM	Kategori
1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	83,31	B (Baik)
2	Sekretariat Daerah	79.51	B (Baik)
3	Dinas Pendidikan	75.44	C (Kurang Baik)
4	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	80.82	B (Baik)
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	79.34	B (Baik)
6	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	82.18	B (Baik)
7	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	78.89	B (Baik)
8	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	88.60	A (Sangat Baik)
9	Dinas Ketahanan Pangan	82.45	B (Baik)
10	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	80.08	B (Baik)
11	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	81.94	B (Baik)
12	Dinas Tenaga Kerja	87.37	B (Baik)
Rata-rata Kabupaten		81.66	B (Baik)

Sumber data : Bagian Organisasi

Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dengan tahun 2022 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.27.

Tabel 3. 27

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi			% Capaian Kinerja			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,66	80,80	81,67	96,07	95,62	98,39	86

Sumber data : Bagian Organisasi

Pada tahun 2023, rata-rata survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Kabupaten Pasaman Barat mencapai 81,66. Capaian ini masih di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 86.

Dibandingkan tahun 2022, realisasi IKM tahun 2023 menunjukkan tren positif dengan kenaikan 0,86%. Capaian kinerja tahun 2022-2023 juga menunjukkan tren positif dengan peningkatan 0,45%. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi IKM tahun 2023 turun 0,01. Capaian tahun 2023 juga turun 16,73% dibandingkan dengan tahun 2021.

Jumlah OPD yang melaksanakan survei IKM di tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Meskipun capaian IKM tahun 2023 masih di bawah target, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu melakukan upaya yang optimal untuk mencapai target IKM tahun 2026 yaitu 86.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengupayakan hal-hal berikut ini :

1. Menciptakan inovasi terkait pelayanan publik.
2. Pembinaan terpadu penyelenggaraan pelayanan publik terhadap unit kerja penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Mengelola pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik (SP4N-LAPOR).
4. Memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan publik.

Adapun faktor penghambat meningkatnya kualitas pelayanan publik antara lain :

1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang melaksanakan pelayanan masih belum memadai.
2. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang masih belum memadai dan representatif.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berkomitmen untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik minimal "Baik". Berikut adalah beberapa upaya yang akan dilakukan :

- 1) Memaksimalkan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat :
 - a. Meningkatkan responsivitas dan kecepatan penyelesaian pengaduan yang masuk melalui aplikasi SP4N LAPOR.
 - b. Memberikan solusi yang tepat dan memuaskan kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan.

- c. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap pengaduan untuk mengidentifikasi permasalahan dan solusi dalam pelayanan publik.
- 2) Memaksimalkan Anggaran untuk Sarana Prasarana :
- a. Memprioritaskan pengembangan sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik, seperti :
 - i) Ruang tunggu yang nyaman dan representatif.
 - ii) Peralatan dan teknologi informasi yang memadai.
 - iii) Fasilitas untuk kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan lansia.
 - b. Melakukan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana secara berkala.
- 3) Memaksimalkan Koordinasi dan Pembinaan :
- a. Memperkuat koordinasi antar unit kerja pelayanan publik untuk memastikan kesatuan dan keseragaman dalam pelayanan.
 - b. Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di unit pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
 - c. Memberikan reward and punishment kepada ASN berdasarkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik.



Untuk mewujudkan visi masyarakat yang agamais, maka misi kedua Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat periode 2021-2026 adalah membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing. Sumber daya manusia yang berkualitas tidak hanya dihitung secara

angka-angka dari jenjang pendidikan yang ditamatkan atau nilai akademis semata. Namun, keimanan dan ketaqwaan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari tidak kalah pentingnya. Pembangunan sumber daya manusia dipengaruhi pembentukan masyarakat yang beriman, bertaqwa, dan berbudaya. Maknanya adalah mengoptimalkan hal-hal baik yang selama ini sudah terjadi di masyarakat Pasaman Barat. Sebagian besar penduduk Pasaman Barat berasal dari suku Minangkabau. Seperti diketahui, budaya Minangkabau memiliki falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Dengan kata lain, nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau sebenarnya sangat relevan dengan visi untuk menciptakan masyarakat yang agamais. Agar masyarakat bisa menjalankan ajaran agamanya, maka diperlukan suatu lingkungan yang aman dan tenram, bebas dari ancaman kejahatan, tindakan diskriminatif, perlakuan yang tidak manusiawi, serta ketidakadilan. Lingkungan yang aman memberikan rasa tenang bagi masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya. Keamanan dan ketentraman juga dipengaruhi oleh ketahanan masyarakat dalam menghadapi situasi-situasi ekstrim, seperti kondisi bencana alam, bencana non-alam, konflik sosial, dan bahkan perubahan iklim. Masyarakat yang tangguh ditandai dengan minimnya korban dan kerugian ekonomis yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi ekstrem tersebut.

Pasaman Barat memiliki beberapa daerah rawan bencana. Sepanjang garis pantai Barat merupakan kawasan yang rawan terhadap bencana gempa dan tsunami. Sementara itu, sepanjang daerah aliran sungai rawan terhadap bencana banjir, dan ada sejumlah daerah yang rawan gerakan tanah. Resiko bencana dapat dikelola dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan dapat dimitigasi dengan menyiapkan infrastruktur yang memadai, dan menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh terhadap bencana. Pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dilakukan dengan menerapkan pembangunan yang memperhatikan daya dukung daya tampung dan mematuhi pemanfaatan ruang yang sudah ditetapkan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah. Selanjutnya, infrastruktur kebencanaan perlu dibenahi, mengingat luasnya rentang kendali wilayah. Sarana dan prasarana mitigasi bencana dan tanggap darurat mesti disediakan sesuai karakteristik masing-masing daerah.

Demikian juga dengan upaya rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-bencana, harus dilakukan secara terintegrasi, bukan hanya memperhatikan aspek fisik seperti infrastruktur dan perumahan yang rusak, namun juga rehabilitasi kondisi fisik, psikis,

dan emosional korban bencana. Hal yang tidak kalah penting dalam mewujudkan masyarakat yang aman dan tentram adalah bagaimana masyarakat menerapkan nilai-nilai adat dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai adat dan budaya sangat relevan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan tentram, penuh toleransi dan gotong royong. Adat dan budaya Minangkabau, Mandahiling dan Jawa memiliki keistimewaan masing-masing. Jika disatukan dalam sebuah tatanan masyarakat yang damai dan toleran, akan menjadi sebuah modal sosial yang kuat dalam pembangunan.

Mewujudkan Masyarakat Yang Agamais dan Berbudaya, Aman Tentram, dan Tangguh menjadi tujuan pertama dalam Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing yang di ukur dengan indikator Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk). Untuk tahun 2023, Angka Kriminalitas ditargetkan 11. Penetapan target tahun 2023 indikator kinerja ini mengacu pada target RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan realisasi di tahun 2022 (13,72). Jika dibandingkan dengan kondisi 2022, target tahun 2022 ditetapkan menurun 2,72 menjadi 11.

Pencapaian tujuan Mewujudkan Masyarakat Yang Agamais dan Berbudaya, Aman Tentram, dan Tangguh disajikan pada tabel 3.28.

Tabel 3. 28

Capaian indikator kinerja Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	11	17,55	40,45

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Berdasarkan tabel 3.28, target angka kriminalitas di Pasaman Barat pada tahun 2023 adalah 11 per 10.000 penduduk. Namun, realisasinya mencapai 17,55 per 10.000 penduduk, sehingga tingkat capaiannya hanya 40,45% dan termasuk kategori sangat rendah.

Ketidaktercapaian target ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dampak pandemi COVID-19, ketidakstabilan ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan, dan faktor sosial budaya lainnya.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban, seperti patroli, penyuluhan, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Namun, untuk mencapai target yang diharapkan,

diperlukan analisis yang lebih mendalam, upaya pencegahan dan penanggulangan kriminalitas yang lebih kuat, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

Pencapaian tujuan Mewujudkan Masyarakat Yang Agamais dan Berbudaya, Aman Tentram, dan Tangguh masih belum optimal. Diperlukan upaya yang lebih keras dan berkelanjutan dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di Pasaman Barat.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah tindak kriminal dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Jumlah Peristiwa Kantibmas Dan Pelanggaran di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 diuraikan pada tabel 3.29.

Tabel 3. 29

Jumlah Peristiwa Kantibmas Dan Pelanggaran di Kabupaten Pasaman Barat, 2023

Kejadian Event	Lapor Report	Selesai Done	Tunggakan Arrears
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pembunuhan	2	1	1
2. Curas	4	3	1
3. Pemerkosaan dan pembunuhan	-	-	-
4. Curat	96	109	32
5. Pencurian Biasa	177	157	56
6. Penganiayaan Berat	9	4	5
7. Penganiayaan	194	119	152
8. Kebakaran	4	5	2
9. Pengrusakan	21	13	8
10. Penghinaan Ringan	-	-	-
11. Penipuan	32	24	23
12. Curanmor	49	59	19
13. Setubuh - Pembuatan Cabul	24	13	11
14. Perjudian	2	2	-
15. Penggelapan	54	39	31
16. Pengancaman	13	15	5
17. Perbuatan Tidak menyenangkan	4	3	1
18. Pemerkosaan	-	1	-
19. Pemerasan	-	-	-

20. Penggeroyokan	-	-	-
21. Narkotika	56	37	19
22. Pemalsuan	6	8	3
23. Lain-lain	43	35	8
Pasaman Barat	790	647	377

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024

Rumus menhitung indikator kinerja Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)

$$\frac{\sum \text{Tindak Kriminal dalam 1 tahun}}{\sum \text{Penduduk}} \times 10.000$$

$$\text{Angka Kriminalitas} = \frac{790}{450.050} \times 10.000$$

$$\text{Angka Kriminalitas} = 17,55$$

Berikut data jumlah tindak kriminal dan jumlah penduduk Pasaman Barat tahun 2020-2023 sebagaimana diuraikan pada tabel 3.30.

Tabel 3. 30

Data Jumlah Tindak Pidana dan Jumlah Penduduk 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Kriminal	Jumlah Penduduk	Angka Kriminalitas
1	2020	632	453.000	13,95
2	2021	599	436.298	13,72
3	2022	599	436.298	13,72
4	2023	790	450.050	17,55

Sumber data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan data pada tabel 3.30, terdapat poin penting yang perlu diperhatikan terkait realisasi indikator kinerja Angka Kriminalitas di Pasaman Barat, yaitu terdapat fluktuasi angka kriminalitas selama periode 2020-2023. Pada tahun 2020, angka kriminalitas di Pasaman Barat adalah 13,95 per 10.000 penduduk. Angka tersebut kemudian turun menjadi 13,72 per 10.000 penduduk pada tahun 2021 dan 2022. Namun, pada tahun 2023, angka kriminalitas kembali naik menjadi 17,55 per 10.000 penduduk. Kenaikan angka kriminalitas pada tahun 2023 perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Angka Kriminalitas tahun 2021-2023 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.31.

Tabel 3. 31
Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja
Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)

No	Indikator Kinerja	Realisasi			% Capaian Kinerja			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	17,55	13,72	13,72	40,45	85,66	85,66	8

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Analisis tabel 3.31 menunjukkan bahwa angka kriminalitas di Pasaman Barat mengalami peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 dan 2021. Hal ini berakibat pada penurunan capaian kinerja pada tahun 2023.

Meskipun demikian, target angka kriminalitas pada tahun 2026 (8 per 10.000 penduduk) optimis dapat tercapai. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan upaya yang lebih keras dan berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan seluruh elemen masyarakat. Dengan kerja sama dan komitmen bersama, diharapkan target angka kriminalitas pada tahun 2026 dapat tercapai dan terciptalah kondisi keamanan dan ketentraman di Pasaman Barat.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui OPD terkait telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka kriminalitas, antara lain :

1. **Meningkatkan Patroli dan Keamanan :**
 - a. Meningkatkan patroli di daerah rawan kriminalitas.
 - b. Menambah jumlah personel keamanan di daerah rawan.
 - c. Memasang kamera CCTV di daerah rawan.
2. **Memberikan Penyuluhan dan Pembinaan kepada Masyarakat :**
 - a. Memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja.
 - b. Memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban.
 - c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.
3. **Meningkatkan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum :**
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan Polres Pasaman Barat dan Kodim 0305/Pasaman.
 - b. Melakukan operasi gabungan bersama aparat penegak hukum.

- c. Memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.
4. **Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat :**
 - a. Memberikan penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat.
 - b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum.
 - c. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu.
 5. **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat :**
 - a. Menciptakan lapangan pekerjaan yang layak.
 - b. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.
 - c. Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui OPD terkait telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka kriminalitas, masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain :

1. **Keterbatasan anggaran** : Anggaran yang tersedia untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan kriminalitas masih terbatas, sehingga menghambat :
 - a. Penambahan personel keamanan.
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan.
 - c. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat.
2. **Kurangnya kesadaran hukum** : Sebagian masyarakat masih belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi, sehingga :
 - a. Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masih rendah.
 - b. Tindakan main hakim sendiri masih marak terjadi.
3. **Koordinasi antar instansi** : Koordinasi antar instansi terkait dalam penanggulangan kriminalitas masih perlu dioptimalkan, untuk menghindari :
 - a. Tumpang tindih program dan kegiatan.
 - b. Kurangnya efektivitas dalam penanggulangan kriminalitas.
4. **Faktor lain** : Peredaran narkoba, kenakalan remaja, kemiskinan, pengangguran, faktor geografis, dan budaya patriarki/kekerasan juga menjadi faktor pendorong terjadinya kriminalitas.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus berupaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui :

1. Peningkatan anggaran.
2. Penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum.

3. Penguatan koordinasi antar instansi.
4. Pemberantasan narkoba dan kenakalan remaja.
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Patroli dan pengawasan keamanan di daerah terpencil.
7. Sosialisasi untuk mengubah budaya patriarki/kekerasan.

Dengan upaya berkelanjutan dan kerjasama semua pihak, diharapkan hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dan angka kriminalitas di Pasaman Barat dapat ditekan.

Berdasarkan data yang tersedia, angka kriminalitas di Pasaman Barat pada tahun 2023 masih jauh di atas target yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026. Target RPJMD 2021-2026 adalah mencapai angka kriminalitas 8 per 10.000 penduduk pada tahun 2026. Namun, realisasi tahun 2023 menunjukkan angka kriminalitas mencapai 17,55 per 10.000 penduduk.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kriminalitas di Pasaman Barat masih belum optimal. Diperlukan langkah-langkah yang lebih keras dan terarah untuk mencapai target RPJMD 2021-2026.

Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab tingginya angka kriminalitas di Pasaman Barat antara lain dampak pandemi COVID-19, ketidakstabilan ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan, dan faktor sosial budaya.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu melakukan berbagai upaya untuk mencapai target RPJMD 2021-2026 dalam menurunkan angka kriminalitas. Upaya-upaya tersebut antara lain :

1. Meningkatkan Analisis dan Identifikasi Faktor Kriminalitas :

Pemerintah perlu melakukan penelitian dan pemetaan faktor-faktor yang berkontribusi pada tingginya angka kriminalitas di Pasaman Barat. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan akademisi, pakar, dan masyarakat dalam analisis dan identifikasi faktor kriminalitas.

2. Memperkuat Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kriminalitas :

Pemerintah perlu meningkatkan patroli dan pengawasan keamanan di daerah-daerah rawan kriminalitas. Selain itu, peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan perlu ditingkatkan. Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum dan pencegahan kriminalitas juga perlu dilakukan.

3. Meningkatkan Koordinasi Antar Instansi :

Pemerintah perlu membangun dan memperkuat koordinasi antar instansi terkait dalam penanggulangan kriminalitas. Rapat koordinasi secara berkala perlu dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan penanggulangan kriminalitas.

4. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Program Keamanan dan Ketertiban:

Pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program-program keamanan dan ketertiban yang telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mengukur efektivitas program dan melakukan perbaikan serta penyesuaian berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat :

Pemerintah perlu meningkatkan lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, kualitas pendidikan dan layanan sosial bagi masyarakat perlu ditingkatkan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat, yang dapat menjadi faktor pendorong kriminalitas.

6. Memperkuat Budaya Hukum :

Pemerintah perlu melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya budaya hukum. Akses masyarakat terhadap layanan hukum juga perlu ditingkatkan. Penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban juga perlu diberikan.

7. Memanfaatkan Teknologi :

Pemerintah perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kriminalitas. Hal ini dapat dilakukan dengan memasang kamera CCTV di daerah-daerah rawan kriminalitas dan mengembangkan sistem informasi dan database kriminalitas.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut secara berkelanjutan dan terintegrasi, diharapkan angka kriminalitas di Pasaman Barat dapat ditekan dan mencapai target RPJMD 2021-2026. Keberhasilan penanggulangan kriminalitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak swasta.

Untuk mencapai tujuan Mewujudkan Masyarakat Yang Agamais dan Berbudaya, Aman Tentram, dan Tangguh telah ditetapkan 3 sasaran strategis. Hal ini sesuai dengan sasaran yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian 3 sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 2.1.1 MASYARAKAT YANG AGAMAIIS DAN BERBUDAYA

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tidak hanya diukur dari jenjang pendidikan dan nilai akademis. Keimanan, ketaqwaan, dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari juga memiliki peran penting. Oleh karena itu, pembangunan SDM di Pasaman Barat haruslah meliputi pembentukan masyarakat yang beriman, bertaqwa, dan berbudaya.

Kabupaten Pasaman Barat kaya akan budaya yang harus dilestarikan. Kekayaan budaya ini meliputi bahasa, adat istiadat, kesenian tradisional, pakaian tradisional, dan warisan budaya lainnya. Pelestarian budaya merupakan salah satu upaya penting dalam pembangunan kebudayaan. Selain itu, pelaksanaan gelar seni budaya, pemberdayaan, pengembangan, dan pemanfaatan seni-budaya untuk kesejahteraan masyarakat juga harus dilakukan.

Sebagian besar penduduk Pasaman Barat berasal dari suku Minangkabau. Budaya Minangkabau memiliki falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Falsafah ini selaras dengan tujuan pembangunan SDM di Pasaman Barat, yaitu mewujudkan masyarakat yang agamis dan berbudaya, aman tentram, dan tangguh.

Penting untuk dicatat bahwa pembangunan SDM di Pasaman Barat bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat, termasuk keluarga, sekolah, dan lembaga-lembaga sosial lainnya, juga memiliki peran penting dalam upaya ini. Dengan kerja sama dan sinergi dari semua pihak, diharapkan pembangunan SDM di Pasaman Barat dapat mencapai tujuannya.

Pencapaian indikator sasaran Masyarakat Yang Agamais dan berbudaya diukur dengan Persentase Capaian PASBAR Mengaji dan jumlah Adat, Seni dan Budaya yang dilestarikan. Pencapaian indikator sasaran Masyarakat Yang Agamais dan berbudaya disajikan pada tabel 3.32.

Tabel 3. 32

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Masyarakat Yang Agamais dan Berbudaya

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Capaian PASBAR Mengaji	65%	40,91%	62,94%
Adat, Seni dan Budaya yang dilestarikan	7	11	157,14%
Rata-Rata Capaian			110,04%

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis Masyarakat yang agamais dan berbudaya, aman tentram, dan tangguh adalah sebesar 110,04% termasuk kategori sangat tinggi. Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang bersih dan efesien adalah sebagai berikut :

1. Persentase Capaian PASBAR Mengaji

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memiliki visi "Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera". Salah satu misi untuk mencapai visi tersebut adalah mewujudkan masyarakat yang agamis dan berbudaya, aman tentram dan tangguh.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang agamis dan berbudaya, aman tentram, dan tangguh. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan ini adalah dengan meningkatkan Persentase Capaian PASBAR Mengaji.

PASBAR Mengaji merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang agama Islam, serta meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur'an dan ilmu agama bagi anak-anak. Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti pembinaan keagamaan, pembinaan TPA/MDA/TPSA dan TPSQ, serta penugasan Da'i Nagari.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yakin bahwa dengan meningkatkan Capaian PASBAR Mengaji, masyarakat Pasaman Barat akan menjadi masyarakat yang agamis dan berbudaya, aman tentram, dan tangguh.

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini antara lain :

1. Jumlah TPA/MDA/TPSA dan TPSQ yang aktif
2. Jumlah peserta didik yang mengikuti program PASBAR Mengaji
3. Tingkat kemampuan baca tulis Al-Qur'an dan ilmu agama peserta didik

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berkomitmen untuk meningkatkan Capaian PASBAR Mengaji dan terus berupaya meningkatkan kualitas program PASBAR Mengaji. Dengan program ini, diharapkan masyarakat Pasaman Barat menjadi masyarakat yang agamis dan berbudaya, aman tenram, dan tangguh.

Capaian PASBAR Mengaji diukur berdasarkan persentase yang diperoleh dari jumlah Da'i aktif dibagi dengan jumlah masjid aktif di Kabupaten Pasaman Barat, dikalikan dengan 100%.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan target Capaian PASBAR Mengaji yang selalu meningkat setiap tahunnya. Target ini didasarkan pada nilai % Capaian PASBAR Mengaji tertinggi yaitu 90% dengan prediket Baik pada akhir RPJMD 2021-2026. Pada tahun 2023, target Capaian PASBAR Mengaji adalah 65%. Penetapan target ini mengacu pada beberapa hal, antara lain :

1. Visi dan Misi Kabupaten Pasaman Barat yaitu “Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”.
2. % Capaian PASBAR Mengaji tahun 2022 yang tidak dapat diukur karena kegiatan pendukung belum dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Jika dibandingkan dengan Persentase Capaian PASBAR Mengaji di tahun 2022, target tahun 2023 ditetapkan meningkat sebesar 65%. Pencapaian indikator kinerja Persentase Capaian PASBAR Mengaji tergambar pada tabel 3.33.

Tabel 3. 33
Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2.1

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Capaian PASBAR mengaji	65	40,91	62,94%

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan peningkatan Persentase Capaian PASBAR Mengaji hingga 65%. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui nilai-nilai keagamaan dan budaya.

Realisasi Capaian PASBAR Mengaji diukur berdasarkan jumlah Da'i aktif dibagi dengan jumlah masjid aktif di Kabupaten Pasaman Barat, dikalikan dengan 100%. Hasilnya, realisasi capaian mencapai 40,91% atau 62,94% dari target yang ditetapkan.

Pada tahun 2023, terdapat 205 Da'i aktif dan 501 masjid aktif di Kabupaten Pasaman Barat. Persentase Capaian PASBAR Mengaji dihitung dengan menggunakan rumus :

$$((205 \text{ Da'i aktif} / 501 \text{ masjid aktif}) \times 100\%) = 40,91\%$$

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program PASBAR Mengaji dalam mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang agamis dan berbudaya, aman tenram, dan tangguh.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase Capaian PASBAR Mengaji tahun 2021-2023 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.34.

Tabel 3. 34

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Persentase Capaian PASBAR mengaji

No	Indikator Kinerja	Realisasi			% Capaian Kinerja			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	Persentase Capaian PASBAR Mengaji	40,91	NA	NA	62,94%	0%	0%	90

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Meskipun realisasi tahun 2023 belum mencapai target, namun capaian ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2022 dan 2021 yang tidak dapat diukur. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam mencapai tujuan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian ini antara lain keaktifan TPA/MDA/TPSA dan TPSQ di masjid, koordinasi antara berbagai pihak terkait, sosialisasi program PASBAR Mengaji kepada masyarakat, dan sarana dan prasarana yang mendukung program PASBAR Mengaji.

Untuk meningkatkan capaian di masa depan, perlu dilakukan beberapa upaya seperti meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Da'i Nagari, memperkuat koordinasi antara berbagai pihak terkait, meningkatkan sosialisasi program PASBAR Mengaji, dan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung program PASBAR Mengaji.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan perolehan Persentase Capaian PASBAR Mengaji tahun 2026 adalah 90%. Target ini ambisius namun dapat dicapai dengan upaya yang maksimal.

Persentase Capaian PASBAR Mengaji tahun 2023 sebesar 62,94% termasuk kategori rendah. Pencapaian ini didapat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, antara lain :

1. Pembinaan terhadap Da'i Nagari se-Kabupaten Pasaman Barat
2. Monitoring Pondok Tahfizd
3. Kunjungan terhadap Masjid yang kurang layak untuk sarana peribadatan
4. Pembinaan terhadap Qori-Qori'ah Kabupaten Pasaman Barat
5. Pelaksanaan Lomba MTQ Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat dengan menjaring Hafizd-Hafizah yang handal dan berkompetensi
6. Penerbitan Sertifikat Pandai Baca Tulis Al-Qur'an kepada Pelajar yang akan Tamat sekolah SD sederajat.

Upaya-upaya tersebut telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an dan pemahaman agama masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk meningkatkan Persentase Capaian PASBAR Mengaji dapat dilakukan dengan memperkuat upaya-upaya yang telah dilakukan dan menambahkan program-program baru yang lebih inovatif dan kreatif untuk meningkatkan Capaian PASBAR Mengaji di masa depan, diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap Da'i Nagari
2. Memperbanyak jumlah Pondok Tahfizd
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana masjid
4. Memberikan penghargaan kepada Qori-Qori'ah yang berprestasi
5. Melaksanakan program PASBAR Mengaji secara berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui OPD terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama, dan Bagian Kesra Setda, telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Persentase Capaian PASBAR Mengaji. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain :

1. **Keterbatasan sumber daya manusia.** Jumlah Da'i Nagari yang masih belum mencukupi, terutama di daerah terpencil, menjadi kendala dalam pelaksanaan

program. Selain itu, kompetensi dan kualifikasi Da'i Nagari dalam metode pengajaran Al-Qur'an juga masih perlu ditingkatkan.

2. **Keterbatasan sarana dan prasarana** juga menjadi hambatan lainnya. Banyak TPA/MDA/TPSA dan TPSQ yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang belajar, buku pelajaran, dan Al-Qur'an. Kondisi masjid yang kurang layak untuk sarana peribadatan dan pembelajaran juga menjadi faktor penghambat.
3. **Kurangnya koordinasi dan sosialisasi** antar OPD terkait dan kepada masyarakat juga menjadi hambatan. Sosialisasi program PASBAR Mengaji yang masih belum optimal perlu ditingkatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
4. **Motivasi dan partisipasi masyarakat** yang masih rendah juga menjadi tantangan. Kurangnya dukungan dari orang tua dalam mendorong anak-anaknya untuk mengikuti program PASBAR Mengaji perlu diatasi.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berkomitmen untuk meningkatkan Capaian PASBAR Mengaji di masa depan. Berikut adalah beberapa upaya yang akan dilakukan :

1. **Penyusunan Anggaran yang Cukup dan Memadai :**

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan menyusun anggaran yang cukup dan memadai untuk pelaksanaan pembinaan di bidang keagamaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung program PASBAR Mengaji.

2. **Monitoring dan Evaluasi:**

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program PASBAR Mengaji. Hal ini bertujuan untuk memastikan program berjalan dengan efektif dan mencapai target yang diharapkan.

3. **Pembentukan Tim Monitoring Tahfizd:**

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan membentuk Tim Monitoring Tahfizd yang melibatkan instansi terkait. Tim ini akan bertugas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program tahfizd Quran, yang merupakan salah satu komponen utama PASBAR Mengaji.

4. Pelatihan Guru TPA/MDA/Da'i:

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan memberikan pelatihan kepada Guru TPA/MDA/Da'i yang aktif dalam meningkatkan keagamaan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran Al-Qur'an.

5. Penyusunan Program-Program Baru:

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan menyusun program-program baru yang dapat meningkatkan kegiatan Magrib Mengaji. Program-program ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program PASBAR Mengaji.

6. Peningkatan Aktivitas Pembinaan:

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan lebih aktif dalam melaksanakan pembinaan sehingga peserta program PASBAR Mengaji lebih dapat mengasah kemampuannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan berbagai kegiatan seperti lomba baca Al-Qur'an, tahlif Quran, dan ceramah agama.

2. Adat, Seni dan Budaya yang dilestarikan

Kabupaten Pasaman Barat memiliki masyarakat yang heterogen, terdiri dari 3 suku besar : Minangkabau, Mandailing, dan Jawa. Mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan sebagian kecil beragama Kristen. Keberagaman ini menjadi kekayaan budaya yang perlu dilestarikan.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang agamis dan berbudaya. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan, seperti pembinaan lembaga adat, seni, dan budaya, serta penyelenggaraan event-event budaya.

Salah satu indikator utama untuk mengukur pencapaian tujuan ini adalah jumlah lembaga seni dan budaya yang aktif mengembangkan seni dan budaya berbasis SBS-SBK (Sarak Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dibagi dengan jumlah lembaga seni dan budaya yang ada. Indikator ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya dan nilai-nilai agama.

Upaya pelestarian adat, seni, dan budaya terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Dinas Pendidikan bekerja sama dengan pemangku adat dalam membina lembaga adat, seni, dan budaya. Pemerintah juga menyelenggarakan event-event budaya yang memadukan adat dan budaya Minangkabau, Mandailing, dan Jawa.

Meskipun tidak mudah untuk menentukan ukuran tercapainya masyarakat yang agamis dan berbudaya, upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan komitmen yang kuat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, religius, dan berbudaya.

Untuk tahun 2023, Adat, Seni dan Budaya yang dilestarikan ditargetkan 7. Penetapan target tahun 2023 indikator kinerja ini mengacu pada target RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan realisasi di tahun 2022 (6). Jika dibandingkan dengan kondisi 2022, target tahun 2022 ditetapkan meningkat 1 menjadi 7. Pencapaian indikator kinerja Adat, Seni dan Budaya yang dilestarikan disajikan pada tabel 3.35.

Tabel 3. 35

Capaian Indikator Kinerja Adat, Seni dan Budaya yang dilestarikan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Adat, Seni dan Budaya yang dilestarikan	7	11	157,14

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan pelestarian 7 adat, seni, dan budaya. Target ini berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai 11, sehingga tingkat capaiannya adalah 157,14% dan termasuk kategori Sangat Tinggi.

Tingginya tingkat capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam melestarikan adat, seni dan budaya di Pasaman Barat cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, seperti festival adat dan budaya, pelatihan dan pembinaan bagi pelaku adat, seni dan budaya, serta bantuan dana untuk pengembangan adat, seni dan budaya.

Beberapa contoh adat, seni dan budaya yang dilestarikan di Pasaman Barat pada tahun 2023 disajikan pada tabel 3.36.

Tabel 3. 36

Adat, Seni dan Budaya yang dilestarikan

No	Nama Adat/Seni/Budaya	Alamat	Keterangan
1	Ronggieng	Kecamatan Pasaman, Kinali, Sasak Ranah Pasisie	Kesenian

2	Tari Salapan	Air Bangis	Seni Tari
3	Gordang Sambilan	Kec. Gunung Tuleh, Sungai Aur	Kesenian
4	Gandang Lasuang	Sasak Ranah Pasisie	Kesenian
5	Manjalang Buya	Aua Kuniang, Lubuak Landua	Tradisi Budaya
6	Tolak Bala	Kenagarian Aua Kuniang	Tardisi Budaya
7	Kuda Kepang	Luhak Nan Duo, Kinali, Ranah Batahan	Kesenian
8	Suluak	Lubuak Landua, Kinali	Religius Budaya
9	Reok	Luhak Nan Duo, Kinali, Ranah Batahan	Kesenian
10	Randai	Kinali	Kesenian
11	Tari Pasambahan	Lubuak Landua, Kinali, Talamau	Kesenian

Sumber: Dinas Pariwisata

Meskipun tingkat capaiannya cukup tinggi, masih terdapat beberapa tantangan dalam upaya pelestarian adat, seni dan budaya di Pasaman Barat, antara lain kurangnya generasi muda yang tertarik mempelajari adat, seni dan budaya, perkembangan zaman yang dapat menggeser nilai-nilai adat dan budaya, serta keterbatasan anggaran.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan beberapa solusi, antara lain meningkatkan edukasi dan promosi kepada generasi muda tentang pentingnya adat, seni dan budaya, mengintegrasikan nilai-nilai adat dan budaya dalam kurikulum pendidikan, serta meningkatkan anggaran untuk pengembangan adat, seni dan budaya.

Secara keseluruhan, upaya pelestarian adat, seni dan budaya di Pasaman Barat menunjukkan hasil yang positif. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan, pemerintah daerah telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga dan melestarikan kekayaan budaya daerah.

Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2021-2023 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.37.

Tabel 3. 37
Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja
Adat, Seni dan Budaya yang dilestarikan

No	Indikator Kinerja	Realisasi			% Capaian Kinerja			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	Adat, Seni dan Budaya yang dilestarikan	11	6	3	157,14	120	100	12

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Pada tahun 2023, realisasi indikator kinerja Adat, Seni dan Budaya yang dilestarikan di Pasaman Barat mencapai 11, melampaui target yang ditetapkan yaitu 7. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian adat, seni dan budaya di Pasaman Barat cukup berhasil.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi sebanyak 5. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi meningkat sebanyak 8. Peningkatan ini menunjukkan tren positif dalam upaya pelestarian adat, seni dan budaya di Pasaman Barat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan realisasi ini antara lain :

1. Komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan adat, seni dan budaya.
2. Peningkatan anggaran untuk kegiatan pelestarian adat, seni dan budaya.
3. Peran aktif masyarakat dalam menjaga dan melestarikan adat, seni dan budaya.

Untuk tahun 2026, jumlah Adat, Seni dan Budaya yang dilestarikan ditargetkan menjadi 12 atau meningkat 1 dibandingkan kondisi di tahun 2023. Realisasi tahun 2023 menunjukkan pencapaian 91,66% dibandingkan dengan target tahun 2026. Dengan memperhatikan jumlah Adat, Seni dan Budaya yang masih belum dilestarikan di tahun 2023, target tahun 2026 optimis dapat dicapai.

Meskipun capaian kinerja menunjukkan tren yang positif, masih terdapat beberapa tantangan dalam upaya pelestarian adat, seni dan budaya di Kabupaten Pasaman Barat, antara lain :

1. Kurangnya generasi muda yang tertarik mempelajari adat, seni dan budaya.
2. Perkembangan zaman yang dapat menggeser nilai-nilai adat dan budaya.
3. Keterbatasan anggaran.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan beberapa solusi, antara lain :

1. Meningkatkan edukasi dan promosi kepada generasi muda tentang pentingnya adat, seni dan budaya
2. Mengintegrasikan nilai-nilai adat dan budaya dalam kurikulum pendidikan
3. Meningkatkan anggaran untuk pengembangan adat, seni dan budaya

Secara keseluruhan, upaya pelestarian adat, seni dan budaya di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan hasil yang positif. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan, pemerintah daerah telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga dan melestarikan kekayaan budaya daerah.

SASARAN STRATEGIS 2.1.2 MASYARAKAT YANG RUKUN DAN BERKEADILAN

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan Masyarakat yang rukun dan berkeadilan sebagai sasaran kedua yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan Mewujudkan masyarakat yang agamais dan berbudaya, aman tentram, dan tangguh. Untuk melihat apakah Masyarakat yang rukun dan berkeadilan sudah diterapkan di Kabupaten Pasaman Barat, digunakan empat indikator yang dijadikan alat ukur yaitu Indeks pembangunan gender, Predikat kabupaten peduli HAM, Indeks pemberdayaan gender dan Predikat kabupaten layak anak.

Pencapaian sasaran strategis Masyarakat yang rukun dan berkeadilan disajikan pada table 3.38.

Tabel 3. 38

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Masyarakat yang rukun dan berkeadilan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
Indeks Pembangunan Gender	91,03	90,17	99,06
Predikat Kabupaten Peduli HAM	SP (Sangat Peduli)	P (Peduli)	100
Indeks Pemberdayaan Gender	64,44	61,05	94,74
Predikat Kabupaten Layak Anak	Nindya (720)	Madya (605)	84,03
Rata-rata Capaian			94,46

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis Masyarakat yang rukun dan berkeadilan adalah sebesar 94,46% termasuk kategori Sangat Tinggi. Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis Masyarakat yang rukun dan berkeadilan adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Gender

Salah satu sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 adalah terwujudnya masyarakat yang rukun dan berkeadilan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Indikator yang menggambarkan perbandingan (ratio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dimensi pendidikan menggunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dimensi kesehatan menggunakan umur harapan hidup, serta dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran per kapita disesuaikan. Angka IPG yang mendekati 100 menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-laki. Namun, kita perlu perhatikan level pencapaian IPM laki-laki dan perempuan di suatu wilayah yaitu apakah sama-sama tinggi atau sama-sama rendah.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$IPG = \frac{IPM \text{ perempuan}}{IPM \text{ laki - laki}}$$

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. Pencapaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender tergambar pada tabel 3.39.

Tabel 3. 39

Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Gender	91,03	90,17	99,06

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender target 91,03, terealisir 90,17 dengan tingkat capaian sebesar 99,06% termasuk kategori keberhasilan sangat tinggi. Realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender tahun 2023 merujuk pada Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2024.

Perbandingan realisasi kinerja Indeks Pembangunan Gender tahun 2021-2023 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.40.

Tabel 3. 40
Perbandingan Realisasi Tahun 2022-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja
Indeks Pembangunan Gender

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian %			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	Indeks Pembangunan Gender	90,17	90,17	90,26	99,06	99,40	99,87	92

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Realisasi kinerja Indeks Pembangunan Gender di tahun 2023 adalah 90,17 dengan capaian 99,06%, termasuk kategori Sangat Tinggi .

Perbandingan realisasi kinerja Indeks Pembangunan Gender tahun 2023 dengan Standar Nasional digambarkan pada tabel 2.41

Tabel 3. 41
Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dan Standar Nasional Indikator Kinerja
Indeks Pembangunan Gender

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi Tahun 2023	Capaian %
1	Indeks Pembangunan Gender	91,39	90,17	98,66

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Realisasi kinerja Indeks Pembangunan Gender di tahun 2023 adalah 90,17 menunjukkan pencapaian 98,66% dari Target Nasional yaitu sebesar 91,39. Dengan mempertimbangkan pencapaian ini, Target Nasional optimis dapat dicapai pada tahun berikutnya.

Untuk tahun 2026, Indeks Pembangunan Gender ditargetkan 92 atau meningkat 1,83 dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023. Realisasi tahun 2023

sebanyak 90,17 menunjukkan pencapaian sebesar 99,05% dari target 2026. Dengan mempertimbangkan capaian di tahun 2023, target 2026 optimis dapat dicapai.

2. Predikat Kabupaten Peduli HAM

Semua Kabupaten/Kota dapat memenuhi kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM dan menyampaikan laporan pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM sesuai dengan prosedur yang dijelaskan di dalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 dan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis.

Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM mengacu pada aspek Hak Asasi Manusia yang meliputi :

a. Hak Sipil dan Politik meliputi :

- 1) Hak atas bantuan hukum.
- 2) Hak atas informasi.
- 3) Hak turut serta dalam pemerintahan.
- 4) Hak atas keberagaman dan pluralisme.
- 5) Hak atas kependudukan.

b. Hak ekonomi, Sosial dan Budaya meliputi :

- 1) Hak atas kesehatan.
- 2) Hak atas pendidikan.
- 3) Hak atas pekerjaan.
- 4) Hak atas lingkungan yang basic dan sehat serta hak atas perumahan yang layak.
- 5) Hak perempuan dan anak.

Indikator kabupaten peduli HAM diukur berdasarkan indikator struktur, proses dan hasil.

a. Indikator struktur

Indikator struktur menggambarkan indikator yang terkait dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Dalam konteks Kabupaten/Kota Peduli HAM, indikator struktur tergambar dari adanya produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun peraturan/kebijakan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Indikator proses

Indikator proses merupakan perwujudan dari indikator struktur, yaitu upaya lebih teknis terkait pelaksanaan HAM, seperti program, kegiatan, aksi, alokasi anggaran, sarana dan prasarana, maupun intervensi lainnya.

c. Indikator hasil

Indikator hasil menggambarkan dampak dari setiap intervensi yang telah dilakukan oleh Pemerintah (baik yang termasuk indikator struktur maupun proses) untuk memastikan agar intervensi tersebut benar-benar memberikan pengaruh atau perubahan bagi pemajuan HAM di masyarakat. Capaian indikator hasil dapat dilihat dalam jangka menengah dan panjang. Pencapaian indikator kinerja Predikat Kabupaten Peduli HAM tergambar pada tabel 3.42.

Tabel 3. 42

Capaian Indikator Kinerja Predikat Kabupaten Peduli HAM

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Predikat Kabupaten Peduli HAM	SP (Sangat Peduli)	P (Peduli)	100

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Indikator kinerja Kabupaten Peduli HAM target SP, terealisir P dengan tingkat capaian sebesar 100% termasuk kategori keberhasilan sangat tinggi. Realisasi indikator kinerja Predikat Kabupaten Peduli HAM tahun 2023 merujuk pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-03.HA.02.01.01 Tahun 2023 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Pada Tahun 2022. Berdasarkan Keputusan ini realisasi tertinggi adalah P (Peduli) capaian Kabupaten Peduli HAM Kabupaten Pasaman Barat menjadi 100%.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Predikat Kabupaten Peduli HAM tahun 2021-2023 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.43.

Tabel 3. 43
Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja
Predikat Kabupaten Peduli HAM

No	Indikator Kinerja	Realisasi			% Capaian Kinerja			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	Predikat Kabupaten Peduli HAM	Peduli (P)	Sangat Peduli (SP)	Sangat Peduli (SP)	100	100	100	Peduli (P)

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Realisasi indikator kinerja Predikat Kabupaten Peduli HAM Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 adalah Peduli (P). Predikat ini sudah diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Capaian indikator kinerja Predikat Kabupaten Peduli HAM tahun 2021-2023 menunjukkan nilai yang sama yaitu 100% yang berarti realisasi tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Perolehan predikat Peduli (P) tidak lepas dari upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan semua OPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk mempertahankan predikat Peduli (P) tahun 2023. Adapun upaya yang dilakukan yaitu memenuhi semua data pendukung yang diperlukan pada setiap indikator penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM yang dilengkapi dengan tanda tangan Kepala OPD/Sekretaris Daerah dan Cap/Stempel Basah, serta menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan pada OPD terkait dengan pelaksanaan indikator penilaian kabupaten/kota peduli HAM. Karena ukuran keberhasilan Kabupaten/Kota Peduli HAM yaitu apabila terpenuhinya data pendukung setiap indikator yang akan dinilai.

Adapun faktor penghambat untuk mempertahankan predikat Peduli (P) adalah tidak terlaksananya kegiatan yang menjadi penilaian kabupaten/kota peduli HAM oleh OPD terkait dan kurangnya pemahaman OPD akan pentingnya penyajian data dukung penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM serta keterlambatan OPD dalam penyampaian data penilaian tersebut.

Perbandingan realisasi kinerja Predikat Kabupaten Peduli HAM tahun 2023 dengan Standar Nasional digambarkan pada tabel 3.44.

Tabel 3. 44
Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dan Standar Nasional Indikator Kinerja
Predikat Kabupaten Peduli HAM

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi Tahun 2023	Capaian %
1	Predikat Kabupaten Peduli HAM	Peduli (P)	Peduli (P)	100

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Realisasi kinerja Predikat Kabupaten Peduli HAM di tahun 2023 adalah Peduli (P) menunjukkan pencapaian 100% dari Target Nasional yaitu Peduli (P). Ini merupakan suatu pencapaian yang memuaskan, dan diharapkan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dapat mempertahankan predikat ini pada tahun berikutnya.

Untuk tahun 2026, ditargetkan tetap mempertahankan predikat Peduli (P). Dengan mempertimbangkan realisasi dari tahun 2022-2023 dan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam mempertahankan predikat ini, target tahun 2026 optimis dapat dicapai dengan strategi yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2023.

3. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik dan manajerial. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik dan manajerial mencakup persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Tabel 3. 45
Indikator Indeks Pemberdayaan Gender

Dimensi	Indikator
Ekonomi	Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja
Politik	Keterlibatan perempuan di parlemen

Manajerial	Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi
------------	---

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu persentase sumbangannya perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpisah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia ekonomi, politik, dan manajerial.

Pencapaian indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender tergambar pada tabel 3.46.

Tabel 3. 46
Capaian Indikator Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pemberdayaan Gender	64,44	61,05	94,74

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender target 64,44, terealisir 61,05 dengan tingkat capaian sebesar 94,74% termasuk kategori keberhasilan sangat tinggi. Realisasi indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2023 merujuk pada Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2024.

Perbandingan realisasi kinerja Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2021-2023 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.47.

Tabel 3. 47
Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian %			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	Indeks Pemberdayaan Gender	61,05	60,38	60,16	94,74	95,46	96,92	68

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Realisasi kinerja Indeks Pemberdayaan Gender di tahun 2023 adalah 61,05 dengan capaian kinerjanya 94,74%. Tren realisasi dari 2021-2023 menunjukkan tren yang stabil dengan angka realisasi meningkat.

Perolehan Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender di tahun 2023 tidak lepas dari upaya yang dilakukan semua OPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Adapun upaya yang dilakukan yaitu :

- a. Peningkatan kesadaran gender melalui sosialisasi dan pengajaran. Kesadaran bahwa perempuan memiliki hak di ranah publik dan kompetensi yang sama dengan laki-laki.
- b. Pemberian keterampilan, untuk peningkatan kesejahteraan melalui pelatihan-pelatihan.
- c. Mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang meningkatkan keterlibatan perempuan dalam bidang manajerial, ekonomi, politik, dan bidang lainnya.

Perbandingan realisasi kinerja Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2023 dengan Standar Nasional digambarkan pada tabel 3.48.

Tabel 3. 48
Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dan Standar Nasional Indikator Kinerja
Indeks Pemberdayaan Gender

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi Tahun 2023	Capaian %
1	Indeks Pemberdayaan Gender	74,18	61,05	82,30

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Realisasi kinerja Indeks Pemberdayaan Gender di tahun 2023 adalah 61,05 menunjukkan pencapaian 82.30% dari Target Nasional yaitu sebesar 74,18. Dengan mempertimbangkan pencapaian ini, dibutuhkan upaya yang lebih agar Target Nasional dapat dicapai pada tahun berikutnya.

Untuk tahun 2026, Indeks Pemberdayaan Gender ditargetkan 68 atau meningkat 7,62 dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023. Realisasi tahun 2023 sebanyak 60,38 menunjukkan pencapaian sebesar 88,79% dari target 2026. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, diperlukan usaha yang lebih agar target 2026 dapat dicapai.

4. Predikat Kabupaten Layak Anak

Salah satu sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 adalah terwujudnya masyarakat yang rukun dan berkualitas dengan salah satu indikator kinerja yaitu Predikat Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Kabupaten Layak Anak idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA). Untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 49
Indikator Kabupaten Layak Anak

No	Indikator	Ukuran
Kelembagaan		
1	Jumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA)	Ada dan diimplementasikan
2	Persentase Anggaran PHPA	Meningkat setiap tahun
3	SDM terlatih Konvensi Hak Anak (KHA)	Meningkat setiap tahun, terutama tenaga layanan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan penegak hukum
4	Keterlibatan lembaga masyarakat dan media massa dalam PHPA	Ada dan meningkat setiap tahun
5	Keterlibatan dunia usaha dalam PHPA	Ada dan meningkat setiap tahun
6	Jumlah kegiatan inovatif	Meningkat setiap tahun
Klaster I : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN		
7	Persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	Semua anak 100%
8	Tersedia fasilitas informasi layak anak	Tersedia, dapat diakses oleh semua anak, dan jumlah fasilitas meningkat setiap tahun
9	Persentase Forum Anak, termasuk Kelompok Anak, yang ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Meningkat setiap tahun, dan harus ada Forum Anak Kabupaten/Kota
10	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas Forum Anak, terutama kegiatan	Minimal 1 kegiatan per bulan, dan meningkat setiap tahun

	pertisipasi anak dalam perencanaan pembangunan	
KLASTER 2: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ANAK		
	Persentasi usia perkawinan pertama di atas 18 tahun	Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun
	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga yang menyediakan layanan pengasuhan dan perawatan anak	Tersedia, dapat diakses oleh semua anak, dan jumlahnya meningkat setiap tahun
	Tersedia Program Pengasuhan Berkelanjutan	Tersedia, dan dimanfaatkan oleh semua anak di dalam dan di luar asuhan keluarga
KLASTER 3: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN		
	Angka Kematian Bayi	Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun
	Prevalensi kekurangan gizi buruk, gizi kurang, stunting dan gizi lebih pada balita	Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun
	Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun
	Persentase Imunisasi dasar lengkap	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun
	Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP)	Jumlah Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak, meningkat setiap tahun
	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan Kespro Remaja, Penanganan NAPZA, HIV/AIDS, Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, dan Disabilitas	Tersedia, dan meningkat setiap tahun
	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun
	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun
	Kawasan Tanpa Rokok	Tersedia, dan meningkat setiap tahun
KLASTER 4: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA		
	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUDHI)	Ada PAUD-HI, dan meningkat tiap tahun Minimal 1 desa/kelurahan 1 Pendidikan Anak (PAUD) Angka partisipasi PAUD di atas rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun
	Persentase Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun	100 %
	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)	Minimal 1 SRA di setiap jenjang pendidikan, dan meningkat setiap tahun

	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	Ada rute aman dan selamat ke/dari sekolah (RASS), dan meningkat setiap tahun
	Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak	Tersedia Ruang Kreatifitas Anak, dan dapat diakses/dimanfaatkan oleh semua anak
KLASTER 5: PERLINDUNGAN KHUSUS		
	Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus	100%
	Jumlah Proses Diversi yang Diupayakan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Jumlah penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif, dan meningkat setiap tahun
	Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	Tersedia, dan berfungsi
	Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	100 %

Sumber data : DPPKBP3A

Pencapaian indikator kinerja Predikat Kabupaten Layak Anak tergambar pada tabel 3.50.

Tabel 3. 50

Capaian Indikator Kinerja Predikat Kabupaten Layak Anak

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Predikat Kabupaten Layak Anak	Nindya (720)	Madya (605)	84,03

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Indikator kinerja Predikat Kabupaten Layak Anak target Nindya (720), terealisir Madya (605) dengan tingkat capaian sebesar 84,03% termasuk kategori tinggi. Realisasi indikator kinerja Predikat Kabupaten Layak Anak tahun 2023 merujuk pada Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 160 Tahun 2023 tentang Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Predikat Kabupaten Layak Anak tahun 2021-2023 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.51.

Tabel 3. 51
Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja
Predikat Kabupaten Layak Anak

No	Indikator Kinerja	Realisasi			% Capaian Kinerja			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	Predikat Kabupaten Layak Anak	Madya (605)	Madya (709)	Madya (620)	84,03	109,07	100	Utama (820)

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Realisasi indikator kinerja Predikat Kabupaten Layak Anak tahun 2023 adalah Madya (605) dengan capaian 84,03% termasuk kategori Tinggi. Predikat Madya ini sudah didapatkan Kabupaten Pasaman Barat sejak tahun 2021.

Untuk tahun 2026, Predikat Kabupaten Layak Anak ditargetkan menjadi Utama (820). Dengan melihat realisasi indikator kinerja Predikat Kabupaten Layak Anak tahun 2021-2023, diperlukan usaha yang lebih oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar target 2026 dapat dicapai.

Perolehan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2023 yang mendapat predikat Madya dalam penilaian Kabupaten Layak Anak dengan total nilai 605 dengan predikat yang sama dengan tahun sebelumnya, hal ini dapat tercapai karena :

- a. Kolaborasi antara tim gusus tugas sangat berperan dalam pencapaian Kabupaten Layak Anak, perlu dilakukan evaluasi secara berkelanjutan oleh ketua Gugus Tugas KLA yaitu BAPPELITBANGDA terhadap sistem pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat yang responsif anak.
- b. Tenaga pemberi layanan di Kabupaten Pasaman Barat (Pemberi layanan kesehatan, guru, petugas layanan publik lainnya) harus sudah terlatih Konvensi Hak Anak sehingga semua petugas pemberi layanan paham tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak namun hanya sebagian kecil yang sudah terlatih Konvensi Hak Anak.
- c. Forum Anak Daerah Kabupaten Pasaman Barat sudah sangat berperan dalam pencapaian Kabupaten Layak Anak karena sudah sangat memahami tugasnya dalam menjadi agen Pelopor dan Pelapor dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak namun hanya Forum anak Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang secara rutin mempunyai program kerja dan mempunyai inovasi sebagai agen

- pelopor dan pelapor sementara forum anak kecamatan dan forum anak nagari tidak terkelola dengan baik. Sehubungan dengan itu, perlu adanya pembinaan berkelanjutan terhadap forum anak kecamatan dan forum anak nagari.
- d. Peran masyarakat dan lembaga juga sangat menentukan pencapaian target kabupaten layak anak (P2TP2A, Puspaga, LKSA, dll).
 - e. Pada Tahun 2020 di Kabupaten Pasaman Barat sudah terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) dan perlu ditingkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan APSAI guna meningkatkan peran serta dunia usaha dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Pasaman Barat.
 - f. Ketersediaan ruang bermain (indoor/outdoor) serta infrastruktur layak anak sangat berperan penting dan harus dilakukan penambahan jumlah dan perawatan ruang bermain anak yang sudah ada.
 - g. Tersedianya sumber daya manusia yang berkaitan langsung dengan pencapaian Kabupaten Layak Anak yakni tim gugus tugas Kabupaten Layak Anak mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan nagari, tenaga pemberi layanan pemerintah yang terlatih Konvensi Hak Anak (KHA), Forum Anak, masyarakat dan dunia usaha.

Perbandingan realisasi kinerja Predikat Kabupaten Layak Anak tahun 2023 dengan Standar Nasional digambarkan pada tabel 3.52.

Tabel 3. 52
Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dan Standar Nasional Indikator Kinerja
Predikat Kabupaten Layak Anak

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi Tahun 2023	Capaian %
1	Predikat Kabupaten Layak Anak	KLA	Madya (605)	50

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Realisasi kinerja Predikat Kabupaten Layak Anak di tahun 2023 adalah Madya (605) menunjukkan pencapaian 50% dari target nasional. Ini merupakan pencapaian yang belum memuaskan, dan diharapkan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dapat meningkatkan upaya guna mencapai predikat sesuai target nasional.

Untuk mencapai Sasaran **Masyarakat yang rukun dan berkeadilan**, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 1 Program dengan 4 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 sebesar Rp. **243.409.990,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif sesuai dengan sasaran **Masyarakat yang rukun dan berkeadilan**. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung dapat dilihat pada tabel 3.53.

Tabel 3. 53

Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Masyarakat yang rukun dan berkeadilan

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Masyarakat yang rukun dan berkeadilan	4	243.409.990	226.385.994
1	Program Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)	4	243.409.990	226.385.994

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Dari jumlah anggaran sebesar Rp **243.409.990,-** terealisasi sebesar Rp. **226.385.994,-** atau 93%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.**17.023.996,-** (7%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran **Masyarakat yang rukun dan berkeadilan** (94,19%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (93%) dengan tingkat efisiensi 1,19%.

**SASARAN STRATEGIS 2.1.3
MASYARAKAT YANG TANGGUH MENGHADAPI
BENCANA**

Kabupaten Pasaman Barat termasuk salah satu wilayah yang memiliki potensi risiko bencana yang tinggi di Sumatera Barat. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis Kabupaten Pasaman Barat yang terletak di hadapan jalur pertemuan dua lempeng bumi dan juga segmen patahan bumi. Adapun bencana yang menjadi tanggungjawab intervensi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat adalah cuaca ekstrim, kekeringan, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, tsunami, banjir dan gempa bumi. Bencana yang terjadi akan berdampak kerusakan di semua bidang seperti bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan hal

tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan sasaran strategis masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.

Dalam hal penanggulangan bencana, sasaran yang ditetapkan termasuk tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana guna diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana.

Dalam pengukuran indikator dilakukan melalui pengisian perangkat penilaian kapasitas daerah (71 indikator), yang mewakili 7 prioritas yaitu :

- 1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan
- 2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
- 3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
- 4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana
- 5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
- 6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
- 7) Pembangunan sistem pemulihan bencana

Untuk tahun 2023, Indeks Ketahanan Daerah merupakan persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana ditargetkan 1,60. Penetapan target sebesar 1.60 mengacu pada target RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Penetapan target ini didasarkan juga pada kewenangan penanganan bencana tingkat kabupaten. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022 (0,48), target tahun 2023 ditetapkan mengalami peningkatan sebesar 1,12.

Pencapaian sasaran strategis masyarakat yang tangguh menghadapi bencana tergambar pada tabel 3.54.

Tabel 3. 54
Capaian Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Daerah

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketahanan Daerah	1.60	0,30	18,75

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Indeks Ketahanan Daerah terhadap kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai kapasitas penanggulangan bencana ditargetkan 1,60, terealisasi 0,30 dengan tingkat capaian 18,75% termasuk kategori keberhasilan Sangat Rendah.

Dalam hal penanggulangan bencana pada kondisi tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 telah mengupayakan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah masyarakat dan kelembagaan yang siap menghadapi bencana.
2. Meningkatkan jumlah infrasturktur (peralatan dan sistem peringatan dini bencana) yang siap dan berfungsi.
3. Memberikan bantuan personil, logistik dan peralatan ke lokasi bencana.
4. Mengumpulkan data dan informasi kebencanaan terkait dengan lokasi kejadian, dampak, jumlah korban dan kerugian serta tindakan penanggulangan bencana yang dilakukan.
5. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja yaitu :

1. Telah tersedianya dokumen KRB
2. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana serta kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam penanggulangan bencana antara lain :

1. Belum maksimalnya perhitungan Indeks Ketahanan Daerah, yang harusnya melibatkan instansi terkait.
2. Belum memadainya jumlah dan kemampuan aparatur yang memahami teknis penanggulangan bencana.
3. Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah baik dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
4. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana yang masih belum memadai.
5. Keterbatasan SDM relawan penanggulangan bencana.
6. Terbatasnya alokasi anggaran penanggulangan bencana.

Solusi dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan sasaran strategis :

1. Perlu diadakan forum dalam rangka penghitungan IKD dengan OPD terkait

2. Pengadaan rambu evakuasi, papan informasi dan baliho kebencanaan pada daerah rawan bencana
3. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana harus dipenuhi
4. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana harus lengkap dan jelas
5. Pelatihan dan pencegahan kesiapsiagaan bencana dilaksanakan di setiap nagari dan sekolah di Pasaman Barat.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah tahun 2021-2023 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.55.

Tabel 3. 55

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi			% Capaian Kinerja			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	Indeks Ketahanan Daerah	0,30	1,50	1,35	18,75	100	96,42	1,80

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Realisasi indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah di tahun 2023 adalah 0,30, belum memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerjanya 18,75%. Tren realisasi dari 2022-2023 menunjukkan tren negatif dengan penurunan sebesar 0,18 di tahun 2023.

Untuk tahun 2026, Indeks Ketahanan Daerah ditargetkan 1,80 atau meningkat 1,50 dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023. Realisasi tahun 2023 sebanyak 0,30 menunjukkan pencapaian sebesar 16,67% dari target 2026. Dengan mempertimbangkan pencapaian di tahun 2023, target 2026 akan dilakukan penyesuaian.

Tabel 3. 56

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dan Standar Provinsi

Indikator	Realisasi	Standar Provinsi	% Capaian
Indeks Ketahanan Daerah	0,30	0,72	41,67

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) BPBD Pasaman Barat tahun 2023 berdasarkan hasil reviu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah 0,30. Sedangkan IKD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 mencapai 0,72 yang merupakan penilaian secara mandiri, BPBD Provinsi Sumatera Barat masih menunggu penilaian IKD yang dilaksanakan oleh BNBP sebagai nilai Indeks yang resmi dikeluarkan. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, capaian IKD BPBD Pasaman Barat hanya mencapai 41,67%. Salah satu penyebab rendahnya IKD BPBD Pasaman Barat yaitu belum maksimalnya penghitungan Indeks Ketahanan Daerah, yang harusnya melibatkan instansi terkait.

Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan bencana di masa yang akan datang antara lain :

1. Peningkatan kesiapsiagaaan aparatur dalam menghadapi bencana.
2. Pemeliharaan infrasturktur (sarana dan prasarana) pendukung penanggulangan bencana.
3. Perbaikan dan perawatan peralatan penunjang penanggulangan bencana.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personil, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana.

BPBD Kabupaten Pasaman Barat memiliki 23 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 orang honor daerah dan 38 orang Tenaga Harian Lepas (THL) untuk menjalankan organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada. Dalam melaksanakan tugasnya BPBD Pasaman Barat dibantu oleh fasilitator Kelompok Siaga Bencana (KSB) dan Desa Tangguh Bencana (Destana) yang membantu dalam bidang komunikasi, informasi, dan data. Sedangkan TRC membantu pada saat terjadi bencana yaitu melakukan assesment awal dan evakuasi.

Dalam penggunaan anggaran BPBD Pasaman Barat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 dan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran untuk kegiatan pada saat bencana dan pasca bencana digunakan sesuai kebutuhan pada saat terjadinya bencana. Untuk keadaan darurat bencana yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pasaman Barat selain anggaran yang terdapat pada DPA juga digunakan Biaya Tak Terduga (BTT) yang direalisasikan sesuai kebutuhan pada saat darurat tersebut sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.

Efisiensi dalam bidang sarana dan prasarana yaitu penggunaan sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Namun sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana pada BPBD sangatlah minim, sehingga BPBD kesulitan dalam melaksanakan tugas jika terjadi bencana dalam skala besar.

TUJUAN 2.2

MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam kemajuan dan pembangunan suatu bangsa. Hal ini dikarenakan SDM inilah yang akan menjadi penggerak pembangunan di segala aspek. SDM yang menjadi penggerak pembangunan adalah SDM yang berkualitas. Untuk itu, kualitas SDM perlu ditingkatkan agar peran SDM tersebut maksimal dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM antara lain melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing sebagai tujuan untuk mendukung pencapaian misi 2 Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026. Kualitas SDM diukur dengan menggunakan indikator indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), Pengetahuan (*knowledge*), Standar hidup layak (*decent standard*). Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu: sangat tinggi ($IPM \geq 80$), tinggi ($70 \leq IPM \leq 80$), sedang ($60 \leq IPM \leq 70$) dan rendah ($IPM < 60$). Penetapan indikator indeks pembangunan manusia diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Untuk tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan 70,07. Penetapan target IPM sebesar 70,07 mengacu pada target RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Jika dibandingkan dengan realisasi IPM di tahun

2022 (69,57), target tahun 2023 ditetapkan meningkat sebesar 0,5. Pencapaian tujuan Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing tergambar pada tabel 3.57.

Tabel 3. 57
Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Manusia	70,07	72,03	102,80

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia tahun 2023 terealisasi 72,03 dengan tingkat capaian sebesar 102,80% termasuk kategori keberhasilan tinggi. Realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun (IPM) 2023 Kabupaten Pasaman Barat meningkat sebesar 0,62 poin dari tahun 2022, yakni 69,57.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia sebesar 102,80% termasuk kategori keberhasilan memuaskan. Hal ini didukung oleh upaya sebagai berikut :

1. Pemerintah Pasaman Barat mencanangkan inovasi Walikan dimana dianggarkan sejumlah Rp. 400.000.000,00 dana pokok pikiran DPRD Pasaman Barat untuk membantu masyarakat kurang mampu berupa biaya pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan dan seragam serta atribut kelengkapan sekolah. Di bidang kesehatan Pemerintah Pasaman Barat meluncurkan program UHC (*Universal Health Center*), berupa biaya pengobatan gratis, cukup dengan menunjukkan KTP.
2. Mengupayakan peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah sebesar 13,70 tahun, meningkat dari tahun 2022 yakni sebesar 13,69. Artinya, bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun ke atas di Kabupaten Pasaman Barat pada masa mendatang adalah selama 13,7 tahun (setara dengan tahun ke-1 jenjang Pendidikan Tinggi/D-I).
3. Mengupayakan peningkatan angka harapan hidup
Angka Harapan Hidup rata-rata penduduk Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 adalah 68,25 tahun, mengalami peningkatan dari tahun 2021 yakni 67,94 tahun. Artinya, setiap penduduk di Kabupaten Pasaman Barat diperkirakan hidup rata-rata selama hingga 68 tahun. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi

tantangan bagi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui program-program pembangunan kesehatan yang lebih terarah.

Dalam mencapai Indeks Pembangunan Manusia masih ditemukan kendala/hambatan sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan dan kesehatan.
2. Kompetensi guru dan tenaga kesehatan yang masih belum sesuai dan maksimal.
3. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan.
4. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan sehingga banyaknya lulusan yang menganggur.
5. Mahalnya biaya pendidikan sehingga masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah.
6. Belum selarasnya program pembinaan pendidikan di kabupaten.
7. Masih kurangnya akses digitalisasi pendidikan dan implementasi merdeka belajar.
8. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Perilaku Hidup Sehat.

IPM Kabupaten Pasaman Barat masih berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat yakni pada angka 73,75 dan nasional pada angka 74,39.

Tabel 3. 58

Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Indonesia

Kab/Kota	Indeks Pembangunan Manusia	
	2022	2023
Pasaman Barat	69,57	72,03
Sumatera Barat	73,26	73,75
Indonesia	72,91	74,39

Sumber data: Badan Pusat Statistik 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perubahan IPM Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022-2023 lebih baik dibanding rata-rata Propinsi Sumatera Barat. IPM Kabupaten Pasaman Barat meningkat 0,62 poin dari tahun 2022 ke tahun 2023. Sementara IPM Provinsi Sumatera Barat naik 0,49 poin pada periode yang sama.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia tahun 2021-2023 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.59.

Tabel 3. 59
Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja
Indeks Pembangunan Manusia

No	Indikator Kinerja	Realisasi			% Capaian Kinerja			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,03	69,57	68,76	102,80	100,23	99,72	71,97

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2023 adalah 72,03 dengan capaian 102,80% termasuk kategori Sangat Tinggi. Tren realisasi dari 2021-2023 menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 0,62 di tahun 2023. Sejalan dengan realisasi, capaian indikator kinerja ini tahun 2021-2023 juga menunjukkan tren yang positif.

Untuk tahun 2026, Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan 71,97. Realisasi tahun 2023 adalah 72,03 menunjukkan pencapaian sebesar 100,08% dari target 2026. Dengan mempertimbangkan peningkatan di tahun 2023, target 2026 sudah tercapai.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di masa yang akan datang perlu diupayakan hal-hal berikut ini :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.
2. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kesehatan.
3. Mengoptimalkan penyampaian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga tepat sasaran.
4. Pemberian Bantuan Khusus Murid (BKM) untuk membantu biaya bagi murid yang tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan sama seperti anak lainnya.
5. Pemerataan pendidikan di semua wilayah.
6. Memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait pola hidup sehat.
7. Melakukan peningkatan penjaminan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.
8. Konsisten melaksanakan Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

Untuk mencapai Sasaran **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

melaksanakan 1 Program dengan 1 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 sebesar Rp. **101.045.000,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif sesuai dengan sasaran **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung dapat dilihat pada tabel 3.60.

Tabel 3. 60

Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1	101.045.000	60.659.000
1	Program UHC (<i>Universal Health Center</i>)	1	101.045.000	60.659.000

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Dari jumlah anggaran sebesar Rp **101.045.000,-** terealisasi sebesar Rp. **60.659.000,-** atau 60,03%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.**40.386.000,-** (39,97%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing** (70,19%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (60,03%) dengan tingkat efisiensi 10,16%.

Dalam mencapai tujuan Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan 3 sasaran strategis yaitu Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan Terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian 3 sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 2.2.1
MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN
MASYARAKAT

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar untuk kemajuan suatu bangsa. Pendidikan yang bermutu akan melahirkan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas juga. Sumber daya manusia yang berkualitas inilah yang akan menjadi modal pembangunan dan penggerak perekonomian pada suatu negara. Peningkatan mutu pendidikan menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan sasaran meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat sebagai sasaran strategis yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja rata-rata lama sekolah dan rata-rata harapan lama sekolah. Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat disajikan pada tabel 3.61.

Tabel 3. 61

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Rata-rata lama sekolah (th)	8,48	8,81	103,89
Rata-rata harapan lama sekolah (th)	14,50	13,70	94,48
Rata-rata Capaian Kinerja			99,18

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat adalah sebesar 99,18% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi. Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata lama sekolah (th)

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal dengan kegunaan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah penduduk suatu wilayah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya dan juga diartikan semakin baiknya tingkat pengetahuan penduduk tersebut. Penetapan rata-rata lama sekolah diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Untuk tahun 2023, rata-rata lama sekolah ditargetkan 8,48. Penetapan target rata-rata lama sekolah mengacu pada target tahun ke 2 RPJMD Kabupaten Pasaman

Barat Tahun 2021-2026. Jika dibandingkan dengan realisasi rata-rata lama sekolah di tahun 2022 (8,55), target tahun 2023 ditetapkan meningkat sebesar 0,10.

Pencapaian indikator kinerja Rata-rata lama sekolah (th) tergambar pada tabel 3.62.

Tabel 3. 62
Capaian Indikator Kinerja Rata-rata lama sekolah (th)

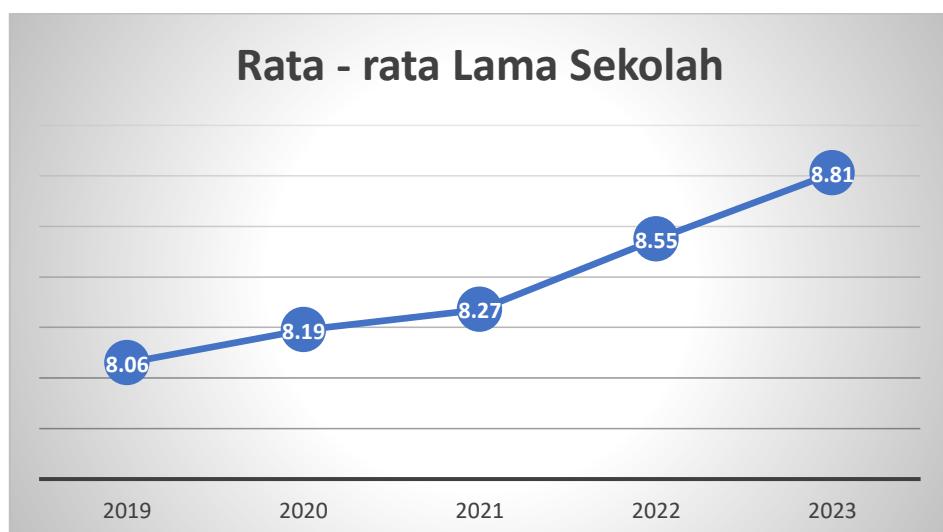
Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Rata-rata lama sekolah (th)	8,48	8,81	103,89

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Rata-rata lama sekolah (th) target 8,48, terealisasi 8,81 dengan tingkat capaian 103,89% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Rata-rata lama sekolah 8,81 tahun berarti penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,81 tahun atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III).

Perkembangan Rata-rata lama sekolah (th) di Kabupaten Pasaman Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2023) terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 0,19 pertahun. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 0,28 dan terendah terjadi di tahun 2021 sebesar 0,08. Rata-rata lama sekolah secara rinci disajikan pada gambar 3.4.

Gambar 3. 4
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019-2023



Sumber data: Badan Pusat Statistik 2024

Perbandingan realisasi indikator kinerja Rata-rata lama sekolah (th) tahun 2021-2023 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.63.

Tabel 3. 63
Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja
Rata-rata Lama Sekolah (th)

No	Indikator Kinerja	Realisasi			% Capaian Kinerja			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	Rata-rata lama sekolah (th)	8,81	8,55	8,27	103,89	102,03	100	8,79

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Realisasi indikator kinerja Rata-rata lama sekolah (th) di tahun 2023 adalah 8,81, tercapai melebihi target yang ditetapkan dengan capaian kinerjanya 103,89% termasuk kategori Sangat Tinggi. Realisasi tahun 2021-2023 menunjukkan tren yang positif. Sejalan dengan realisasi, capaian kinerja indikator Rata-rata lama sekolah (th) tahun 2021-2023 juga menunjukkan tren yang positif.

Untuk tahun 2026, Rata-rata lama sekolah (th) ditargetkan 8,79 atau meningkat 0,31 dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023. Realisasi tahun 2023 sebanyak 8,81 menunjukkan pencapaian sebesar 100,23% dari target 2026. Dengan mempertimbangkan peningkatan di tahun 2023, target 2026 optimis dapat dipertahankan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat di tahun 2023 antara lain :

1. Penyaluran dana BOS untuk SD dan SMP.
2. Penyaluran dana BOP PAUD dan BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan.
3. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah melalui pembangunan dan rehabilitasi sekolah PAUD, SD dan SMP.
4. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD).
5. Meningkatkan akses dan daya saing pendidikan.
6. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan melalui kegiatan yang dapat menunjang dan memberdayakan kemampuan PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) demi tercapainya target yang telah ditetapkan.
7. Meningkatkan angka kelulusan sekolah.

Dalam meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat masih ditemukan kendala/hambatan sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas sarana fisik

Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.

2. Rendahnya kualitas guru

Masih ada guru yang belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.

3. Rendahnya kesejahteraan guru

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal.

4. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan

Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan sehingga banyaknya lulusan yang menganggur.

5. Mahalnya biaya pendidikan sehingga masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah.
6. Belum selarasnya program pembinaan pendidikan oleh Provinsi dengan program pembinaan pendidikan di kabupaten/kota.
7. Masih kurangnya akses digitalisasi pendidikan dan implementasi merdeka belajar.

Rendahnya angka rata rata lama sekolah, dikarenakan masih banyak masyarakat diatas umur 25 tahun yang masih belum menamatkan pendidikan pada jenjang SMP. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan masyarakat Kabupaten

Pasaman Barat memiliki angka rata rata lama sekolah rendah, mulai dari faktor ekonomi, faktor sosial, dan juga faktor kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Maka, alternatif lainnya adalah mengajak masyarakat Kabupaten Pasaman Barat khususnya yang berusia di atas 25 tahun yang masih belum menyelesaikan jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah untuk melanjutkan kembali pendidikannya melalui program kesetaraan yang sudah diberikan bantuan dari pusat yaitu BOP Kesetaraan.

Untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat di masa yang akan datang perlu diupayakan hal-hal berikut ini :

1. Mengkaji lagi perubahan kurikulum belajar agar kurikulum tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh peserta didik dan pendidik.
2. Peningkatan mutu guru melalui penyeleksian guru pendidik sebelum mereka mengajar pada suatu sekolah dan pemberian penghargaan kepada guru/staf pengajar.
3. Mengoptimalkan penyampaian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga tepat sasaran.
4. Pemberian Bantuan Khusus Murid (BKM) untuk membantu biaya bagi murid yang tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan sama seperti anak lainnya.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
6. Pemerataan pendidikan di semua wilayah.

2. Rata-rata harapan lama sekolah (th)

Harapan lama sekolah merupakan metode perhitungan untuk mengukur lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang sehingga diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Penetapan harapan lama sekolah diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Untuk tahun 2023, Rata-rata harapan lama sekolah (th) ditargetkan 14,50. Penetapan target ini mengacu pada target tahun ke 2 RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Jika dibandingkan dengan realisasi harapan lama sekolah di tahun 2022 (13,69), target tahun 2023 ditetapkan meningkat sebesar 0,28.

Pencapaian indikator kinerja Rata-rata harapan lama sekolah (th) tergambar pada tabel 3.64.

Tabel 3. 64

Capaian Indikator Kinerja Rata-rata harapan lama sekolah (th)

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Rata-rata harapan lama sekolah (th)	14,50	13,70	94,48

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Harapan lama sekolah target 14,50, terealisasi 13,70 dengan tingkat capaian 94,48 % termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi. Realisasi indikator kinerja Rata-rata harapan lama sekolah (th) tahun 2023 diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Harapan lama sekolah 13,70 tahun berarti anak-anak yang berusia 7 tahun di tahun 2023 memiliki harapan untuk menempuh pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat pada masa mendatang adalah selama 13,7 tahun (setara dengan tahun ke-1 jenjang Pendidikan Tinggi/D-I).

Rata-rata harapan lama sekolah (th) di Kabupaten Pasaman Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2023) terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 0,075 pertahun. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2020 sebesar 0,21 dan terendah terjadi di tahun 2022 sebesar 0,01. Harapan lama sekolah secara rinci disajikan pada gambar 3.5

Gambar 3. 5 Perkembangan Rata-rata Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019-2023



Sumber data: Badan Pusat Statistik 2024

Perbandingan realisasi indikator kinerja Rata-rata harapan lama sekolah (th) tahun 2021-2023 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.65.

Tabel 3. 65
Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja
Rata-rata harapan lama sekolah (th)

No	Indikator Kinerja	Realisasi			% Capaian Kinerja			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	Rata-rata harapan lama sekolah (th)	13,70	13,69	13,68	94,48	96,27	98,20	15,37

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Realisasi indikator kinerja Rata-rata harapan lama sekolah (th) di tahun 2023 adalah 13,70 dengan capaian 94,48% termasuk kategori Sangat Tinggi. Tren realisasi Rata-rata harapan lama sekolah (th) tahun 2021-2023 menunjukkan tren yang positif, akan tetapi untuk capaian kinerja menunjukkan tren negatif.

Untuk tahun 2026, Rata-rata harapan lama sekolah (th) ditargetkan 15,37 atau meningkat 1,67 dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023. Realisasi tahun 2023 sebesar 13,70 menunjukkan pencapaian sebesar 89,13% dari target 2026. Dengan mempertimbangkan peningkatan di tahun 2023, akan dilakukan upaya yang maksimal untuk meningkatkan harapan lama sekolah di tahun 2026.

Jika dibandingkan Rata-rata harapan lama sekolah (th) Kabupaten Pasaman Barat (13,70 tahun) dengan data Rata-rata harapan lama sekolah (th) Nasional (13,10 tahun), berada di atas angka nasional namun jika dibandingkan dengan Rata-rata harapan lama sekolah (th) Provinsi Sumatera Barat (14,10 tahun) berada di bawah Rata-rata harapan lama sekolah (th) Provinsi secara signifikan.

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja (faktor pendukung/ faktor penghambat) serta alternatif solusi yang telah dilakukan diantaranya pemerintah daerah menyusun strategi untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian angka partisipasi sekolah menuju 100%.

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisikasi Kasar (APK) terjadi penurunan disebabkan data peserta didik untuk MI dan MTs dari Kemenag masih belum valid sehingga menyebut dalam perhitungan APK menjadi kecil/tidak lengkap. Diharapkan ketika data peserta didik dari Kemenag sudah tersaji, maka persentase APK SD/MI dan SMP/MTs dapat lebih besar dari tahun sebelumnya.

Alternatif yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas dan sinkronisasi data antara Kemendikbud dengan Kemenag adalah memberikan data pendidikan dengan akurat dan tepat waktu. Sedangkan mengenai partisipasi peserta didik, solusinya yaitu dengan memperbaiki berbagai fasilitas sarana dan prasarana sekolah, dan kegiatan bantuan lainnya sebagai daya tariksiswa untuk mau menempuh wajib belajar pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya juga memberikan motivasi kepada siswa beserta orangtuanya akan arti pentingnya menempuh pendidikan untuk masa depan kelak demi kesejahteraan hidupnya.

SASARAN STRATEGIS 2.2.2 **MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN** **MASYARAKAT**

Kesehatan menjadi salah satu modal yang sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini menjadikan kesehatan sebagai salah satu komponen yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perbaikan mutu kesehatan akan berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang berarti juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kondisi kesehatan bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sama halnya dengan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pasaman Barat. Tolak ukur/indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah Usia Harapan Hidup (th) dan Prevalensi Stunting (%). Usia Harapan Hidup (th) dan Prevalensi Stunting (%) tahun n diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Pasaman Barat yang dikeluarkan pada tahun n.

Untuk tahun 2023, Usia Harapan Hidup (th) ditargetkan 67,97 dan Prevalensi Stunting (%) ditargetkan 17,00. Penetapan target mengacu pada target tahun ke 1 RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Jika dibandingkan dengan realisasi Usia Harapan Hidup (th) di tahun 2022 (67,87), target tahun 2023 ditetapkan meningkat sebesar 0,1, sedangkan realisasi Prevalensi Stunting (%) di tahun 2023 ditargetkan sebesar 17,00. Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tergambar pada tabel 3.66.

Tabel 3. 66

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Usia Harapan Hidup (th)	67,97	72,44	106,58%
Prevalensi Stunting (%)	17,00	14,30	115,88%
Rata-Rata Capaian			111,23%

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Rata-rata capaian indikator kinerja Usia Harapan Hidup (th) dan Prevalensi Stunting (%) dengan tingkat capaian sebesar 111,23% termasuk kategori Sangat Tinggi.

Realisasi indikator kinerja Usia Harapan Hidup (th) tahun 2023 diukur berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dimana data Usia Harapan Hidup 72,44 berarti bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk hidup hingga usia 72,44 tahun. Realisasi indikator kinerja Prevalensi Stunting (%) berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa Prevalensi Stunting (%) Kabupaten Pasaman Barat adalah 14,30%. Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Usia Harapan Hidup (th)

Derajat kesehatan penduduk dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbidity). Angka mortalitas menunjukkan jumlah satuan kematian per 1000 individu per tahun. Usia Harapan Hidup (th) dapat menunjukkan tingkat kematian yang dilihat dari sisi harapan hidupnya.

Pencapaian indikator kinerja Usia Harapan Hidup (th) Kabupaten Pasaman Barat tergambar pada tabel 3.67.

Tabel 3. 67

Capaian Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup (th)

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Usia Harapan Hidup (th)	67,97	72,44	106,58%

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Pada tahun 2023 capaian Usia Harapan Hidup (th) Pasaman Barat sebesar 72,44 tahun, meningkat 4,19 poin dari tahun 2022 atau tumbuh sebesar 6,02%.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Usia Harapan Hidup (th) tahun 2021-2023 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.68.

Tabel 3. 68
Perbandingan realisasi tahun 2021-2023 dan target 2026 indikator kinerja Usia Harapan Hidup (th)

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	Usia Harapan Hidup (th)	72,44	68,25	67,94	106,58%	100,56%	100,13%	68,27

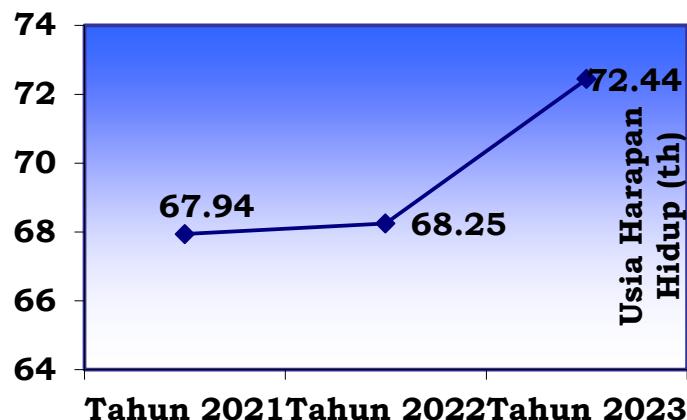
Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Realisasi Usia Harapan Hidup (th) tahun 2023 adalah 72,44 dengan capaian 106,58% termasuk kategori Sangat Tinggi. Realisasi Usia Harapan Hidup (th) tahun 2021–2023 menunjukkan tren positif, begitu juga dengan capaian kinerja tahun 2021–2023 juga menunjukkan tren yang positif.

Untuk tahun 2026, Usia Harapan Hidup (th) ditargetkan 68,27 atau berada 4,17 poin di bawah realisasi tahun 2023. Realisasi Usia Harapan Hidup (th) sebesar 72,44 menunjukkan pencapaian 106,1% dari target tahun 2026. Dengan memperhatikan realisasi tahun 2023, target Usia Harapan Hidup (th) tahun 2026 telah tercapai.

Gambaran Usia Harapan Hidup (th) Kabupaten Pasaman Barat 2021-2023 disajikan pada gambar 3.6.

Gambar 3. 6
Usia Harapan Hidup (th) Kabupaten Pasaman Barat 2021-2023



Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa Usia Harapan Hidup (th) Kabupaten Pasaman Barat 2021-2023 terus mengalami peningkatan. Usia Harapan Hidup (th) tahun 2022 meningkat 0,31 poin dari tahun 2021, sedangkan di tahun 2023 Usia Harapan Hidup (th) naik 4,19 dari tahun 2022.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Usia Harapan Hidup (th) tahun 2023 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional digambarkan pada tabel 3.69.

Tabel 3. 69

Perbandingan Realisasi Usia Harapan Hidup (th) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dan Indonesia

Daerah	Usia Harapan Hidup (th)
	2023
Pasaman Barat	72,44
Sumatera Barat	74,14
Indonesia	73,93

Sumber data: Badan Pusat Statistik 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Usia Harapan Hidup (th) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 masih berada di bawah Provinsi Sumatera Barat maupun nasional. Usia Harapan Hidup (th) Kabupaten Pasaman Barat berada 1,7 poin di bawah Usia Harapan Hidup (th) Provinsi Sumatera Barat dan 1,49 poin di bawah Usia Harapan Hidup (th) Indonesia.

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja Usia Harapan Hidup (th) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi dan kalori.
4. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.
5. Meningkatnya Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.

2. Prevalensi Stunting (%)

Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya. Prevalensi Stunting (%) (pendek dan sangat pendek) di Kabupaten Pasaman Barat didasarkan pada hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

Pencapaian indikator kinerja Prevalensi Stunting (%) Kabupaten Pasaman Barat tergambar pada tabel 3.70.

Tabel 3. 70

Capaian Indikator Kinerja Prevalensi Stunting (%)

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Prevalensi Stunting (%)	17,00	14,30	115,88%

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Pada tahun 2023 capaian Prevalensi Stunting (%) Pasaman Barat sebesar 115,88%, tumbuh sebesar 102,72% dari tahun 2022.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Prevalensi Stunting (%) tahun 2021-2023 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.71.

Tabel 3. 71

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Prevalensi Stunting (%)

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	Prevalensi Stunting (%)	14,30	35,50	18,40	115,88%	13,16%	110,68	13

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

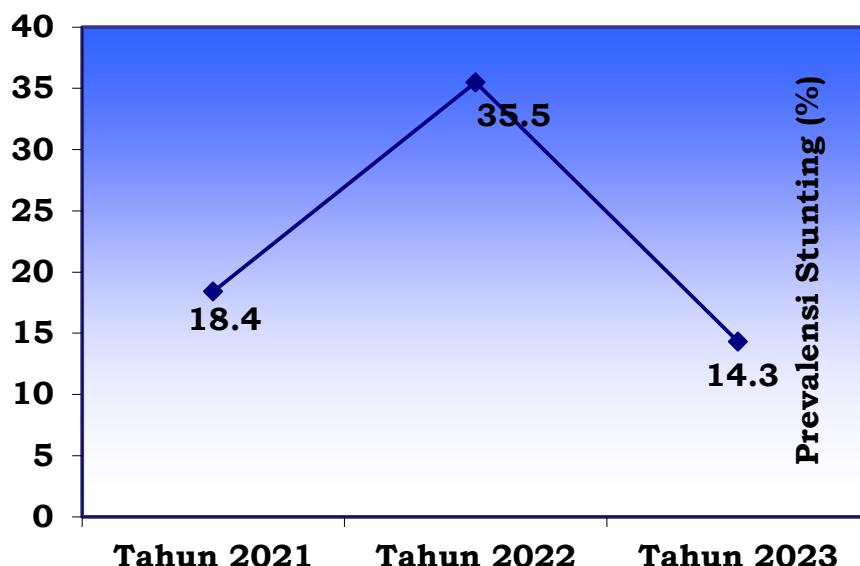
Realisasi Prevalensi Stunting (%) tahun 2023 adalah 14,30 dengan capaian 115,88% termasuk kategori Sangat Tinggi. Realisasi Prevalensi Stunting (%) tahun 2022–2023 menunjukkan peningkatan meningkat 21,20 poin dari realisasi tahun 2022.

Untuk tahun 2026, Prevalensi Stunting (%) ditargetkan 13 atau lebih rendah 1,30 poin dari realisasi tahun 2023. Realisasi Prevalensi Stunting (%) sebesar 14,30 menunjukkan pencapaian 90% dari target tahun 2026. Dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memerlukan upaya yang optimal untuk mencapai target Prevalensi Stunting (%) tahun 2026.

Gambaran Prevalensi Stunting (%) Kabupaten Pasaman Barat 2021-2023 disajikan pada gambar 3.7.

Gambar 3. 7

Prevalensi Stunting (%) Kabupaten Pasaman Barat 2021-2023



Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa Prevalensi Stunting (%) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 meningkat 17,1 poin dari tahun 2021, sedangkan di tahun 2023 Prevalensi Stunting (%) sama dengan tahun 2022.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Prevalensi Stunting (%) tahun 2023 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional digambarkan pada tabel 3.72.

Tabel 3. 72

Perbandingan realisasi Prevalensi Stunting (%) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dan Indonesia

Daerah	Prevalensi Stunting (%) 2023
Pasaman Barat	14,30
Sumatera Barat	25,20
Indonesia	21,60

Sumber data: Badan Pusat Statistik 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Prevalensi Stunting (%) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 masih berada di atas Provinsi Sumatera Barat maupun nasional. Prevalensi Stunting (%) Kabupaten Pasaman Barat berada 10,9 poin di atas

Prevalensi Stunting (%) Provinsi Sumatera Barat dan 7,3 poin di atas Prevalensi Stunting (%) Indonesia.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk menekan angka stunting di Kabupaten Pasaman Barat antara lain meningkatkan koordinasi, integrasi dan konvergensi antar lembaga, advokasi yang intens juga diperlukan untuk mendorong semua pihak peduli dengan isu ini. Contoh upaya yang telah dilakukan adalah lahirnya Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 33 Tentang Aksi Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Pasaman Barat.

SASARAN STRATEGIS 2.2.3

TERWUJUDNYA PENDUDUK YANG TUMBUH SEIMBANG DAN BERKUALITAS

Salah satu sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk (%). Laju Pertumbuhan Penduduk (%) adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dengan persentase dari penduduk dasar. Pertumbuhan penduduk memang tidak bisa dihindari, namun laju pertumbuhannya bisa dikendalikan, salah satunya dengan Program Keluarga Berencana (KB) yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 1970-an. Tujuan dari program ini selain mengendalikan pertumbuhan penduduk juga meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Laju Pertumbuhan Penduduk (%) dapat dihitung menggunakan tiga metode yaitu aritmatik, geometrik dan eksponensial. Metode yang sering digunakan di BPS adalah metode geometrik. Instrumen pengukuran Laju Pertumbuhan Penduduk (%) adalah Jumlah penduduk tahun t, Jumlah penduduk tahun awal dan periode waktu antara tahun dasar dan tahun t.

Laju Pertumbuhan Penduduk (%) pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 1,22. Penetapan target ini mengacu pada target RPJMD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) target 1,22% terealisasi 1,50% dengan tingkat capaian 77,05% termasuk kategori tinggi.

Pencapaian sasaran strategis Terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas tergambar pada tabel 3.73.

Tabel 3. 73

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,22%	1,50	77,05

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Realisasi Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk (%) tahun 2023 terealisasi 1,50 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 77,05%. Pencapaian realisasi indikator ini merujuk pada Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2024.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk (%) tahun 2021-2023 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.74.

Tabel 3. 74

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

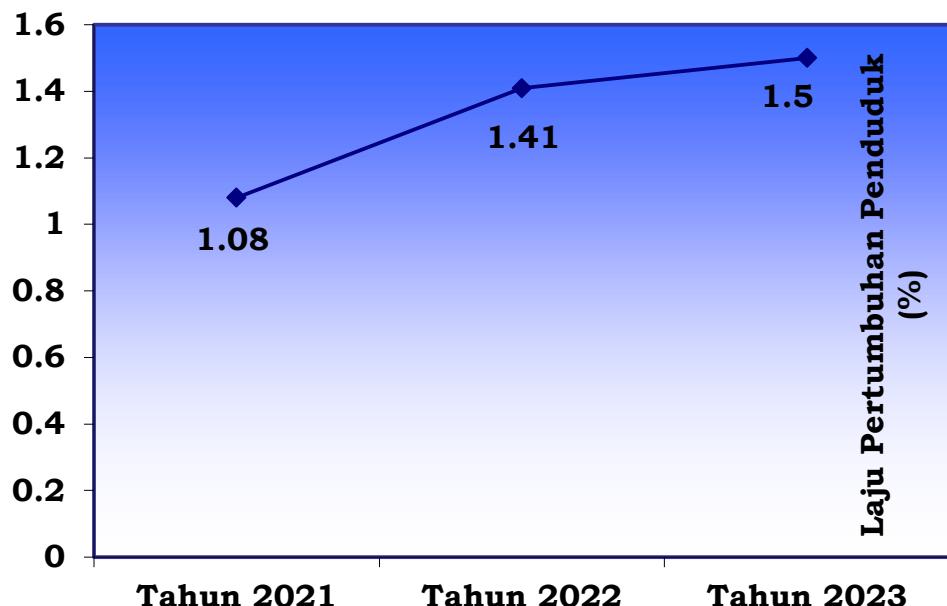
No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,50	1,41	1,08	77,05%	87,23%	112,90%	1,2

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Realisasi indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk (%) tahun 2023 adalah 1,50% dengan capaian 77,05% termasuk kategori Tinggi. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, Laju Pertumbuhan Penduduk (%) tahun 2023 meningkat sebesar 0,09. Jika dibandingkan dengan target 2026 sebesar 1,2, diperlukan upaya untuk mengejar target agar target tahun terakhir RPJMD tersebut tercapai. Jika melihat tren beberapa tahun terakhir yang menunjukkan penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (%), target tahun 2026 optimis dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan upaya yang optimal bersama pihak terkait.

Gambaran Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Kabupaten Pasaman Barat 2021-2023 disajikan pada gambar 3.8.

Gambar 3. 8
Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Kabupaten Pasaman Barat 2021-2023



Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 naik 0,33 poin dari tahun 2021, sedangkan di tahun 2023 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) meningkat 0,09 poin dari tahun 2022.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk (%) tahun 2023 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional digambarkan pada tabel 3.75.

Tabel 3. 75
Perbandingan realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dan Indonesia

Daerah	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 2023
Pasaman Barat	1,50
Sumatera Barat	1,45
Indonesia	1,13

Sumber data: Badan Pusat Statistik 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 berada 0,05 poin di bawah Laju Pertumbuhan

Penduduk (%) Provinsi Sumatera Barat dan 0,37 poin di bawah Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Indonesia.

Dalam upaya untuk menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah mengupayakan :

1. Melaksanakan program Bangga Kencana atau Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
2. Melaksanakan pembinaan pada kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
3. Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB pada fasilitas-fasilitas kesehatan.

Untuk menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (%) di masa yang akan datang perlu diupayakan hal-hal berikut ini :

1. Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.
2. Meningkatkan kebijakan dan layanan dalam pengendalian penduduk dan KB.
3. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola program KB.
4. Meningkatkan pemenuhan hak anak.
5. Meningkatkan perlindungan khusus anak.



MISI 3
MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN
YANG TANGGUH, BERDAYA
SAING, DAN INKLUSIF



TUJUAN 3.1
MENDORONG PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN
DAERAH DAN PEMERATAAN PENDAPATAN

Untuk mewujudkan visi "Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera", salah satu misi Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasaman Barat periode 2021-2026 adalah Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif.

Upaya yang dilakukan dalam Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif adalah dengan mewujudkan pemerataan pendapatan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk melihat pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan di Kabupaten Pasaman barat, digunakan dua indikator yang dijadikan alat ukur yaitu Indeks Gini dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).

Pencapaian tujuan Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan tergambar pada tabel 3.76.

Tabel 3. 76

**Capaian Indikator Kinerja Tujuan Mendorong Pertumbuhan Perekonomian
Daerah Dan Pemerataan Pendapatan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Gini	0,255	0,238	106,67%
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,26	4,33	101,64%
Rata-rata Capaian			104,16%

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Rata-rata capaian indikator kinerja tujuan Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan adalah sebesar 104,16% termasuk kategori keberhasilan sangat tinggi. Uraian masing-masing indikator kinerja tujuan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Indeks Gini

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah adanya peningkatan kesejahteraan ditandai dengan terjadinya pemerataan pendapatan. Jurang pemisah (gap) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin menandakan kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya. Tolak ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau *Gini Ratio*.

Kriteria kesenjangan/ketimpangan dirinci sebagai berikut:

- Ketimpangan Rendah = $G < 0,30$
- Ketimpangan Sedang = $0,30 \leq G \leq 0,50$

- Ketimpangan Tinggi = $G > 0,50$

Berdasarkan kriteria di atas, apabila angka semakin mendekati nol, maka ketimpangan pendapatan semakin rendah. Artinya, upaya penurunan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin baik.

Pencapaian indikator kinerja Indeks Gini tergambar pada tabel 3.77.

Tabel 3. 77

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Gini

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Gini	0,255	0,238	106,67%

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Gini tahun 2023 terealisasi 0,238 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 106,67%. Pencapaian realisasi indikator ini merujuk pada Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2024.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Gini tahun 2021-2023 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.78.

Tabel 3. 78

Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Indeks Gini

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	Indeks Gini	0,238	0,277	0,261	106,67%	91,79%	98,44%	0,251

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Realisasi indikator kinerja Indeks Gini tahun 2023 adalah 0,238 dengan capaian 106,67% berada pada kriteria **Ketimpangan Rendah**. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, Indeks Gini tahun 2023 turun sebesar 0,039. Jika dibandingkan dengan target 2026 sebesar 0,251, realisasi indikator kinerja Indeks Gini tahun 2023 telah tercapai di atas target tahun terakhir RPJMD. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan berupaya untuk mempertahankan capaian tersebut.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Gini Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dan Nasional digambarkan pada tabel 3.79.

Tabel 3. 79
Perbandingan realisasi Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dan
Nasional indikator kinerja Indeks Gini

Daerah	Indeks Gini	
	2022	2023
Pasaman Barat	0,277	0,238
Sumatera Barat	0,300	0,280
Indonesia	0,384	0,388

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Indeks Gini Kabupaten Pasaman Barat masih lebih rendah daripada Provinsi Sumatera Barat (0,280) dan Nasional (0,388) pada tahun 2023. Semakin membaiknya tingkat ketimpangan di Kabupaten Pasaman Barat dapat diasumsikan dengan adanya usaha perbaikan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selalu berupaya untuk menurunkan Indeks Gini secara berkelanjutan. Upaya tersebut antara lain :

1. Memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan dan kesehatan.
2. Pemerataan pembangunan khususnya pada sektor pariwisata.
3. Mempermudah izin UMKM di daerah wisata.
4. Perbaikan infrastruktur menuju lokasi wisata.
5. Pengendalian inflasi, baik dari harga bahan pokok maupun harga sawit.

Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam upaya menurunkan Indeks Gini di tahun 2023 adalah :

1. Belum optimalnya sejumlah program dan kegiatan yang direncanakan.
2. Efisiensi anggaran yang diakibatkan oleh defisit anggaran.
3. Faktor migrasi masuk penduduk dengan penghasilan menengah-atas sedangkan pendapatan masyarakat golongan menengah belum meningkat.

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi berikutnya adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) yang terlihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) suatu daerah. Pertumbuhan PDRB menggambarkan kinerja perekonomian suatu daerah pada suatu periode tertentu.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) diukur dengan menghitung pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan.
2. Pertambangan dan Penggalian.
3. Industri Pengolahan.
4. Listrik, Gas dan Air Bersih.
5. Konstruksi.
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran.
7. Pengangkutan dan Komunikasi.
8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan.
9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

Perhitungan laju pertumbuhan PDRB dilakukan dengan membandingkan nilai Rupiah PDRB tahun sebelumnya (n-1) dengan PDRB tahun pengukuran (n), sebagaimana disajikan sebagai berikut :

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB ADHK} = \frac{(PDRB \text{ th } n - PDRB \text{ th } n - 1)}{PDRB \text{ th } n - 1} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Pasaman Barat adalah Rp. 12.158.616,61 (Juta), sedangkan pada tahun 2023 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Pasaman Barat mengalami kenaikan menjadi Rp. 12.684.894,15 (juta). Artinya, PDRB Kabupaten Pasaman Barat tumbuh 4,33% pada Tahun 2023.

Pencapaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) tergambar pada tabel 3.80.

Tabel 3. 80
Realisasi Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,26	4,33	101,64%

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Realisasi indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) tahun 2023 terealisasi 4,33 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 101,64%. Pencapaian realisasi indikator ini merujuk pada Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2024.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) tahun 2021-2023 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.81.

Tabel 3. 81
Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 Dan Target 2026 Indikator Kinerja
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

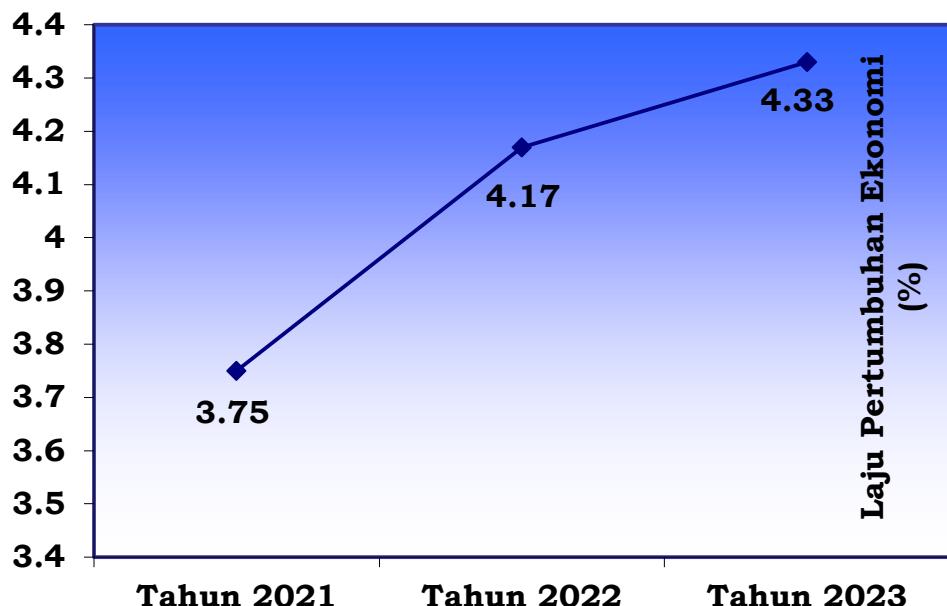
No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,33	4,17	3,75	101,64%	140,40%	133,45%	4,84

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Realisasi indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) tahun 2023 adalah 4,33 dengan capaian 101,64%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) tahun 2023 naik sebesar 0,16. Jika dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 4,84, perlu mengejar target 0,51 lagi agar target tahun terakhir RPJMD tersebut dapat tercapai. Berdasarkan hal tersebut, target tahun 2026 optimis dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan upaya yang optimal bersama pihak terkait untuk meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%).

Gambaran Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Pasaman Barat 2021-2023 disajikan pada gambar 3.9.

Gambar 3. 9
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Pasaman Barat 2021-2023



Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Pasaman Barat 2021-2023 terus mengalami peningkatan. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) tahun 2022 naik 0,42 poin dari tahun 2021, sedangkan di tahun 2023 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) naik 0,16 poin dari tahun 2022.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) tahun 2023 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional digambarkan pada tabel 3.82.

Tabel 3. 82

Perbandingan Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dan Indonesia

Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 2023
Pasaman Barat	4,33
Sumatera Barat	4,62
Indonesia	5,04

Sumber data: Badan Pusat Statistik 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 masih berada di bawah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Pasaman Barat

berada 0,29 poin di bawah Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Sumatera Barat dan 0,71 poin di bawah Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selalu berupaya untuk terus meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) secara berkelanjutan. Upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan infrastruktur dengan membangun dan memperbaiki jalan, jaringan internet, dan pasokan listrik.
2. Meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga kerja.
3. Meningkatkan iklim investasi dengan menyederhanakan proses perizinan usaha dan meningkatkan keamanan.
4. Meningkatkan promosi potensi daerah dengan menyebarkan informasi tentang potensi ekonomi Pasaman Barat dan melakukan promosi yang lebih efektif.

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) adalah sebagai berikut :

1. Infrastruktur yang terbatas, seperti kondisi jalan masih banyak yang rusak dan belum tersambung antar daerah, sehingga menghambat distribusi barang dan jasa, serta jaringan internet yang masih belum merata, sehingga menghambat perkembangan ekonomi digital.
2. Sumber Daya Manusia yang terbatas dikarenakan tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah, sehingga menghambat pengembangan sumber daya manusia.
3. Promosi potensi daerah yang kurang efektif sehingga belum menarik banyak investor.

Untuk mencapai tujuan Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan, telah ditetapkan 3 sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 3.1.1 PENGENTASAN KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang bisa ditimbulkan dari berbagai faktor seperti faktor ekonomi dan pendidikan. Kemiskinan tersebut akan

berdampak pada timbulnya berbagai masalah menuju kesejahteraan, seperti daya beli rendah, kebutuhan gizi standar, rentan penyakit menular, kriminalitas dan rumah tidak layak huni.

Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih besar agar kondisi ekonomi Pasaman Barat dapat meningkat. Jika kelompok masyarakat miskin dapat diatasi, maka tujuan Pasaman Barat bebas dari kemiskinan dalam arti sesungguhnya dapat diwujudkan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan Pengentasan kemiskinan sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan.

Tingkat kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*). Artinya, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam golongan miskin atau tidak miskin digunakan garis kemiskinan (Maret 2023) Rp. 596.225,- (kapita/bulan). Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar 51.396 di tahun 2023.

Pencapaian sasaran strategis Pengentasan Kemiskinan tergambar pada tabel 3.83.

Tabel 3. 83

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pengentasan Kemiskinan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
% Penduduk Miskin	6,96	6,92	100,57%

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Tingkat kemiskinan pada tahun 2023 ditargetkan akan tercapai 6,96. Penetapan target ini mengacu pada target tahun ke 1 RPJMD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026. Tingkat kemiskinan tahun 2023 target 6,96 terealisasi 6,92 dengan tingkat capaian 100,57% termasuk kategori keberhasilan memuaskan. Realisasi ini diukur berdasarkan data tingkat kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Perbandingan realisasi indikator kinerja % Penduduk Miskin tahun 2021-2023 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.84.

Tabel 3. 84
Perbandingan realisasi tahun 2021-2023 dan target 2026 indikator kinerja % Penduduk Miskin

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	% Penduduk Miskin	6,92	6,93	7,51	100,57%	101%	93,02%	6,58

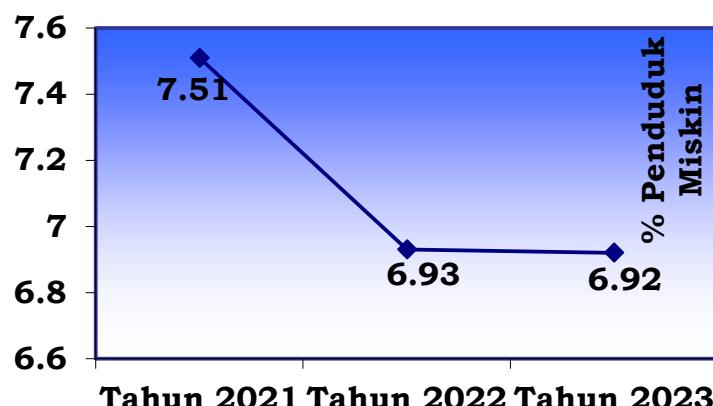
Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Realisasi indikator kinerja % Penduduk Miskin tahun 2023 adalah 6,92, tercapai di atas target yang ditetapkan sehingga capaian indikator kinerjanya >100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, % Penduduk Miskin tahun 2023 turun sebesar 0,01. Hal ini menunjukkan berkurangnya jumlah penduduk miskin di tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan target 2026 sebesar 6,58, diperlukan upaya untuk mengejar target 0,34 lagi agar target tahun terakhir RPJMD tersebut tercapai. Jika melihat tren beberapa tahun terakhir yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan, target tahun 2026 optimis dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan upaya yang optimal bersama pihak terkait untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Gambaran % Penduduk Miskin Kabupaten Pasaman Barat 2021-2023 disajikan pada gambar 3.10.

Gambar 3. 10
% Penduduk Miskin Kabupaten Pasaman Barat 2021-2023



Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa % Penduduk Miskin Kabupaten Pasaman Barat 2021-2023 terus mengalami penurunan. % Penduduk Miskin tahun 2022 turun 0,58 poin dari tahun 2021, sedangkan di tahun 2023 % Penduduk Miskin turun 0,01 dari tahun 2022.

Perbandingan realisasi indikator kinerja % Penduduk Miskin tahun 2023 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional digambarkan pada tabel 3.85.

Tabel 3. 85

Perbandingan Realisasi % Penduduk Miskin Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dan Indonesia

Daerah	% Penduduk Miskin 2023
Pasaman Barat	6,92
Sumatera Barat	5,95
Indonesia	9,36

Sumber data: Badan Pusat Statistik 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa % Penduduk Miskin Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 berada 0,97 poin di atas % Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Barat dan 2,44 poin di bawah % Penduduk Miskin Indonesia.

Keberhasilan dalam menekan angka kemiskinan tidak lepas dari keterlibatan banyak pihak dan upaya dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Adapun upaya yang dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan sektor pariwisata.
2. Mendorong meningkatnya usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, usaha perdagangan dan industri kecil/menengah.
4. Melakukan kolaborasi dengan stakeholder lainnya seperti BAZNAS daerah dan juga LAZ daerah untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan penduduk miskin dengan mengkombinasikan program-program sosial dari pemerintah daerah dengan program-program pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang ada pada lembaga zakat.

Adapun upaya yang akan dilaksanakan pada masa mendatang guna menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat diantaranya adalah :

1. Melaksanakan program kendali cepat jangka pendek berupa bantuan jaringan pengamanan sosial, berupa pangan dan keringanan terhadap kebutuhan mendasar non pangan lainnya. Kebijakan ini dilakukan secara berkala, dengan sasaran semakin berkurang secara bertahap.
2. Program jangka menengah juga diberikan berupa stimulus insentif pada UMKM dalam bentuk keringanan pajak, penurunan suku bunga pinjaman, dan insentif permodalan.
3. Jangka panjang, dengan memberikan keringanan mengakses permodalan, infrastruktur penunjang, dan penciptaan iklim pasar yang kondusif.
4. Agar program mencapai sasaran yang tepat dan dilakukan secara efektif dan efisien, maka diperlukan pemutakhiran (*update*) data kependudukan untuk mendapatkan orang, jumlah dan wilayah sasaran yang sesuai.

SASARAN STRATEGIS 3.1.2 PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Perluasan kesempatan kerja adalah salah satu cara mengatasi masalah pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu masalah sosial yang bisa ditimbulkan dari berbagai faktor seperti faktor ekonomi dan pendidikan. Pengangguran tersebut akan berdampak pada timbulnya berbagai masalah menuju kesejahteraan, seperti daya beli rendah, kebutuhan gizi standar, rentan penyakit menular, kriminalitas dan rumah tidak layak huni.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (%) sebagai indikator kinerja yang harus dicapai untuk mewujudkan sasaran Perluasan kesempatan kerja. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (%) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Pencapaian sasaran strategis Perluasan kesempatan kerja disajikan pada tabel 3.86.

Tabel 3. 86

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perluasan Kesempatan Kerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,19	6,01	56,56%

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Untuk tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (%) ditargetkan 4,19%, berada 2,14 di bawah tingkat pengangguran tahun 2022 (6,33%). Penetapan target ini mengacu pada target RPJMD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026. Indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (%) tahun 2023 terealisasi sebesar 6,01% dengan tingkat capaian sebesar 56,56% termasuk kategori rendah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) diukur dengan membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{13.097}{217.797} \times 100\% = 6,01$$

Ket: Jumlah pengangguran = 13.097 orang

Jumlah angkatan kerja = 217.797 orang

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 217.797 orang, naik 6.573 orang dari periode tahun 2022 (211.224 orang). Komponen pembentukan angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan yang menganggur. Jumlah penduduk yang bekerja 204.700 orang, sedangkan yang menganggur sebanyak 13.097 orang. Jika dibandingkan dengan periode tahun 2022, jumlah penduduk yang bekerja tahun 2023 naik sebanyak 6.853 orang, sedangkan penduduk yang menganggur turun sebanyak 280 orang. Kondisi tersebut mendorong Tingkat Pengangguran Terbuka (%) tahun 2023 turun dibandingkan periode yang sama tahun 2022.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (%) tahun 2021-2023 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.87.

Tabel 3. 87

Perbandingan Realisasi Tahun 2022-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,01	6,33	5,03	56,56%	54,48%	86,71%	3,69

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

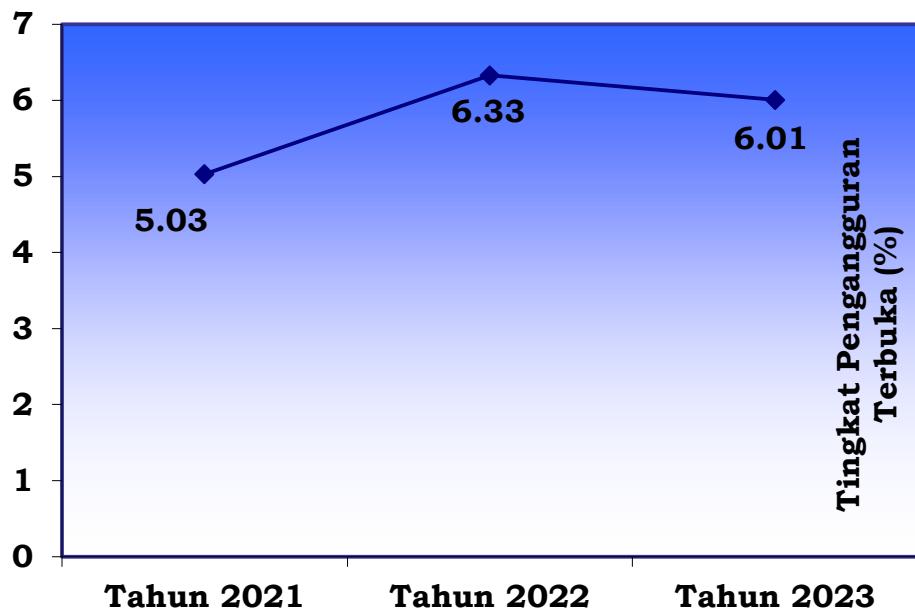
Realisasi indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (%) tahun 2023 adalah 6,01, tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga capaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (%) <100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (%) tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,32%. Untuk capaian kinerja tahun 2022-2023 menunjukkan peningkatan sebesar 15,23%.

Jika dibandingkan dengan target 2026 sebesar 3,69, perlu mengejar target 2,32 lagi agar target tahun terakhir RPJMD tersebut dapat tercapai. Jika melihat tren 2022-2023 yang menunjukkan menurunnya angka pengangguran, target tahun 2026 optimis dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan upaya yang optimal bersama pihak terkait untuk menurunkan tingkat pengangguran.

Gambaran Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Pasaman Barat 2021-2023 disajikan pada gambar 3.11.

Gambar 3. 11

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Pasaman Barat



Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 naik 1,3 poin dari tahun 2021, sedangkan di tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) turun 0,32 dari tahun 2022.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (%) tahun 2023 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional digambarkan pada tabel 3.88.

Tabel 3. 88
Perbandingan realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten
Pasaman Barat, Sumatera Barat, dan Indonesia

Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2023
Pasaman Barat	6,01
Sumatera Barat	5,94
Indonesia	5,32

Sumber data: Badan Pusat Statistik 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 masih berada di atas Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) tahun 2023 berada 0,07 poin di atas Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Sumatera Barat dan 0,69 poin di atas Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selalu berupaya untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) secara berkelanjutan. Upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Membangun Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai tempat pelatihan bagi pencari kerja.
2. Memberikan pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan skil dan keterampilan pencari kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau untuk usaha sendiri seperti pelatihan Satpam, pelatihan perbengkelan, pelatihan TIK dan kelistrikan.
3. Menjalankan kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dengan memberikan pelatihan dan bantuan usaha agar para penganggur bisa membuka usaha sendiri seperti pelatihan tata boga dan pelatihan menjahit.

Permasalahan yang dihadapi dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) adalah sebagai berikut :

1. Gaji yang diberikan masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
2. Tidak seimbangnya antara jumlah lowongan pekerjaan yang ada dengan jumlah pengangguran.
3. Antara lowongan pekerjaan yang ada dengan pendidikan lulusan tidak sesuai.
4. Berkurangnya anggaran berdampaknya pada pengurangan anggaran kegiatan untuk pelatihan bagi pencari kerja.

5. Tambahan angkatan kerja setiap tahunnya belum disertai dengan ketersediaan lapangan kerja baru sehingga menyebabkan banyaknya tenaga kerja sektor informal.
6. Masih rendahnya jumlah perusahaan/industri dan peluang kerja di Pasaman Barat.
7. Masih rendahnya kompetensi SDM pencari kerja di Pasaman Barat yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja/industri.

Beberapa strategi yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka kedepannya antara lain :

1. Membentuk program *Skill Development Centre* (SDC) melibatkan semua unsur yang terkait untuk menekan angka pengangguran dan membentuk Tim Perencanaan Tenaga Kerja Daerah/TPKD (Dinas Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik, Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwista serta stakeholder lain yang terkait).
2. Mengupayakan pembayaran gaji di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) atau minimal setara dengan UMP.
3. Mengupayakan peningkatan anggaran untuk pelatihan produktifitas dan kegiatan lain yang menyangkut dengan penurunan angka pengangguran.
4. Meningkatkan sosialisasi tentang ketenagakerjaan.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) untuk pelaksanaan pelatihan.

SASARAN STRATEGIS 3.1.3 **PENGUATAN INDUSTRI BERBASIS KOMODITAS** **UNGGULAN LOKAL**

Penguatan industri berbasis komoditas unggul lokal dilihat dari PDRB per Kapita pendapatan masyarakat, yang merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk dan tingkat pembangunan sebuah daerah. Pendapatan per Kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan pembangunan sebuah daerah. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar pula kemungkinan daerah itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi. Pendapatan per kapita juga

merefleksikan PDRB per Kapita. Karena data *Total Personal Income*/Pendapatan per Kapita Total sebuah daerah jarang sekali ada, sehingga PDRB per Kapita lebih sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur pendapatan masyarakat. Pencapaian sasaran strategis Penguatan industri berbasis komoditas unggulan lokal disajikan pada tabel 3.89.

Tabel 3. 89
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1.3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta)	41,53	43,43	104,58

Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Tahun 2023, PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta) ditargetkan tercapai 41,53 juta rupiah. Penetapan target PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta) mengacu pada target RPJMD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026. Target ini meningkat 1,23 juta rupiah dari PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta) tahun 2022 (40,30 juta rupiah). PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta) target 41,53 juta rupiah, terealisasi 43,43 juta rupiah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 104,58% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Perbandingan realisasi indikator kinerja PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta) tahun 2021-2023 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.90.

Tabel 3. 90
Perbandingan Realisasi Tahun 2021-2023 dan Target 2026 Indikator Kinerja PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta)

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian			Target
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	
1	PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta)	43,43	40,30	36,47	104,58%	102,46%	96,71%	46,17 juta

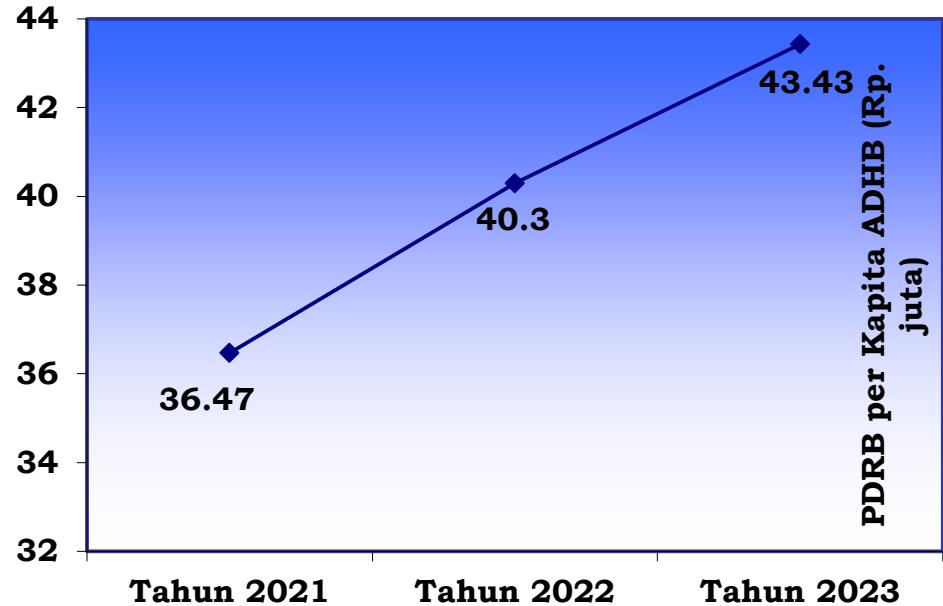
Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Realisasi PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta) tahun 2023 adalah 43,43 juta dengan capaian 104,58% termasuk kategori Sangat Tinggi. PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta) tahun 2023 meningkat 3,13 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2022. Sama halnya dengan realisasi, capaian indikator kinerja PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta) tahun 2022-2023 juga menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 2,09%.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah di tahun 2026 sebesar 46,17 juta rupiah, dibutuhkan pencapaian sebesar 2,76 juta rupiah lagi selama lima tahun ke depan. Seiring dengan pertumbuhan Pendapatan per Kapita ADHB (Rp. juta) tahun 2023, target 2026 optimis dapat dicapai.

Gambaran PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta) Kabupaten Pasaman Barat 2021-2023 disajikan pada gambar 3.12.

Gambar 3. 12
PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta) Kabupaten Pasaman Barat



Sumber data : Bagian Organisasi, data diolah

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta) Kabupaten Pasaman Barat 2021-2023 terus mengalami peningkatan. PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta) tahun 2022 naik 3,83 juta dari tahun 2021, sedangkan di tahun 2023 PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta) naik 3,12 juta dari tahun 2022.

Perbandingan realisasi indikator kinerja PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta) tahun 2023 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional digambarkan pada tabel 3.91.

Tabel 3. 91
Perbandingan realisasi PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dan Indonesia

Daerah	PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta) 2023
Pasaman Barat	43,43

Sumatera Barat	54,33
Indonesia	75,00

Sumber data: Badan Pusat Statistik 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 masih berada di bawah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta) tahun 2023 berada 10,91 juta di bawah PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta) Provinsi Sumatera Barat dan 31,58 juta di bawah PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta) Indonesia.

Dalam meningkatkan Pendapatan per Kapita masyarakat Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 masih banyak hambatan yang dihadapi, diantaranya :

1. Melambatnya pertumbuhan pada sektor pertanian yang diakibatkan oleh keterbatasan infrastruktur serta sarana dan prasarana pertanian, belum optimalnya pengamanan produksi dari gagal panen, serta kurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan.
2. Belum optimalnya pertumbuhan pada sektor pariwisata yang diakibatkan oleh masih terbatasnya infrastruktur di lokasi-lokasi pariwisata.
3. Pada sektor industri, masih kurangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan produksi sektor industri dibandingkan sektor usaha lainnya.
4. Pada sektor perdagangan, masih belum optimalnya fasilitasi bagi pedagang dan pelaku ekonomi kreatif serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri.

Dalam menumbuhkan ekonomi Kabupaten Pasaman Barat agar pendapatan masyarakat meningkat, dilakukan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana pertanian yang memadai serta meningkatkan akses jaringan pemasaran bagi para petani.
2. Mengedukasi dan mengembangkan digitalisasi UKM secara optimal, salah satunya strategi penjualan melalui platform digital seperti media sosial atau e-commerce.
3. Membangun infrastruktur pariwisata seperti akses jalan yang mumpuni menuju lokasi-lokasi wisata yang jaraknya jauh dari pusat keramaian.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di masa yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan mengupayakan :

1. Menambah infrastruktur serta sarana dan prasarana pada sektor unggulan seperti sektor pertanian, pariwisata dan perdagangan.
2. Mengarahkan penggunaan produk UKM daerah sehingga akan berdampak pada pertumbuhan sektor UKM di Kabupaten Pasaman Barat.
3. Mengoptimalkan hasil produksi unggulan Kabupaten Pasaman Barat.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Jumlah anggaran belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2023 adalah sebesar Rp1.302.298.471.586,00. Dana tersebut digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan yang mendukung pencapaian 4 tujuan dan 12 sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023. Rincian alokasi anggaran untuk masing-masing program dapat dilihat pada tabel 3.92.

Tabel 3. 92
Realisasi Anggaran Menurut Program Tahun 2023

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	716,568,729,091.00	624,423,510,781.55	87.14
2	Program Pengelolaan Pendidikan	126,087,520,903.00	116,367,388,723.04	92.29
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	36,651,450.00	-	-
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	39,610,000.00	36,671,600.00	92.58
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	66,746,468,630.00	51,987,838,308.00	77.89
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,922,200,000.00	1,907,500,000.00	99.24
7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	12,875,971,300.00	11,204,758,311.00	87.02
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	470,000,210.00	249,302,394.00	53.04
9	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	506,633,965.00	220,574,261.80	43.54
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	54,705,234,692.00	54,474,322,416.00	99.58
11	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1,922,200,000.00	1,907,500,000.00	99.24
12	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4,622,864,933.00	3,991,787,296.00	86.35
13	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	2,838,872,545.00	2,130,346,664.00	75.04
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	41,814,000.00	4,368,700.00	10.45

15	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1,100,991,500.00	887,890,500.00	80.64
16	Program Penataan Bangunan Gedung	5,692,361,094.00	5,407,781,356.79	95.00
17	Program Penyelenggaraan Jalan	5,840,138,020.00	5,686,865,910.00	97.38
18	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	74,815,947,411.00	57,583,240,293.00	76.97
19	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	785,718,844.00	497,207,940.00	63.28
20	Program Pengembangan Perumahan	1,759,324,414.00	1,443,698,833.00	82.06
21	Program Kawasan Permukiman	686,767,000.00	308,339,475.00	44.90
25	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	2,879,423,000.00	1,179,366,653.60	40.96
29	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	2,044,523,000.00	1,992,763,750.00	97.47
33	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2,571,174,627.00	559,123,750.00	21.75
37	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	25,050,000.00	14,287,450.00	57.04
41	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	604,900,000.00	581,730,300.00	96.17
45	Program Penanggulangan Bencana	234,778,800.00	220,372,431.00	93.86
53	Program Pemberdayaan Sosial	2,655,715,978.00	1,953,497,026.00	73.56
58	Program Rehabilitasi Sosial	644,297,605.00	612,734,517.91	95.10
62	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	366,307,450.00	293,529,400.00	80.13
65	Program Penanganan Bencana	808,590,300.00	717,209,100.00	88.70
69	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	109,702,450.00	92,401,900.00	84.23
73	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	114,033,730.00	106,587,000.00	93.47
76	Program Penempatan Tenaga Kerja	274,996,464.00	266,124,870.00	96.77
80	Program Hubungan Industrial	13,192,800.00	12,590,000.00	95.43
84	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	651,390,750.00	555,307,390.00	85.25
88	Program Perlindungan Perempuan	42,750,000.00	34,194,700.00	79.99
92	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	37,765,200.00	37,400,500.00	99.03
96	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	96,109,350.00	92,980,721.00	96.74
100	Program Perlindungan Khusus Anak	156,600,640.00	142,705,273.00	91.13
104	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	34,048,350.00	33,064,650.00	97.11
110	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	504,352,850.00	486,455,968.00	96.45
114	Program Penanganan Kerawanan Pangan	128,838,150.00	116,142,274.00	90.15

118	Program Pengawasan Keamanan Pangan	56,950,000.00	56,492,800.00	99.20
122	Program Pengelolaan Izin Lokasi	27,321,000.00	18,132,600.00	66.37
125	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	118,437,500.00	91,404,100.00	77.17
129	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	49,635,500.00	26,177,350.00	52.74
136	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	90,006,200.00	81,347,600.00	90.38
142	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	307,274,335.00	292,758,000.00	95.28
146	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	125,250,000.00	110,807,500.00	88.47
152	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	18,720,000.00	3,594,000.00	19.20
156	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	14,579,900.00	2,732,000.00	18.74
160	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1,843,082,749.00	1,790,226,414.00	97.13
165	Program Pengelolaan Persampahan	1,525,048,920.00	1,437,814,250.00	94.28
169	Program Pendaftaran Penduduk	245,255,200.00	222,449,750.00	90.70
173	Program Pencatatan Sipil	293,843,420.00	270,424,163.00	92.03
178	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	119,510,000.00	58,142,838.00	48.65
182	Program Penataan Desa	896,928,850.00	485,686,292.00	54.15
186	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1,177,335,757.00	694,908,826.00	59.02
192	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	288,027,000.00	198,678,194.00	68.98
196	Program Pengendalian Penduduk	2,539,655,750.00	2,176,621,150.00	85.71
200	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1,996,600,000.00	1,776,743,800.00	88.99
204	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2,475,759,250.00	2,449,776,915.00	98.95
208	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	82,476,500.00	75,229,850.00	91.21
212	Program Pengelolaan Pelayaran	156,928,490.00	149,924,408.00	95.54
217	Program Pengelolaan Penerbangan	1,086,341,600.00	1,073,925,609.00	98.86
221	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1,902,995,440.00	1,902,701,390.00	99.98
225	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	406,770,000.00	399,615,850.00	98.24
229	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	94,950,000.00	94,802,600.00	99.84
232	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	486,207,360.00	449,727,650.00	92.50
238	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	72,716,000.00	64,243,834.00	88.35

242	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	188,106,100.00	186,269,757.00	99.02
247	Program Pelayanan Penanaman Modal	512,881,500.00	462,778,800.00	90.23
251	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	16,268,900.00	15,783,150.00	97.01
256	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	851,130,950.00	783,836,700.00	92.09
259	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	9,120,985,553.00	8,627,347,823.00	94.59
263	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	16,749,450.00	16,706,550.00	99.74
266	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	72,032,000.00	71,929,109.00	99.86
281	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	450,007,350.00	393,088,300.00	87.35
285	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	590,226,750.00	569,734,700.00	96.53
289	Program Pembinaan Sejarah	14,182,000.00	2,615,900.00	18.45
293	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	11,269,500.00	7,279,250.00	64.59
297	Program Pengembangan Kebudayaan	251,367,250.00	246,586,150.00	98.10
301	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	9,855,000.00	8,159,700.00	82.80
306	Program Pembinaan Perpustakaan	257,700,150.00	253,450,488.00	98.35
310	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	48,576,000.00	46,927,900.00	96.61
314	Program Pengelolaan Arsip	1,341,366,000.00	1,336,685,978.00	99.65
318	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	1,458,972,209.00	1,453,580,781.00	99.63
322	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	98,550,000.00	98,422,150.00	99.87
326	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	227,039,300.00	205,435,500.00	90.48
330	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	755,600,000.00	608,386,641.74	80.52
333	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	564,707,150.00	528,325,350.00	93.56
337	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	55,160,000.00	52,900,000.00	95.90
342	Program Pemasaran Pariwisata	2,361,869,589.00	2,254,715,245.00	95.46
346	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	4,697,586,750.00	4,632,295,437.00	98.61
348	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1,662,766,080.00	1,599,088,494.00	96.17
350	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	274,732,214.00	268,567,590.00	97.76
354	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4,579,287,602.00	4,555,723,300.00	99.49
358	Program Penyuluhan Pertanian	433,447,592.00	428,752,450.00	98.92
364	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	28,475,000.00	27,714,400.00	97.33
367	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	28,365,100.00	26,493,350.00	93.40

371	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	415,467,720.00	408,842,190.00	98.41
374	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	5,000,000.00	4,771,500.00	95.43
378	Program Perizinan Usaha Pertanian	700,100,450.00	577,605,380.00	82.50
382	Program Penyuluhan Pertanian	31,700,000.00	30,780,896.00	97.10
385	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	49,150,000.00	38,877,650.00	79.10
389	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	397,458,780.00	384,094,018.00	96.64
394	Program Pengembangan Ekspor	276,585,000.00	254,955,100.00	92.18
398	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	53,360,000.00	46,060,050.00	86.32
402	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	7,355,000.00	6,555,000.00	89.12
406	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	6,424,432,708.00	6,036,439,675.01	93.96
410	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	1,348,540,460.00	1,057,627,375.00	78.43
416	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	13,512,833,750.00	12,336,307,128.00	91.29
420	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	4,814,260,905.00	4,423,147,312.00	91.88
424	Program Perekonomian Dan Pembangunan	620,787,300.00	376,921,653.00	60.72
430	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	639,180,650.00	546,822,451.00	85.55
437	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	110,127,436,004.00	69,428,988,670.00	63.04
441	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	560,220,220.00	475,189,082.00	84.82
449	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2,028,083,576.00	1,928,854,038.00	95.11
458	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,314,300,718.00	1,258,694,663.00	95.77
462	Program Kepegawaian Daerah	225,960,700.00	176,069,060.00	77.92
464	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	779,314,200.00	769,969,601.00	98.80
466	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	184,932,350.00	151,090,500.00	81.70
467	Program Penyelenggaraan Pengawasan	779,314,200.00	769,969,601.00	-
468	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	184,932,350.00	151,090,500.00	81.70
469	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	81,300,000.00	55,958,000.00	68.83
470	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	479,132,950.00	442,114,690.00	92.27
471	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	24,525,000.00	20,670,000.00	84.28
472	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	663,836,300.00	652,115,300.00	98.23
473	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	41,875,000.00	39,000,000.00	93.13

474	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	125,256,000.00	124,883,000.00	99.70
475	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	16,005,906,274.00	15,894,903,274.00	99.31
476	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	84,122,000.00	82,342,400.00	97.88
477	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	469,431,000.00	462,621,719.00	98.55
478	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	516,972,000.00	510,654,408.00	98.78
TOTAL BELANJA DAERAH		1,302,298,471,586.00	1,146,054,807,585.70	88.00

Sumber: BPKAD

Tahun 2023, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp1,3 triliun untuk mencapai 4 tujuan dan 12 sasaran strategis. Dari anggaran tersebut, 88% atau Rp1,14 triliun telah terealisasi, sedangkan sisanya 12% atau Rp156 miliar tidak terserap.

Meskipun realisasi anggaran cukup tinggi, sisa anggaran yang besar menunjukkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan. Sisa anggaran ini seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang memiliki realisasi anggaran rendah dan sisa anggaran yang besar. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui penyebab rendahnya realisasi anggaran dan sisa anggaran, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan di masa depan.

Kurangnya akurasi perencanaan dan penganggaran dapat berdampak pada penurunan kinerja program/kegiatan, ketidakefisienan penggunaan anggaran, dan ketidakmampuan mencapai sasaran strategis.

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan analisis kebutuhan yang lebih mendalam, penyusunan program/kegiatan yang lebih realistik dan terukur, serta peningkatan koordinasi antar unit kerja.

Dengan demikian, anggaran dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi terhadap 27 target indikator kinerja pada 4 tujuan dan 12 sasaran strategis, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan rata-rata capaian 93,91% (kategori Sangat Tinggi). Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan komitmennya dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan dan kendala utama yang perlu diperhatikan. **Pada Misi 1**, realisasi Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Profesionalitas ASN belum mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas birokrasi dan profesionalisme aparatur sipil negara. **Pada Misi 2**, angka kriminalitas meningkat, capaian PASBAR Mengaji belum optimal, dan Indeks Ketahanan Daerah sangat rendah. Peningkatan angka kriminalitas perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Capaian PASBAR Mengaji yang belum optimal menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam meningkatkan literasi Al-Quran di masyarakat. Indeks Ketahanan Daerah yang sangat rendah menunjukkan bahwa daerah ini masih rentan terhadap berbagai ancaman, seperti bencana alam, kerawanan sosial, dan ekonomi. **Pada Misi 3**, tingkat pengangguran terbuka masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak warga yang belum memiliki pekerjaan.

Untuk meningkatkan kinerja, perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja pada indikator-indikator yang belum mencapai target, serta analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab utama permasalahan dan kendala utama. Diharapkan dengan merumuskan strategi dan program yang tepat, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dapat terus meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan pembangunan daerah.

Pada tahun 2023, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp1,3 triliun untuk mencapai 4 tujuan dan 12 sasaran strategis. Dari anggaran tersebut, 88% atau Rp1,14 triliun telah terealisasi, sedangkan sisanya 12% atau Rp156 miliar tidak terserap. Meskipun realisasi anggaran cukup tinggi, sisa anggaran yang besar menunjukkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan. Sisa anggaran ini seharusnya dapat digunakan

untuk meningkatkan capaian indikator kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan agar sisa anggaran dapat digunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja dan sasaran strategis. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang tidak mencapai target dan lakukan perbaikan pada program/kegiatan tersebut. Lakukan kajian untuk mengidentifikasi penyebab utama permasalahan dan kendala utama, dan rumuskan strategi dan program yang tepat untuk mengatasinya. Tingkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan program/kegiatan. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dapat terus meningkat dan mencapai tujuan pembangunan daerah.

4.2 Langkah Untuk Meningkatkan Kinerja di Masa Mendatang

Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah adalah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem AKIP merupakan sistem yang dirancang untuk pengukuran dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah.

Dalam rangka peningkatan kinerja di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selalu mengupayakan penguatan akuntabilitas kinerjanya. Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen *cascading* kinerja baik di level Pemda maupun PD untuk memastikan kualitas penjenjangan kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi hasil sesuai dengan levelnya dengan memerhatikan *logical framework* dan *critical success factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Proses reviu dan perbaikan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan setiap PD dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh setiap PD telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*) dan memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan memnuhi unsur cukup dalam mengawal kinerja;
3. Memanfaatkan hasil perbaikan *cascading* kinerja untuk memilah program dan kegiatan apa saja yang tidak relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai dan berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja organisasi;
4. Mengoptimalkan aplikasi e-sakip sebagai alat untuk monitoring pencapaian kinerja Bupati dan setiap PD sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja lainnya;
5. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN;
6. Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja pada Pemda dan perangkat daerah mengacu pada PermenPAN-RB No. 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/ kegiatan yang mendukung keberhasilan /kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
7. Menginformasikan Laporan Kinerja baik dari level Pemda maupun PD dalam *website* kabupaten sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada publik;
8. Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal menggambarkan kekurangan dan mampu memberikan solusi guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap PD;
9. Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi; dan

10. Menyusun kebijakan *reward and punishment* dengan memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga dapat menjadi penyemangat setiap PD untuk mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP.



LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah:

Nama : H. HAMSUARDI

Jabatan : Bupati Pasaman Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Simpang Empat, 28 Februari 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan daerah Nilai SAKIP Level Maturitas SPIP Tingkat Kapabilitas APIP	WTP B (68) 2,48 3
2.	Terwujudnya Birokrasi yang efisien dan efektif	Indeks Profesionalitas ASN Indeks Maturitas SPBE	75 2,25
3.	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	85
4.	Masyarakat Yang Agamais dan berbudaya	% Capaian PASBAR Mengaji Adat, seni dan budaya yang dilestarikan	65 7
5.	Masyarakat yang rukun dan berkeadilan	Indeks Pembangunan Gender Predikat Kabupaten Peduli HAM Indeks Pemberdayaan Gender	91,03 SP 64,44
6.	Masyarakat Yang Tangguh Menghadapi Bencana	Predikat Kabupaten Layak Anak	Nindya (720)
7.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Ketahanan Daerah Rata-rata lama sekolah (th)	1.60 8,48
8.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Rata-rata harapan lama sekolah (th) Usia Harapan Hidup (th) Prevalensi Stunting (%)	14,50 67,97 17,00
9.	Terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,22%
10.	Pengentasan kemiskinan	% Penduduk Miskin	6,96
12.	Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,19
13.	Penguatan industri berbasis komoditas unggulan lokal	PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta)	41,53

No	Program	Anggaran
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp. 659.941.546.971
2.	Program pengelolaan pendidikan	Rp. 119.786.906.808
3.	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Rp. 36.651.450
4.	Program pengendalian perizinan pendidikan	Rp. 30.610.000
5.	Program pengembangan kesenian tradisional	Rp. 570.615.000
6.	Program pembinaan sejarah	Rp. 14.182.000

No	Program	Anggaran
7.	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Rp. 11.269.500
8.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rp. 106.352.633.699
9.	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rp. 6.701.276.901
10.	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Rp. 486.540.000
11.	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Rp. 156.479.700
12.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Rp. 301.821.500
13.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Rp. 4.528.070.231
14.	Program penyelenggaraan jalan	Rp. 58.139.714.662
15.	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 3.617.166.000
16.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Rp. 2.596.949.000
17.	Program penataan bangunan gedung	Rp. 6.922.622.250
18.	Program pengembangan jasa konstruksi	Rp. 330.686.500
19.	Program penyelenggaraan penataan ruang	Rp. 1.870.506.064
20.	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Rp. 40.314.000
21.	Program pengembangan perumahan	Rp. 27.091.254.400
22.	Program kawasan permukiman	Rp. 1.153.347.500
23.	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Rp. 1.756.608.000
24.	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 488.826.124
25.	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Rp. 25.050.000
26.	Program pengelolaan izin lokasi	Rp. 22.866.000
27.	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Rp. 96.173.500
28.	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Rp. 35.973.000
29.	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Rp. 407.060.000
30.	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Rp. 251.615.200
31.	Program penanggulangan bencana	Rp. 2.229.593.500
32.	Program pemberdayaan sosial	Rp. 588.733.450
33.	Program rehabilitasi sosial	Rp. 538.992.300
34.	Program perlindungan dan jaminan sosial	Rp. 1.306.567.300
35.	Program penanganan bencana	Rp. 127.336.950
36.	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Rp. 137.130.944
37.	Program penempatan tenaga kerja	Rp. 252.160.540
38.	Program hubungan industrial	Rp. 52.378.000

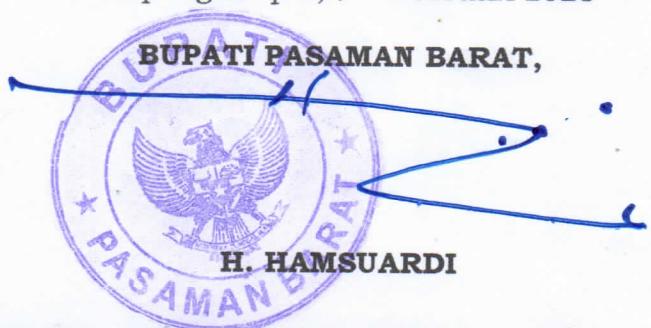
No	Program	Anggaran
39.	Program pengembangan kawasan transmigrasi	Rp. 11.555.000
40.	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Rp. 656.389.750
41.	Program perlindungan perempuan	Rp. 42.750.000
42.	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Rp. 44.735.200
43.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 97.405.000
44.	Program perlindungan khusus anak	Rp. 169.075.640
45.	Program pengendalian penduduk	Rp. 288.027.000
46.	Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 2.567.205.750
47.	Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 2.004.600.000
48.	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Rp. 35.089.250
49.	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Rp. 632.358.550
50.	Program penanganan kerawanan pangan	Rp. 108.593.200
51.	Program pengawasan keamanan pangan	Rp. 51.650.000
52.	Program perencanaan lingkungan hidup	Rp. 451.139.400
53.	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Rp. 99.439.200
54.	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Rp. 324.280.000
55.	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 125.250.000
56.	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Rp. 24.520.000
57.	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Rp. 24.601.900
58.	Program pengelolaan persampahan	Rp. 1.589.555.934
59.	Program pendaftaran penduduk	Rp. 1.586.830.700
60.	Program pencatatan sipil	Rp. 251.254.400
61.	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Rp. 339.898.000
62.	Program penataan desa	Rp. 74.000.000
63.	Program administrasi pemerintahan desa	Rp. 574.613.200
64.	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Rp. 1.385.758.157
65.	Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 2.304.263.000
66.	Program pengelolaan pelayaran	Rp. 110.413.000
67.	Program pengelolaan penerbangan	Rp. 186.097.240
68.	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Rp. 1.014.701.950
69.	Program pengelolaan aplikasi informatika	Rp. 1.601.957.600
70.	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Rp. 16.699.450
71.	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Rp. 63.062.000

No	Program	Anggaran
72.	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Rp. 406.770.000
73.	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Rp. 82.150.000
74.	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 417.879.900
75.	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Rp. 5.000.000
76.	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Rp. 225.000.450
77.	Program pengembangan ekspor	Rp. 30.000.000
78.	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Rp. 50.000.000
79.	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Rp. 400.008.780
80.	Program perencanaan dan pembangunan industri	Rp. 289.750.000
81.	Program pengendalian izin usaha industri	Rp. 49.750.000
82.	Program pengembangan iklim penanaman modal	Rp. 75.860.000
83.	Program pelayanan penanaman modal	Rp. 190.958.600
84.	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Rp. 512.881.500
85.	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Rp. 15.998.900
86.	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Rp. 756.647.250
87.	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Rp. 9.130.271.602
88.	Program pembinaan perpustakaan	Rp. 251.367.250
89.	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Rp. 9.855.000
90.	Program pengelolaan arsip	Rp. 289.292.700
91.	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Rp. 48.176.000
92.	Program pengelolaan perikanan tangkap	Rp. 1.124.494.100
93.	Program pengelolaan perikanan budidaya	Rp. 1.178.119.709
94.	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Rp. 100.500.000
95.	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Rp. 256.151.000
96.	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rp. 820.203.350
97.	Program pemasaran pariwisata	Rp. 390.305.650
98.	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Rp. 44.960.000
99.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Rp. 1.998.756.280
100	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Rp. 9.907.631.502
101	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Rp. 465.400.108
102	Program penyuluhan pertanian	Rp. 2.077.464.630
103	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Rp. 19.676.500
104	Program perizinan usaha pertanian	Rp. 12.355.500

No	Program	Anggaran
105	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Rp. 4.531.924.810
106	Program perekonomian dan pembangunan	Rp. 1.095.528.050
107	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rp. 12.677.044.600
108	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Rp. 710.229.150
109	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Rp. 958.328.100
110	Program penelitian dan pengembangan daerah	Rp. 295.959.900
111	Program pengelolaan keuangan daerah	Rp. 120.049.321.228
112	Program pengelolaan barang milik daerah	Rp. 544.173.600
113	Program pengelolaan pendapatan daerah	Rp. 2.192.753.512
114	Program kepegawaian daerah	Rp. 1.836.553.475
115	Program pengembangan sumber daya manusia	Rp. 1.477.397.580
116	Program penyelenggaraan pengawasan	Rp. 954.468.550
117	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Rp. 270.551.500
118	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp. 122.060.000
119	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 446.287.150
120	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp. 730.596.300
121	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 38.625.000
122	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp. 50.425.000
123	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Rp. 146.772.000
124	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Rp. 1.664.048.774
125	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Rp. 95.417.000
126	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Rp. 485.337.000
127	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Rp. 625.598.000

Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp 1.217.687.887.173,00

Simpang Empat, 28 Februari 2023





BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH DAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka perlu menetapkan indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ditetapkan oleh Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
11. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat adalah :

- (1) untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- (2) untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

- (1) indikator Kinerja Utama Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk:

- (1) menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- (2) menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- (3) menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- (4) menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan

(5) melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 28 Maret 2022



Diundangkan di Simpang Empat

Pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

SEKRETARIAT DAERAH
PASAMAN BARAT

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 15

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH TAHUN 2021-2026

MISI 1 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN INOVATIF

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1.	Penerapan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Perhitungan Indeks oleh KemenPAN-RB
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	Hasil penilaian BPK atas laporan keuangan daerah (UU Nomor 15 Tahun 2004)
		Nilai SAKIP	Permenpanrb Nomor 12 Tahun 2015
		Level Maturitas SPIP	Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021
		Tingkat Kapabilitas APIP	UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 30 Tahun 2014
		Indeks Profesionalitas ASN	Perhitungan Indeks oleh KemenPAN-RB
		Indeks Maturitas SPBE	Perhitungan Indeks oleh KemenPAN-RB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai penimbang

MISI 2 : MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAQWA, BERBUDAYA, DAN BERDAYA SAING

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1.	Mewujudkan Masyarakat Yang Agamais dan Berbudaya, Aman Tentram, dan Tangguh	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	Jumlah kejadian kejahatan / jumlah penduduk x 10.000
		% Capaian PASBAR MENGAJI	Capaian progam/ target x 100
		Adat, seni dan budaya yang dilestarikan	Adat, seni dan budaya yang dilestarikan
		Indeks Pembangunan Gender	Perhitungan Indeks oleh BPS
		Predikat Kabupaten Peduli HAM	Hasil Penilaian oleh KemenkumHAM
		Indeks Pemberdayaan Gender	Perhitungan Indeks oleh BPS
		Predikat Kabupaten Layak Anak	Nilai oleh Kementerian PP-PA
		Indeks Ketahanan Daerah	Hasil penilaian oleh BPBD
2.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)]$ <p>Dimana:</p> <p>X(1) : Indeks harapan hidup</p> <p>X(2) : Indeks pendidikan = $2/3(\text{indeks melek huruf}) + 1/3(\text{indeks rata-rata lama sekolah})$</p> <p>X(3) : Indeks standar hidup layak</p> <p>Indeks $X(i) = X(i) - X(i)\text{min} / [X(i)\text{maks} - X(i)\text{min}]$</p> <p>Dimana:</p> <p>X(1) : Indikator ke-i ($i = 1, 2, 3$)</p> <p>X(2) : Nilai maksimum sekolah X(i)</p>

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL
			X(3) : Nilai minimum sekolah X(i)
		Rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.
		Rata-Rata Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>dimana:</p> <p>HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p>E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>i = Usia (a, a + 1, ..., n)</p> <p>FK = Faktor koreksi pesantren</p>
		Usia Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
		Prevalensi Stunting	Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu dibagi jumlah anak balita pada waktu yang sama dikali 100%
		Laju Pertumbuhan Penduduk	$r = (P_t/P_0)^{1/t} - 1$.

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL
			<p>Dengan Keterangan :</p> <p>r = Laju Pertumbuhan Penduduk.</p> <p>Pt = Jumlah Penduduk Tahun t.</p> <p>Po = Jumlah Penduduk Tahun Awal.t = Periode Waktu antara Tahun Awal dan Tahun t.</p>

MISI 3 : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG TANGGUH, BERDAYA SAING, DAN INKLUSIF

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL
1	2	3	4
1.	Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana:</p> <p>Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i</p> <p>Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p>
		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Produk domestik bruto periode tertentu dikurang produk domestik bruto periode sebelumnya dibagi produk domestik bruto periode sebelumnya dikali seratus persen
		Persentase Penduduk Miskin	$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL
		<p>Dimana:</p> <p>Po = Persentase penduduk miskin</p> <p>z = Garis kemiskinan</p> <p>yi = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berapa di bawah garis kemiskinan : $yi < z$</p> <p>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan</p> <p>n = Jumlah penduduk</p>	



Lampiran II : PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH DAN
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN
 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

1. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Publik	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di bidang Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, sesuai Permen PAN & RB No.17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai PP No. 13 Tahun 2019	Sekretariat Daerah

		Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Kesra Yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Bidang Kesra yang diimplementasikan/ Jumlah Kebijakan yang dihasilkan X 100%	Sekretariat Daerah
2	Meningkatnya Fungsi Koordinasi Pembangunan Daerah	Persentase Rumusan Kebijakan Ekonomi yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Bidang Ekonomi yang diimplementasikan/ Jumlah Kebijakan yang dihasilkan X 100%	Sekretariat Daerah
		Persentase rumusan kebijakan Pembangunan yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Pembangunan yang diimplementasikan / Jumlah Kebijakan yang dihasilkan X 100%	Sekretariat Daerah
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Nilai yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Sekretariat Daerah

2. SEKRETARIAT DPRD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Memfasilitasi Fungsi DPRD	Persentase Perda yang Ditetapkan	Jumlah Perda yang disetujui DPRD dibagi Jumlah Ranperda yang Diusulkan	Sekretariat DPRD
		Persentase Pembahasan Dokumen Penganggaran tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah Dokumen DPRD yang dihasilkan	Sekretariat DPRD

3. INSPEKTORAT

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah OPD Yang Ditetapkan Sebagai Zona Integritas	Jumlah OPD Yang dicanangkan Sebagai Zona Integritas	Sekretariat Daerah
		OPD dengan Nilai SPIP Minimal 3	Jumlah OPD yang memperoleh Nilai SPIP Level 3	Inspektorat
		OPD dengan Nilai SAKIP Minimal B	Jumlah OPD yang memperoleh Nilai SAKIP B	Inspektorat
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan	Realisasi temuan yang telah ditindaklanjuti dibagi temuan awal dikali 100%	Inspektorat

4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Optimaliasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan dokumen jangka menengah daerah dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah OPD dengan dokumen perencanaan baik dibagi Jumlah OPD dikali 100%	Perup No. 65 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan OPD
2	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan pelaksanaan	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan	Jumlah target kinerja IKU yang tercapai dibagi Jumlah target kinerja pada IKU daerah x 100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

	pembangunan Persentase capaian IKU daerah	pelaksanaan pembangunan Persentase capaian IKU daerah		
3	Mewujudkan kinerja dan pelayanan Bappeda yang kompeten dan Akuntabel	Mewujudkan kinerja dan pelayanan Bappeda yang kompeten dan Nilai komponen perencanaan pada penilaian SAKIP	Nilai komponen perencanaan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah oleh Kementerian PAN-RB	Nilai komponen perencanaan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah oleh Kementerian PAN-RB
4	Meningkatnya peran kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase implementasi kelitbangan	Jumlah hasil kelitbangan dalam RKPD dibagi Jumlah hasil kelitbangan dalam RPJMD dikali 100%	1. Dokumen RPJMD Kab. Pasaman Barat 2. Dokumen RKPD Kab. Pasaman Barat
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas inovasi daerah	Kategori capaian <i>Innovation Government Award</i> (IGA)	Kategori daerah pada penilaian dan validasi indeks inovasi daerah oleh Kementerian Dalam Negeri	Keputusan Menteri Dalam Negeri

5. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel, Efektif dan efisien	Persetujuan bersama Rancangan Perda tentang APBD tepat waktu/Paling lam 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran dimulai	Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bab IV huruf b point 1.a	Bidang Anggaran (BPKD)

6. BADAN ASET DAN PENDAPATAN DAERAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan Penataan Bmd sesuai SOP	Jumlah OPD yang menata bBMD sesuai SOP/Total OPD X 100%	Badan Aset dan Pendapatan Daerah
2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dengan Pendapatan Daerah)	Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah	Jumlah PAD BAPD dibagi PAD Pasaman Barat X 100%	Badan Aset dan Pendapatan Daerah
		Persentase Realisasi PAD	Total Realisasi PAD/Target X 100%	Badan Aset dan Pendapatan Daerah

7. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaianb	Total nilai persepsi per Unsur/ total unsur yang terisi x 100	Badan Kepegawaian dan Pemngembangan Sumber Daya Manusia
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah total hasil perkalian dari bobot dmensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/ indikator	Badan Kepegawaian dan Pemngembangan Sumber Daya Manusia
3	Meningkatnya kapabilitas ASN	Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan	Jumlah pejabat yang telah mengikuti diklat PIM/ Total Pejabat Eselon x 100	Badan Kepegawaian dan Pemngembangan Sumber Daya Manusia

8. BADAN KESBANGPOL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kesbangpol	Nilai SAKIP Kesbangpol	Hasil Penilaian SAKIP Badan Kesbangpol yang dikeluarkan Oleh Inspektorat	Inspektorat
		Level Maturitas SPIP Kesbangpol	Hasil Penilaian Maturitas SPIP Badan Kesbangpol yang dikeluarkan oleh Inspektorat	Inspektorat
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan Keuangan Kesbangpol	Penurunan temuan BPK atas Laporan Keuangan Badan Kesbangpol	Inspektorat
2	Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Persentase konflik social yang ditangani	Jumlah Konflik yang ditangani/ jumlah konflik yang terjadi dalam 1 tahun	Badan Kesbangpol
		Persentase siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi	Jumlah siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideology / jumlah siswa SMP dan SMA	Badan Kesbangpol
		Persentase Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan	Jumlah Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan / jumlah ormas yang terdaftar	Badan Kesbangpol
3	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Masyarakat yang berpartisipasi dalam Pemilu / masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih	Badan Kesbangpol

9. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang berdaya saing	Persentase rata-rata lama dan harapan sekolah	Persentase rata-rata lama dan harapan sekolah	BPS
2	Meningkatnya nilai adat, seni dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Adat, seni dan cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah adat, seni dan cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

10. DINAS KESEHATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun dibagi dengan Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama dikali 100.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB)	<p>Rumus</p> $AKB = \frac{D 0 - < 1 \text{ th}}{\Sigma \text{ Lahir Hidup}} \times K$	Dinas Kesehatan

		Prevalensi Stunting	Jumlah balita pendek dibagi jumlah balita yang diukur panjang/tinggi badan dikali 100%	Dinas Kesehatan
		Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Jumlah capaian indikator SPM dibagi jumlah indikator dikali 100%	Dinas Kesehatan
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Rumah Tangga ber PHBS (%)	Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS dibagi Jumlah Seluruh Rumah Tangga dikali 100%	Dinas Kesehatan

11. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kulitas Sumber Daya RSUD dalam memberikan pelayanan dan meningkatnya Tata kelola RS yang Mandiri dan Akuntabel	Persentase Pencapaian SPM Rumah Sakit	Kepmenkes 129 Tahun 2008	RSUD Pasaman Barat
		Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi	Jumlah SDMK yang bekerja didalam sistim kesehatan, baik yang berpendidikan dibidang kesehatan maupun non kesehatan memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya	RSUD Pasaman Barat

12. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya infrastruktur Publik yang sesuai standar	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dibagi panjang jalan Kabupaten keseluruhan dikali 100%	Bidang Bina Marga DPUPR
		Persentase daerah Irigasi dalam kondisi Baik	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi luas irigasi kabupaten dikali 100%	Bidang PSDA DPUPR
		Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi panjang seluruh drainase didaerah Kabupaten dikali 100%	Bidang Cipta Karya DPUPR
		Rasio tenaga operator/teknis/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis dibagi jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah kab/kota dikali 100%	Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi DPUPR
2	Meningkatkan Pengendalian pemanfaatan ruang	Keataatan RTRW	Realisasi RTRW dibagi rencana peruntukan dikali 100%	Bidang Tata Ruang DPUPR
		Rasio Kepatuhan IMB	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya dibagi jumlah IMB yang berlaku dikali 100%	Bidang Cipta Karya DPUPR

		Rasio Bangunan Gedung Pemerintah yang tertata Bangunan Lingkungannya	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang tertata bangunan dan lingkungannya dibagi jumlah seluruh bangunan gedung pemerintah dikali 100%	Bidang Cipta Karya DPUPR
3	Pengentasan kemiskinan	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	Jumlah penduduk yang mendapat akses air minum dibagi jumlah penduduk seluruh nya dikali 100%	Bidang Cipta Karya DPUPR
		Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah penduduk yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk+jumlah rumah yang lumpur tinjanya diolah PLT+jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah IPALD dibagi jumlah penduduk seluruhnya dikali 100%	Bidang Cipta Karya DPUPR
		Jangkauan wilayah (kecamatan) dalam pengangkutan sampah	Jumlah kecamatan yang terlayani pengangkutan sampah	Bidang Cipta Karya DPUPR

13. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	Fasiliasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ jumlah masyarakat	Dinas Perumahan dan Permukiman

			yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten x 100	
		Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni /Jumlah penduduk korban bencana x 100	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Persentase areal kawasan kumuh	Luas kawasan kumuh /luas Wilayah x 100	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni / Jumlah seluruh rumah yang ada di wilayah Kabupaten x 100	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Cakupan Lingkungan yang sehat dana man yang didukung dengan PSU	Luasan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU / Total luasan permukiman x 100	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Persentase pengembang yang tersertifikasi	Jumlah pengembang yang tersertifikasi / total jumlah pengembang x 100	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan	Penyelesaian izin lokasi (%)	Jumlah Izin Lokasi / Permohonan Izin Lokasi x 100	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Persentase Konflik Pertanahan Difasilitasi	Jumlah konflik pertanahan difasilitasi /Jumlah konflik pertanahan ygagn dilaporkan x 100	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Jumlah Fasilitasi ganti rugi tanah	Angka Mutlak (Jumlah Fasilitasi ganti rugi tanah dalam satu tahun anggaran)	Dinas Perumahan dan Permukiman

14. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Kebakaran	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Satpol PP dan Kebakaran	Hasil pemeriksaan BPK	Inspektorat
		Nilai Sakip	Hasil Penilaian Menpan RB	Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP	Hasil penilaian BPKP	Inspektorat
2	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi total pelanggaran K3 x 100	Satpol PP dan Kebakaran
3	Meningkatnya Kulaitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Daerah	Tingkat Waktu Tanggap (response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Rata-rata waktu dari laporan diterima hingga mobil damkar tiba di tempat kejadian	Satpol PP dan Kebakaran

15. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Masyarakat yang tangguh menghadapi bencana	Rasio penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi dengan Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana dikali 100	BPBD
		Rasio penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi dengan jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dikali 100	BPBD
		Rasio penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi dengan jumlah korban keseluruhan dari bencana dikali 100	BPBD

16. DINAS SOSIAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti dibagi Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis dikali 100 %	Dinas Sosial
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jumlah penyandang cacat Fisik dan Mental, lanjut usia yang tidak potensial yang menerima jaminan social dibagi populasi penyandang cacat fisik mental dan lanjut usia dikali 100%	Dinas Sosial
2	Meningkatnya Penanganan Korban bencana alam dan social	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi populasi korban alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang	Dinas Sosial

		tanggap darurat bencana daerah kab/kota	membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dikali 100%	
--	--	---	---	--

17. DINAS TENAGA KERJA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100	Dinas Tenaga Kerja
2	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah pencarik kerja yagn mendapatkan pelatihan dibagi jumlah pencari kerja keseluruhan dikali 100	Dinas Tenaga Kerja
3	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	Angka tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	Jumlah jiwa tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)	Jumlah Kasus perselisihan HI yang terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Dinas Tenaga Kerja
4	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat eks Transmigrasi	Jumlah Eks Transmigrasi yang difasilitasi program penguatan SDM	Jumlah Jorong Eks Transmigrasi yang difasilitasi program penguatan SDM	Dinas Tenaga Kerja

18. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terpenuhinya Hak Anak	Total Score Pemenuhan Hak Anak (Klaaster 1-5)	Penilaian KLA oleh Kementerian	DPPKBP3A
2	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Kejadian Per 100.000 perempuan	DPPKBP3A
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Kejadian Per 100 anak	DPPKBP3A
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Persentase Besaran Anggaran Responsive Gender Terhadap Total Anggaran Belanja Langsung APBD	Total APBD yang melalui GAB dan GBS / total belanja langsung x 100	DPPKBP3A
4	Menurunnya angka Kelahiran pada WUS 15-19 Tahun	ASFR 15-19 Tahun	Jumlah Kelahiran pada Wanita Usia Subur 15-19 Tahun/Jumlah Wanita Usia Subur 15-19 Tahun	DPPKBP3A
5	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern	mCPR	Jumlah peserta KB Aktif Modern/ Jumlah PUS usia 15-49 Tahun x 100	DPPKBP3A
6	Meningkatnya Jumlah Keluarga yang Ikut BKB	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	Jumlah Anggota BKB/ Jumlah Keluarga Balita x 100	DPPKBP3A

19. DINAS KETAHANAN PANGAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya ketersediaan pangan	Persentase ketersediaan pangan utama	Jumlah cadangan pangan dibagi jumlah kebutuhan pangan dikali 100 %	Bulog, BPS, DTPHP
		Peningkatan kelembagaan pengelola pasokan komoditi	Peningkatan jaringan kelembagaan distribusi pangan masyarakat melalui Gapoktan	DKTP
2	Meningkatnya distribusi dan akses pangan	Ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan	Kecamatan yang dipantau harga pangan pokok, kondisi pasokan dan akses terhadap pangan	DKTP
3	Meningkatnya keragaman konsumsi dan keamanan pangan	Skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi	PPH adalah susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama $PPH = \% \text{ angka kecukupan gizi (AKG)} \text{ dikali bobot masing-masing kelompok pangan}$	Data Primer, Data Sekunder, BPS
		Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita/hari (%)	Realisasi ketersediaan energi dan protein per kapita/hari dibagi target ketersediaan energi dan protein per kapita/hari dikali 100 %	Data Primer, Data Sekunder, BPS, DTPHP, dan Bulog

20. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Optimalisasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$(0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (P2KLH) DLH Kabupaten Pasaman Barat
2	Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang tertangani	Volume sampah yang ditangani dibagi volume produksi sampah dikali 100%	Bidang Kebersihan dan Pertamanan

21. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	% penurunan temuan	Persentase Penurunan temuan yang diperoleh pada Tahun berjalan	Disdukcapil
		Nilai SAKIP	Nilai SAKIP yang diperoleh pada tahun berjalan	Disdukcapil
		Level Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP yang diperoleh pada tahun berjalan	Disdukcapil
2	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepasan Masyarakat	Nila Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh dari hasil survey pada tahun berjalan	Disdukcapil

22. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya pemerintahan nagari yang efektif dan efisien	Persentase status desa mandiri menurut IDM	Jumlah Desa Mandiri pada IDM/Jumlah Desa x 100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
		Persentase Desa tertinggal menurut IDM	Jumlah Nagari Tertinggal / Jumlah Nagari x 100	
2	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Masyarakat,Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	% Lembaga Sosial Aktif di Nagari	Jumlah lembaga social, ekonomi, dan lembaga adat aktif / jumlah total lembaga sosial, lembaga ekonomi dan lembaga adat x 100	
		% lembaga Ekonomi aktif di Nagari		
		% Lembaga Adat Aktif di Nagari		

23. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya konektifitas angkutan umum dan konektifitas jalan	Persentase layanan angkutan darat	Jumlah penumpang yang menaikkan angkutan darat	Dinas Perhubungan
		Rasio konektivitas kabupaten	Jumlah pembangunan jalan dan jalan yang dilewati oleh angkutan umum	
		V/C Ratio di Jalan Kab/Kota	Volume jalan yang ada dibandingkan dengan kapasitas jalan yang ada	Dinas Perhubungan

24. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pelayanan aplikasi dan informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikali 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Meningkatnya konektivitas antar instansi, layanan publik melalui layanan elektronik dan penyebarluasan tentang kebijakan dan pemerintah daerah	Percentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo / Jumlah OPD x 100	Dinas Komunikasi dan Informatika
		% Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi Layanan Publik yang diselenggarakan dikali 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya penggunaan data statistik dalam Pengambilan Keputusan	Percentase OPD yang menggunakan Data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah	Jumlah OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah / Jumlah OPD x 100	Dinas Komunikasi dan Informatika

3	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik serta komprehensif dan implementasi	Indek KAMI	Tingkatan pada KAMI	Dinas Komunikasi dan Informatika
---	--	------------	---------------------	----------------------------------

25. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Jumlah koperasi aktif dibagi jumlah koperasi dikali 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	Meningkatnya Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro menjadi Kecil	Jumlah Usaha Mikro menjadi kecil dibagi jumlah Usaha Mikro dikali 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase Usaha Mikro Aktif	Jumlah Usaha Mikro Aktif dibagi jumlah Usaha Mikro dikali 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	Meningkatnya Efisiensi Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Sektor perdagangan tahun -n dibagi PDRB total tahun -n dikali 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase alat - Alat Ukur, Takar, Timbang dan	Jumlah alat - Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

		Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	yang berlakudibagi jumlah alat - Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku dikali 100%	
4	Meningkatnya IKM, UKM dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Jumlah IKM	Jumlah IKM tahun n - jumlah IKM tahun n-1 /Jumlah IKM tahun n-1 x 100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Kontribusi PDRB dari Sektor Industri	Sektor industri tahun -n dibagi PDRB total tahun -n dikali 100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

26. DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas	Nilai IKM Perizinan	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang	DPMPTSP
2	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Kenaikan Nilai Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN tahun n	DPMPTSP

27. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya peran serta pemuda dalam organisasi dan ekonomi	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang aktif dalam organisasi sosial di kab/kota / jumlah pemuda (usia 16-30 tahun) di kab/kota x 100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan Ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota / jumlah pemuda (usia 16-30 tahun) di kab/kota x 100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	Meningkatnya prestasi olahraga daerah	Jumlah perolehan mendali pada even olahraga pada tingkat nasional dan internasional	Jumlah perolehan mendali pada even olahraga pada tingkat nasional dan internasional	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

28. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengelolaan sistem karsipan pada Instansi pemerintah disemua tingkatan	Nilai Laporan Audit Karsipan Eksternal	Jumlah OPD yang dilakukan pengawasan dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%	Dinas Karsipan dan Perpustakaan

2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perpustakaan	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
---	---	---	---	----------------------------------

29. DINAS PERIKANAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap tahun berjalan – jumlah produksi pada kondisi awal dibagi Jumlah produksi pada kondisi awal dikali 100%	Dinas Perikanan
2	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya tahun berjalan – jumlah produksi pada kondisi awal dibagi Jumlah produksi pada kondisi awal dikali 100%	Dinas Perikanan
3	Meningkatnya produksi ikan olahan	Persentase peningkatan produksi ikan olahan	Jumlah produksi perikanan budidaya tahun berjalan – jumlah produksi pada kondisi awal dibagi Jumlah produksi pada kondisi awal dikali 100%	Dinas Perikanan

30. DINAS PARIWISATA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya daya Tarik destinasi dan pemasaran pariwisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan (Lokal dan Nusantara) di destinasi Wisata Pasaman Barat	Dinas Pariwisata
		Kontribusi sector Pariwisata terhadap PAD	Jumlah PAD Sektor Pariwisata (Retribusi masuk objek wisata, Pajak Hotel, Pajak Rumah Makan/Restoram) dibagi jumlah Total PAD Kabupaten Pasaman Barat dikali 100%	Dinas Pariwisata
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan pertumbuhan unit usaha Ekonomi Kreatif	Jumlah peningkatan sub sector ekonomi kreatif yang dibinai dibagi total jumlah sub sector ekonomi kreatif dikali 100%	Dinas Pariwisata

31. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	% Peningkatan/Penurunan produksi komoditas Tanaman Pangan	Total produksi tahun ini (ton/Ha)- total produksi tahun lalu (ton/Ha) / Total Produksi tahun ini (Ton/Ha)	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

		% Peningkatan/Penurunan produksi komoditas Hortikultura	Total produksi tahun ini (ton/Ha)- total produksi tahun lalu (ton/Ha) / Total Produksi tahun ini (Ton/Ha)	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
		Produktivitas Padi atau Bahan pangan utama local lainnya	Hasil Ubinan KSA dari BPS	Badan Pusat Statistik
2	Meningkatnya populasi ternak	% Peningkatan/Penurunan populasi Komoditas Ternak	Jumlah ternak tahun sekarang (ekor) – jumlah ternak tahun lalu (ekor) / Jumlah ternak tahun sekarang	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
3	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja DTPHP	Peningkatan nilai SAKIP	Hasil Penilaian Menpan RB	Bagian Organisasi
		Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian Menpan BPKP	Inspektorat
		Jumlah temuan BPK	Hasil penilaian Menpan BPK	BPKD

32. DINAS PERKEBUNAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan	Jumlah Produksi komoditi Perkebunan: Kelapa Sawit, Kopi Robusta, Kopi Arabika, Nilam, Kelapa, Pinang	Produksi tanaman perkebunan pada tahun berjalan	Dinas Perkebunan
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	1. Nilai Sakip	Nilai Sakip yang diperoleh pada tahun berjalan (nilai)	Dinas Perkebunan

		2. Level Maturitas SPIP 3. % penurunan temuan BPK	Level Maturitas SPIP yang diperoleh pada tahun berjalan (level) % temuan BPK yang diperoleh pada tahun berjalan (%)	
--	--	--	--	--

33. KECAMATAN KINALI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikali 100%	Kecamatan Kinali
3	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Urusan pemerintahan umum yang dikerjakan dibagi urusan umum yang tersedia dikali 100%	Kecamatan Kinali

34. KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masbyarakat	Jumlah nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikali 100%	Kecamatan Sasak Ranah Pasisie

2	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dikerjakan dibagi urusan umum yang tersedia dikali 100%	Kecamatan Sasak Ranah Pasisie
---	---	---	--	----------------------------------

35. KECAMATAN TALAMAU

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikali 100%	Kecamatan Talamau
2	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dikerjakan dibagi urusan umum yang tersedia dikali 100%	Kecamatan Talamau

36. KECAMATAN PASAMAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikali 100%	Kecamatan Pasaman

2	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dikerjakan dibagi urusan umum yang tersedia dikali 100%	Kecamatan Pasaman
---	---	--	--	-------------------

37. KECAMATAN GUNUNG TULEH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikali 100%	Kecamatan Gunung Tuleh
2	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dikerjakan dibagi urusan umum yang tersedia dikali 100%	Kecamatan Gunung Tuleh

38. KECAMATAN LEMBAH MELINTANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikali 100%	Kecamatan Lembah Melintang

2	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dikerjakan dibagi urusan umum yang tersedia dikali 100%	Kecamatan Lembah Melintang
---	---	--	--	----------------------------

39. KECAMATAN RANAH BATAHAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikali 100%	Kecamatan Ranah Batahan
2	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dikerjakan dibagi urusan umum yang tersedia dikali 100%	Kecamatan Ranah Batahan

40. KECAMATAN SUNGAI BEREMAS

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikali 100%	Kecamatan Sungai Beremas

2	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dikerjakan dibagi urusan umum yang tersedia dikali 100%	Kecamatan Sungai Beremas
---	---	--	--	--------------------------

41. KECAMATAN SUNGAI AUR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikali 100%	Kecamatan Sungai Aur
2	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dikerjakan dibagi urusan umum yang tersedia dikali 100%	Kecamatan Sungai Aur

42. KECAMATAN LUHAK NAN DUO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masayarakat (IKM)	Jumlah nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikali 100	Kecamatan Luhak Nan Duo

2	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dikerjakan dibagi urusan umum yang tersedia dikali 100	Kecamatan Luhak Nan Duo
---	---	--	---	-------------------------

43. KECAMATAN KOTO BALINGKA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dibagi jumlah masyarakat penerima layanan dikali 100%	Kecamatan Koto Balingka
2	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dikerjakan dibagi urusan umum yang tersedia dikali 100%	Kecamatan Koto Balingka

